

**PENYUSUNAN TIPOLOGI PERDESAAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN**

Oleh :  
**Tim IPB**  
(Institut Pertanian Bogor)



*Kerjasama*  
**KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**  
*dengan*  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**2006**

**PENYUSUNAN TIPOLOGI PERDESAAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN**

Oleh :

**Tim IPB  
(Institut Pertanian Bogor)**

- A. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr**
- B. Dr. Ir. Titik Sumarti, MS**
- C. Ir. Dwi Rachmina, MS**
- D. Ir. Said Rusli, MA**
- E. Dr. Ir. Aji Hamim Wigena, MSc**



*Kerjasama*

**KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

*dengan*

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**2006**

## DAFTAR ISI

Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Tujuan dan Sasaran .....	2
I.3. Hasil yang Diharapkan/ Keluaran .....	2
I.4. Ruang Lingkup Kajian .....	3
II. GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI INDONESIA.....	4
2.1. Definisi Desa dan Sistem Administrasi Desa di Indonesia.....	4
2.2. Dinamika Perkembangan Penduduk Perdesaan di Indonesia .....	7
2.3. Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Perdesaan.....	12
2.4. Kebijakan Klasifikasi/ Tipologi Desa dan Desa Tertinggal di Indonesia.....	22
III. METODOLOGI.....	26
3.1. Tahapan Penelitian.....	26
3.1.1. Pendekatan Deduktif.....	26
3.1.2. Pendekatan Induktif .....	31
3.2. Data dan Sumber Data .....	31
3.3. Pendekatan Pentipologian Deduktif.....	34
3.4. Teknik Analisis Pentipologian Induktif.....	36
3.5. Pendekatan Pentipologian Terpadu Desa Perbatasan Tertinggal.....	38
IV. KAJIAN UMUM DESA-DESA PERBATASAN DAN DESA TERTINGGAL DI LOKASI STUDI.....	39
4.1. Gambaran Umum Desa-desa di Kabupaten-kabupaten Perbatasan yang Dikaji .....	39
4.1.1. Kondisi Geografis .....	39
4.1.2. Kondisi Demografis .....	40
4.1.3. Kondisi Sosial Masyarakat .....	42

4.1.4. Kondisi Ekonomi Masyarakat .....	45
4.2. Tipologi Awal Terhadap Desa-desa di Empat Kabupaten Lokasi Studi .....	49
4.3. Hipotesis Umum atas Tipologi Desa-desa Perbatasan Tertinggal .....	58
<b>V. PENGEMBANGAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS TIPOLOGI PERDESAAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kabupaten Raja Ampat – Provinsi Irian Jaya Barat .....	60
5.2. Kabupaten Sangihe – Provinsi Sulawesi Utara.....	65
5.3. Kabupaten Natuna – Provinsi Kepulauan Riau .....	68
<b>VI. TIPOLOGI DESA PERBATASAN TERTINGGAL</b>	
6.1. Hasil Pentipologian Berdasarkan Skenario 2 Kelompok/ <i>cluster</i> Wilayah .....	76
6.2. Hasil Pentipologian Berdasarkan Skenario 3 Kelompok/ <i>cluster</i> Wilayah .....	79
6.3. Hasil Pentipologian Berdasarkan Skenario 4 Kelompok/ <i>cluster</i> Wilayah .....	84
<b>VII. REKOMENDASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL DI KAWASAN PERBATASAN .....</b>	<b>91</b>
7.1. Skenario Pentipologian 2 Kelompok/Cluster .....	91
<b>7.2. Skenario Pentipologian 3 Kelompok/Cluster .....</b>	<b>93</b>
<b>7.3. Skenario Pentipologian 4 Kelompok/Cluster .....</b>	<b>96</b>
Lampiran .....	102

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
2.1.	Persen Penduduk Tinggal di Perdesaan dan Perkotaan serta Laju Perubahannya pada Beberapa Titik Tahun dan Perubahannya	9
2.2	Persentase Penduduk di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 1990, 1995, 2000, 2003	11
2.3.	Persentase Jumlah Penduduk Perkotaan di Jawa-Bali dan Indonesia dan Perdesaan di Indonesia Tahun 1990, 1995, 2000, 2003	11
2.4.	Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2004	12
2.5.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2002 dan 2003	16
2.6.	Persentase Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2003	18
2.7.	Persentase Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2000 dan 2003	21
4.1.	Jumlah Desa dan Kecamatan di Empat Kabupaten	39
4.2.	Rata-rata Luas Desa di Empat Kabupaten	40
4.3.	Rata-rata Jumlah Penduduk per Desa menurut Jenis Kelamin di Empat Kabupaten	41
4.4.	Rata-rata Kepadatan Geografis per Desa di Empat Kabupaten	41
4.5	Rata-rata Jumlah Keluarga per Desa di Empat Kabupaten	42
4.6.	Persentase Keluarga menurut Kondisi Kesejahteraan, Kesehatan, Tempat Tinggal, dan Penerangan di Desa-desa di Empat Kabupaten	43
4.7	Rata-rata Rasio Jumlah SD, Posyandu serta Bidan dan Dukun Bayi per Desa di Empat Kabupaten	44
4.8.	Rata-rata Jumlah SD, SLTP, Puskesmas, dan Posyandu per Desa di Empat Kabupaten	44
4.9	Rata-rata Persentase Keluarga Pertanian per Desa di Empat Kabupaten	46

<b>No.</b>	<b><i>Teks</i></b>	<b>Halaman</b>
4.10	Pola Penggunaan Lahan Pertanian dan Non Pertanian per Desa di Empat Kabupaten	47
4.11.	Kepadatan Agraris per Desa di Empat Kabupaten	47
4.12.	Rata-rata Luas Pemilikan Sawah dan Non Sawah per Desa di Empat Kabupaten	48

## DAFTAR TABEL

<b>No.</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
2.1.	Perkembangan Jumlah Penduduk Perdesaan dan Perkotaan Pada Titik Tahun 1971, 1985, 1990, 2000, dan 2004	8
2.2	Persentase Penduduk di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi, Tahun 1990, 1995, 2000, 2003	10
2.3.	Rata-rata Pengeluaran Penduduk Desa dan Kota Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Tahun 2004	13
2.4.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi tahun 2002 dan 2003	14
2.5.	Persentase Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2003	17
2.6.	Persentase Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2000 dan 2003	19
4.1.	Jumlah Desa Setiap Gerombol	49
4.2.	Jumlah Desa Setiap Propinsi dalam Setiap Gerombol	50
4.3	Profil Setiap Gerombol dan Kepentingan Beberapa Variabel dalam Setiap Gerombol	53
4.4.	Variabel-Variabel Kualitatif (Kategorik) Pembeda Gerombol	55
6.1.	Deskripsi Tipologi Kecamatan Terluar dengan Skenario 2 Cluster	78
6.2.	Deskripsi Tipologi Kecamatan Terluar dengan Skenario 3 Cluster	81
6.3.	Deskripsi Tipologi Kecamatan Terluar dengan Skenario 4 Cluster	85
7.1.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster I pada skenario 2 Kelompok/Cluster.	91
7.2.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster II pada skenario 2 Kelompok/Cluster.	92
7.3.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster I pada skenario 3 Kelompok/Cluster	93

7.4.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster II pada skenario 3 Kelompok/Cluster	94
7.5.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster III pada skenario 3 Kelompok/Cluster	96
7.6.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster I pada skenario 4 Kelompok/Cluster	97
7.7.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster II pada skenario 4 Kelompok/Cluster	98
7.8.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster III pada skenario 4 Kelompok/Cluster	99
7.9.	Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster IV pada skenario 4 Kelompok/Cluster	100



# I. PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Dari hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan perdesaan (sekitar 60%). Selama ini kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktifitas kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kualitas lingkungan pemukiman perdesaan.

Kebijakan pembangunan perdesaan sesuai dengan RPJM 2004-2009 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai Sumber Daya Pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas akan dilakukan terutama melalui program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, yang bertujuan untuk:

- a. Membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan.
- b. Meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan perdesaan tersebut, kebijakan umum pembangunan daerah tertinggal adalah pemihakan, percepatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. Adapun kebijakan tersebut diterjemahkan dalam kebijakan operasional antara lain yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum di daerah tertinggal sehingga setara dengan rata-rata masyarakat Indonesia lainnya.

- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain melalui skim USO (Universal Service Obligation) untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi dan listrik masuk desa.
- c. Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber permodalan pasar, informasi dan teknologi.
- d. Mengubah orientasi pembangunan daerah perbatasan dari pendekatan yang lebih menekankan kepada kesejahteraan dan menjadikannya beranda depan negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah tertinggal tersebut perlu dilakukan secara terpadu dan tepat sasaran serta tepat kegiatan. Untuk maksud tersebut perlu ada pengelompokan tipologi perdesaan sesuai dengan kondisi perdesaan tersebut terutama dalam bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan karakteristik geografisnya, sehingga upaya pengembangan pemberdayaan perdesaan terutama di daerah perbatasan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan tipologinya.

## **I.2. Tujuan dan Sasaran**

### **Tujuan:**

1. Menyusun Tipologi Perdesaan sesuai dengan kondisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan karakteristik geografis.
2. Melakukan pengelompokan (cluster) tipologi perdesaan.

### **Sasaran:**

1. Tersusunnya Tipologi Perdesaan sesuai dengan kondisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan karakteristik geografis.
2. Tersusunnya pemetaan (mapping) pengelompokan (cluster) tipologi perdesaan.

## **I.3. Hasil yang Diharapkan/ Keluaran**

Adapun hasil yang diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan (mapping) pengelompokan (cluster) tipologi perdesaan

2. Kemudahan dalam penanganan pemberdayaan masyarakat perdesaan terutama di daerah perbatasan, sesuai dengan tipologinya.

#### **I.4. Ruang Lingkup Kajian**

Lingkup Kegiatan Penyusunan Tipologi Perdesaan dalam rangka Pengembangan Keberdayaan Masyarakat di Daerah Perbatasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menelaah Data Potensi Perdesaan sebagai sumber data dan informasi yang berasal dari:
  - a. Data Podes tahun 2002 dan Susenas Tahun 2003 dari BPS
  - b. Data Validasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2005
  - c. Data Podes Tahun 2005 dari BPS
2. Mengkaji Master Plan dan Data Pengembangan Kawasan Tertinggal dan Perbatasan yang sudah ada di Provinsi dan Kabupaten.
3. Melakukan kajian terhadap peraturan perundangan yang relevan dan mendukung Penyusunan Tipologi Perdesaan dalam rangka Pengembangan Keberdayaan Masyarakat.
4. Menyusun indikator penilaian tipologi untuk mengelompokkan Tipologi Perdesaan.
5. Melakukan survai lapangan untuk melengkapi dan menyempurnakan data yang ada agar akurat dan mutakhir.
6. Melakukan tabulasi dan analisa data
7. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Tipologi Perdesaan dalam rangka Pengembangan Keberdayaan Masyarakat.

## II. GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI INDONESIA

### 2.1. Definisi Desa dan Sistem Administrasi Desa di Indonesia

Pada mulanya, istilah Desa hanya dikenal di Jawa yang sekaligus menunjukkan tatanan masyarakatnya. Dalam perkembangannya, istilah Desa digunakan di seluruh wilayah Indonesia untuk menunjuk organisasi masyarakat yang setingkat yang merupakan unit organisasi pemerintahan terendah. Upaya pengaturan keberadaan Desa-Desa di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial, yang kemudian dilanjutkan setelah masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, Desa-Desa di Jawa dan luar Jawa diatur dengan dikeluarkan ordonansi-ordonansi. Dimulai pada tahun 1906 dengan dikeluarkannya *Inlandse Gemeente Oru'onunlie en Madura*, disingkat I.G.O yang mengatur Pemerintahan Desa. Kemudian menyusul I.G.O-I.G.O untuk wilayah-wilayah di luar Jawa-Madura, berturut-turut (Surianingrat,1980). Ordonansi untuk Sumatera Barat pada tahun 1918, Ordonansi untuk Bangka dan bawahannya pada tahun 1919, Ordonansi untuk Palembang pada tahun 1919, Ordonansi untuk Distrik-distrik Lampung pada tahun 1922, Ordonansi untuk Tapanuli pada tahun 1923, Ordonansi untuk Ambon pada tahun 1923, Ordonansi untuk Belitung pada tahun 1924, Ordianansi untuk Kalimantan Timur pada tahun 1924, Ordonansi untuk Bengkulu pada tahun 1931, dan Ordonansi untuk Minahasa (Manado) pada tahun 1931. Namun, kemudian I.G.O.-I.G.O untuk luar Jawa-Madura dicabut, dan digantikan satu I.G.O. yang dikenal dengan I.G.O.B. Dengan berbagai ordonansi tersebut yang mengatur Desa (Pemerintahan Desa) memungkinkan terdapatnya keragaman organisasi pemerintahan terendah, seperti Desa Marga dan Negeri.

I.G.O. dan I.G.O.B. tidak memberikan apa yang dimaksud dengan Desa. Desa disebut dengan *Inlandse Gemeente*. Di Jawa, *Inlandse Gemeente* adalah Desa. Di dalam I.G.O.B. disebutkan bahwa *Inlandse Gemeente* adalah suatu badan hukum yang diwakili oleh Kepala Haminte Pribumi (Surianingrat, 1980). *Inlandse Gemeente* diberi sebutan sesuai dengan tradisi setempat seperti: Marga, Kampung, dan Negeri.

Hingga keluarnya Undang-undang No. 5 1979 tentang Pemerintahan Desa, tidak ada suatu rumusan formal, apa yang dimaksud dengan Desa. Namun mungkin

dijumpai rumusan-rumusan perorangan yang beraneka ragam yang mendeskripsikan tentang Desa. Rumusan apa yang dimaksud dengan Desa harus berintikan unsur-unsur Desa yang berfungsi sebagai syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk terbentuknya atau eksistensinya Desa. Dari hasil suatu kajian ilmiah (Koentjaraningrat, 1964), terdapat empat prinsip yang dapat berfungsi dalam terbentuknya Desa. Keempat prinsip itu adalah:

1. Prinsip "hubungan kekerabatan" atau hubungan genealogis.
2. Prinsip "hubungan tinggal dekat" atau hubungan teritorial.
3. Prinsip "tujuan khusus", terbentuknya Desa karena kebutuhan-kebutuhan khusus.
4. Prinsip yang datang "dari atas", prinsip hubungan ini tidak timbul dalam masyarakat desa tetapi datang "dari atas".

Sebelum keluarnya Undang-undang No.5 1979 tentang Pemerintahan Desa, pernah ada Undang-undang tentang Desapraja, yaitu Undang-undang No. 19/1965. Undang-undang ini tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Desa, tetapi bahkan menghapus Desa. Namun, Undang - undang ini tidak sempat dilaksanakan berhubung terjadinya perubahan ketatanegaraan, dan dicabut pada tahun 1969. Undang-undang No.5 1979 tentang Pemerintahan Desa merupakan Undang-undang pertama yang memberikan rumusan pengertian Desa. Dirumuskan sebagai berikut:

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dari definisi desa diatas terlihat adanya empat unsur desa:

1. Wilayah
2. Penduduk
3. Pemerintahan
4. Otonomi

Selain itu dengan istilah kesatuan masyarakat, secara implisit menunjukkan adanya tatanan hubungan yang terpola antar warganya yang dituntun oleh kelembagaan dan

organisasi dengan peran-peran dan status-status untuk mendukung tatanan hubungan yang terpola tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ditegaskan kembali tentang otonomi Desa. Desa didefinisikan sebagai berikut:

"Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten"

Dalam Pasal 93 antara lain dinyatakan bahwa Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Dalam penjelasan Pasal 93, disebutkan istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga.

Untuk tujuan implementasi kebijakan dan program pembangunan, Desa juga didefinisikan berdasarkan orbitasinya (Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. 1996). Orbitasi menunjukkan letak ataupun posisi Desa/Kelurahan dan kemudahan untuk dijangkau. Definisi Desa/Kelurahan berdasarkan orbitasinya adalah sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan *enclave* atau desa hutan, yaitu Desa/Kelurahan yang berada dalam kawasan hutan (produksi, lindung).
2. Desa/Kelurahan DAS, yaitu Desa/Kelurahan yang berada dalam kawasan daerah aliran sungai.
3. Desa/Kelurahan kepulauan, yaitu Desa/Kelurahan yang berada di daerah (Kecamatan) kepulauan, sehingga transportasi antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan melalui Laut.
4. Desa/Kelurahan pantai, yaitu Desa/Kelurahan yang letaknya di pantai atau langsung berbatasan dengan Laut.
5. Desa terisolasi, yaitu Desa yang waktu tempuh dari ibu kota Kecamatan lebih dari 5 jam dan belum ada sarana transportasi umum ke Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
6. Desa perbatasan, yaitu Desa yang langsung berbatasan dengan wilayah negara lain.

## **2.2. Dinamika Perkembangan Penduduk Perdesaan di Indonesia**

Proses pembangunan yang kita laksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan dampak masalah pembangunan yang semakin besar dan kompleks. Pendekatan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antar wilayah yang cukup tinggi. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan misalnya antara wilayah desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan non Jawa dan sebagainya.

Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin kita capai sebagai bangsa. Potensi konflik menjadi sedemikian besar karena wilayah-wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya. Demikian pula hubungan antar wilayah telah membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah-wilayah hinterland menjadi lemah karena pengurasan sumberdaya yang berlebihan, sedangkan pusat-pusat pertumbuhan pada akhirnya menjadi lemah karena proses urbanisasi yang luar biasa. Fenomena urbanisasi yang mampu memperlemah perkembangan kota ini dapat kita lihat pada perkembangan kota-kota besar di Indonesia yang dipenuhi oleh daerah-daerah kumuh (slum area), polusi, kemacetan, kriminalitas, pengangguran dan sebagainya.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan problem terpenting dalam khasanah pemikiran logik dan teoritik ilmu perencanaan wilayah. Berbagai fenomena empirik menunjukkan bahwa ketidakmerataan dalam jangka panjang akan menghambat pertumbuhan. Negara-negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjaga sustainabilitas pertumbuhannya dengan menjaga tingkat kemajuan yang merata. Menurut Saefulhakim (2004), dengan menggunakan logika hukum minimum Leibig, maka pada dasarnya tingkat kemajuan dari suatu sistem bergantung pada komponen sistem yang paling lemah. Demikian pula tingkat kemajuan suatu negara akan sangat ditentukan oleh wilayah yang paling lemah.

Untuk melihat secara riil perkembangan sekaligus perbandingan kondisi perdesaan dan perkotaan di Indonesia pada **Tabel 2.1.**, **Gambar 2.1.** dan **Gambar 2.2.** disampaikan sebaran penduduk di kawasan perdesaan dibandingkan dengan perkotaan.

**Tabel 2.1.** Perkembangan Jumlah Penduduk Perdesaan dan Perkotaan Pada Titik Tahun 1971, 1985, 1990, 2000, dan 2004

Tahun	Jumlah Penduduk		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
1971	20,765,272	98,467,227	119,232,499
1985	43,029,526	121,017,462	164,046,988
1990	55,433,790	123,813,993	179,247,783
2000	82,861,037	113,721,542	196,582,579
2004	93,860,044	123,212,302	217,072,346

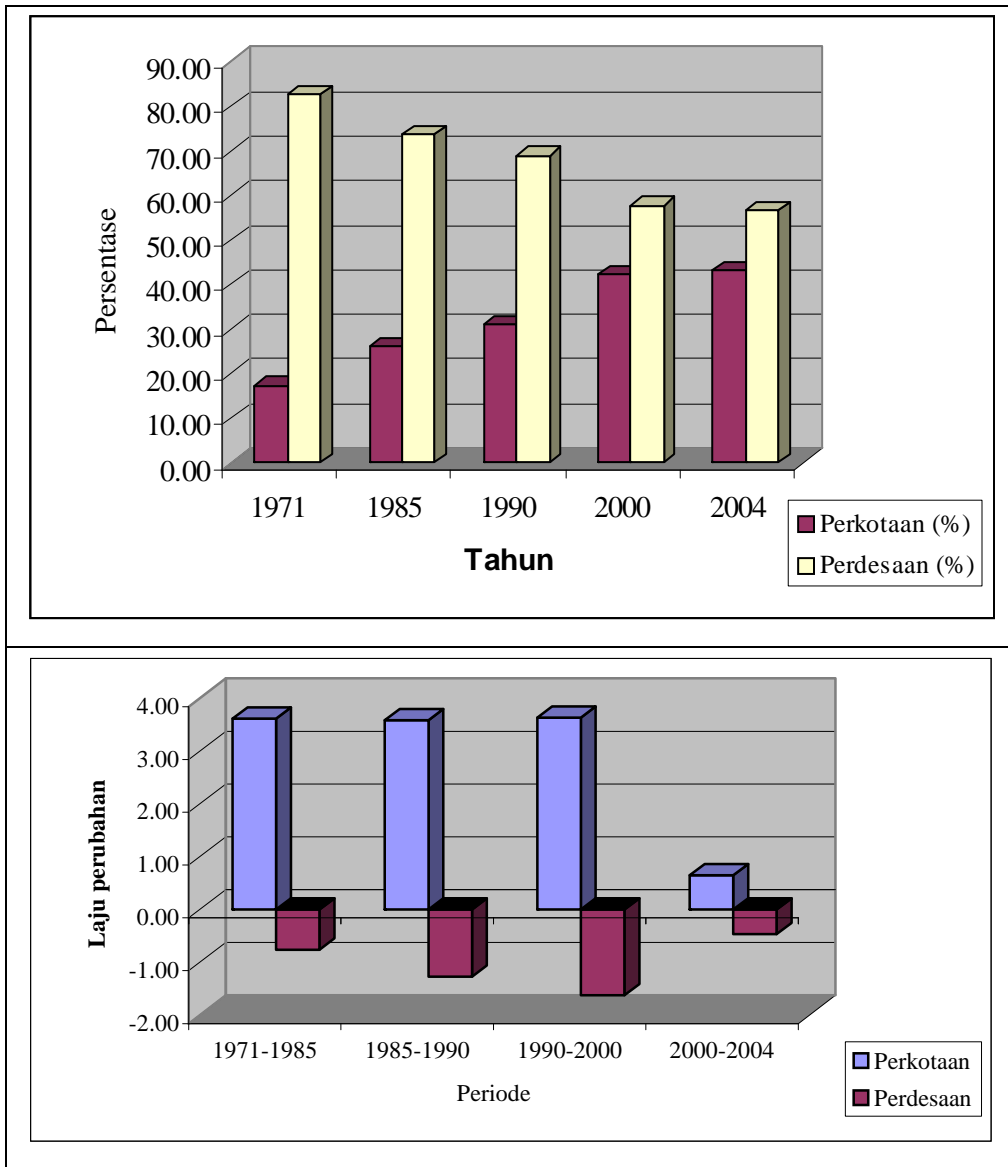
Sumber: Statistik Indonesia dalam berbagai titik tahun

**Tabel 2.1.** menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, penduduk yang tinggal di perdesaan meningkat namun dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung menurun. Untuk dapat melihat secara lebih baik, perubahan persentase penduduk yang tinggal di perdesaan dan perkotaan serta laju perkembangannya setiap periode disampaikan **Gambar 2.1.**

Dari Gambar 2.1. diketahui bahwa ditinjau dari persentase total penduduk di Indonesia, perbandingan antara yang tinggal di perdesaan dan perkotaan cukup meyakinkan bahwa pengurasan (*backwash*) telah terjadi. Perkembangan persentase penduduk yang tinggal di perdesaan dari tahun 1971 sampai dengan 2004 terus mengalami penurunan. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat dengan laju lebih cepat. Rata-rata laju pertumbuhan persentase penduduk di perkotaan kurang lebih 3% per tahun, kecuali pada periode terakhir, yaitu antara 2000-2004. Secara grafis hal ini disampaikan pada **Gambar 2.1.**

Dengan kecenderungan seperti itu, maka diperkirakan tahun 2005 jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 100 juta jiwa yang berarti hampir setengah jumlah penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. UN-HDR 2004 memperkirakan tahun 2015- sepuluh tahun dari sekarang- jumlah ini akan mencapai 57.8% dari total penduduk Indonesia.





**Gambar 2.1.** Persen Penduduk Tinggal di Perdesaan dan Perkotaan serta Laju Perubahannya pada Beberapa Titik Tahun dan Perubahannya (Sumber : P4W-IPB, 2005)

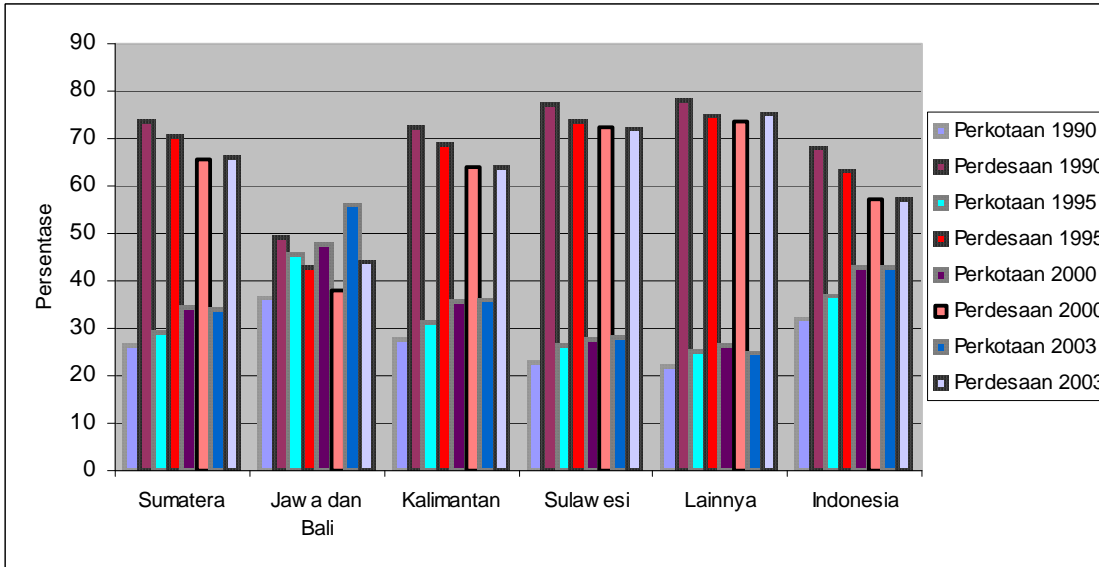
Kesenjangan jumlah penduduk yang tinggal di perdesaan dan perkotaan pada lingkup regional terlihat mencolok di kawasan timur Indonesia dimana jumlah perbandingan penduduk adalah 29,53 % di daerah perkotaan dibanding 70,47 % di perdesaan, berbeda dengan KBI dimana perbandingannya tidak terlalu jauh yakni 45,29 % di daerah perkotaan dan 45,29 % di perdesaan.

**Tabel 2.2. Persentase Penduduk di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi, Tahun 1990, 1995, 2000, 2003**

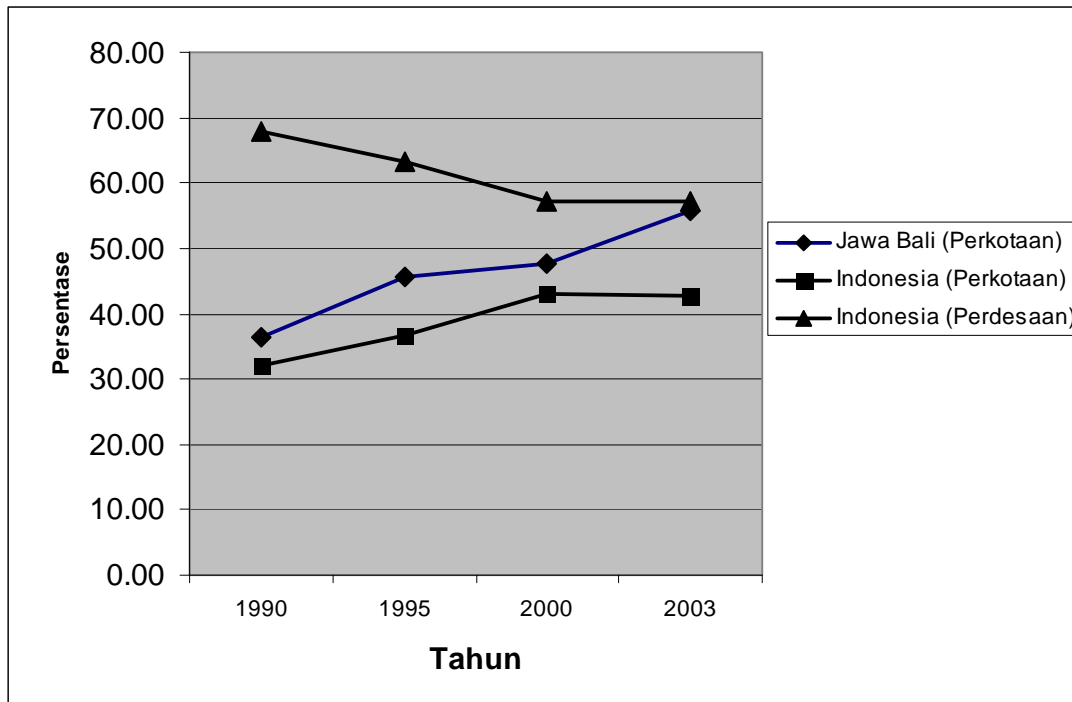
Propinsi	1990		1995		2000		2003	
	K	D	K	D	K	D	K	D
1. NAD	16,3	83,7	20,5	79,5	NA	NA	26,0	74,0
2. Sumut	36,4	63,6	41,1	58,9	42,6	57,4	43,2	56,8
3. Sumbar	22,8	77,2	25,1	74,9	27,6	72,4	29,4	70,6
4. Riau	32,2	67,8	34,4	65,6	42,3	57,7	43,0	57,0
5. Jambi	21,9	78,1	27,2	72,8	28,1	71,9	28,3	71,7
6. Sumsel	30,5	69,5	30,3	69,7	35,2	64,8	33,7	66,3
7. Bengkulu	19,7	80,3	25,7	74,3	28,2	71,8	27,9	72,1
8. Lampung	13,0	87,0	15,7	84,3	20,7	79,3	21,5	78,5
9. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	42,4	57,6
Sumatera	26,5	73,5	29,4	70,6	34,3	65,7	34,0	66,0
10. DKI	95,9	4,1	120,6	-	100,0	-	100,0	0,0
11. Jabar	33,5	66,5	42,7	57,3	50,2	49,8	50,6	49,4
12. Jateng	28,9	71,1	31,9	68,1	39,3	60,7	40,0	60,0
13. DIY	43,8	56,2	58,1	41,9	57,2	42,8	57,5	42,5
14. Jatim	27,9	72,1	32,1	67,9	40,5	59,5	40,6	59,4
15. Banten	-	-	-	-	-	-	52,2	47,8
Jawa	35,7	64,3	41,7	58,3	48,3	51,7	48,7	51,3
16. Bali	25,7	74,3	34,3	65,7	46,9	53,1	50,0	50,0
Jawa dan Bali								
17. Kalbar	20,8	79,2	21,7	78,3	26,5	73,5	26,6	73,4
18. Kalteng	18,0	82,0	22,3	77,7	27,7	72,3	27,9	72,1
19. Kalsel	27,7	72,3	30,0	70,0	35,1	64,9	36,6	63,4
20. Kaltim	47,5	52,5	50,2	49,8	56,9	43,1	55,1	44,9
Kalimantan	27,6	72,4			35,8	64,2	36,1	63,9
21. Sulut	23,6	76,4	26,3	73,7	33,1	66,9	37,1	62,9
22. Sulteng	16,7	83,3	21,9	78,1	20,2	79,8	20,3	79,7
23. Sulsel	25,1	74,9	28,3	71,7	29,2	70,8	29,5	70,5
24. Sultra	17,8	82,2	22,4	77,6	21,0	79,0	21,3	78,7
25. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	25,3	74,7
Sulawesi	22,9	77,1	26,3	73,7	27,7	72,3	28,0	72,0
26. NTB	17,5	82,5	18,8	81,2	34,4	65,6	35,0	65,0
27. NTT	11,9	88,1	13,9	86,1	15,5	84,5	16,0	84,0
28. Maluku	20,5	79,5	24,6	75,4	NA	NA	27,5	72,5
29. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	24,1	75,9
30. Papua	23,4	76,6	25,8	74,2	26,5	73,5	23,8	76,2
Lainnya	21,9	78,1	25,1	74,9	26,5	73,5	24,9	75,1
KBI	33,3	66,7	38,4	61,6	44,9	55,1	45,0	55,0
KTI	22,1	77,9	25,0	75,0	29,5	70,5	29,5	70,5
INDONESIA	32,0	68,0	36,8	63,2	42,9	57,1	42,8	57,2

KETERANGAN: K = PERKOTAAN; D = PERDESAAN

Sumber: BPS dan P4W-IPB, 2005



**Gambar 2.2** Persentase Penduduk di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 1990, 1995, 2000, 2003 (Sumber : P4W-IPB, 2005)

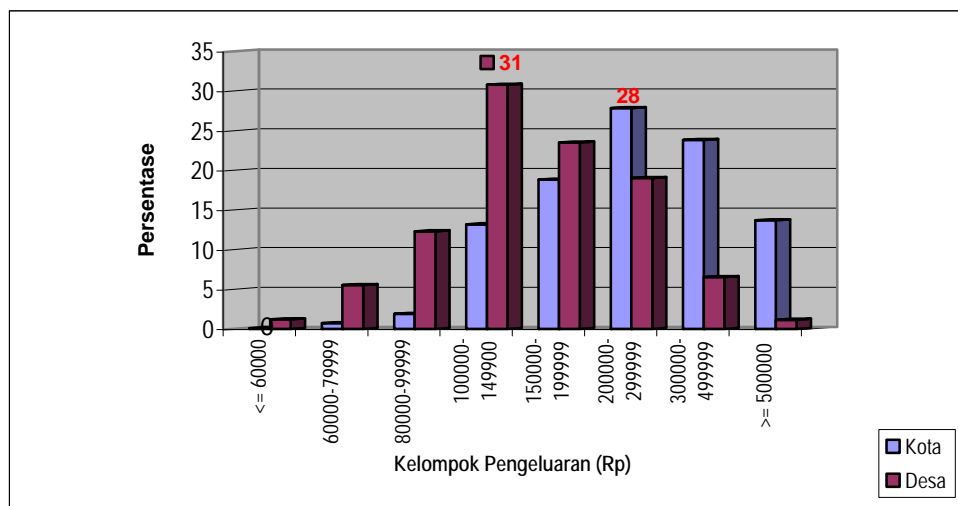


**Gambar 2.3.** Persentase Jumlah Penduduk Perkotaan di Jawa-Bali dan Indonesia dan Perdesaan di Indonesia Tahun 1990, 1995, 2000, 2003 (Sumber : P4W-IPB, 2005)

Pengurusan sumberdaya manusia dari perdesaan ke perkotaan menimbulkan permasalahan baik bagi perdesaan maupun bagi perkotaan. Bagi perdesaan, proses penyedotan SDM berkualitas ke perkotaan mengurangi peluang perkembangan lebih baik dari perdesaan itu sendiri. Peluang munculnya inovasi-inovasi bagi peningkatan kualitas kehidupan di perdesaan berkurang. Sementara itu, bagi perkotaan proses perpindahan SDM perdesaan ke perkotaan menimbulkan permasalahan baru terkait dengan daya dukung (*carrying capacity*) perkotaan yang terbatas. Muncul permasalahan pengangguran akibat kecepatan pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari kecepatan pertumbuhan peluang kerja. Turunan dari permasalahan pengangguran adalah munculnya daerah kumuh di perkotaan. Permasalahan ini sudah disadari sejak lama, namun sulit untuk mencari solusi tepat yang dapat menyelesaikan masalah dan rentetan berikutnya.

### 2.3. Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

Salah satu dampak dari pengurusan sumberdaya di perdesaan ke perkotaan antara lain adalah sulitnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, apalagi upaya untuk menyamakan posisi perdesaan dan perkotaan secara sejajar. Pada **Gambar 2.4.** ditunjukkan persentase penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran per kapita per bulan.



**Gambar 2.4.** Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2004

Dari **Gambar 2.4.** diketahui bahwa proporsi terbesar pengeluaran masyarakat perdesaan adalah pada kelompok antara Rp.100.000,- sampai Rp. 149.900,- sedangkan proporsi terbesar masyarakat perkotaan pada tingkat pengeluaran antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 299.999,-. Jika ditinjau lebih lanjut sebaran tingkat pendapatan masyarakat perdesaan menjulur ke kiri (*skewed to the left*), sebaliknya sebaran pengeluaran masyarakat perkotaan menjulur ke kanan (*skewed to the right*). Artinya secara umum penduduk perdesaan lebih banyak yang berpengeluaran rendah dan sebaliknya penduduk perkotaan lebih banyak yang berpengeluaran tinggi. Berdasarkan pernyataan beberapa ahli, tingkat pengeluaran merupakan indikator yang lebih tepat sebagai indikator pendapatan perkapita dibandingkan dengan tingkat pendapatan. Banyak resistensi yang menyebabkan masyarakat cenderung enggan menyampaikan besaran pendapatan. Hal tersebut terkait dengan keengganan implikasi lanjutan jika tingkat pendapatan diketahui, rasa malu atau resistensi lainnya.

Indikator pembangunan lain yang dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan dan perkotaan adalah persentase pengeluaran untuk bahan pangan. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bahan pangan maka semakin tidak sejahtera kelompok masyarakat yang bersangkutan. Pada **Tabel 2.3.** disampaikan perbandingan besaran pengeluaran kelompok masyarakat berdasarkan kelompok pengeluaran untuk pangan dan non pangan.

**Tabel 2.3.** Rata-rata Pengeluaran Penduduk Desa dan Kota Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Tahun 2004

Kelompok Barang	Besaran (Rp)		Persentase	
	Kota	Desa	Kota	Desa
Makanan	155,169	108,112	48.61	63.06
Bukan makanan	164,052	63,324	51.39	36.94
Total	319,221	171,436	100.00	100.00

Fenomena yang dapat dipahami dari **Tabel 2.3.** adalah bahwa secara umum proporsi pengeluaran terbesar masyarakat perdesaan masih untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sebaliknya masyarakat perkotaan proporsi terbesar adalah pemenuhan kebutuhan non pangan. Hal ini menunjukkan masyarakat perdesaan memiliki taraf hidup relatif rendah.

Keadaan (status) kesehatan penduduk baik di perdesaan maupun perkotaan memperlihatkan sedikit perbedaan dimana secara nasional 23,15 % penduduk di perkotaan mempunyai keluhan kesehatan sedikit lebih rendah dibanding di daerah perdesaan sekitar 24,16 % (Survey Sosial Ekonomi Nasional 2003). Penduduk di Kawasan Indonesia bagian barat mempunyai status kesehatan sedikit lebih baik dibanding KTI. Di KBI, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan didaerah perkotaan tidak berbeda dengan daerah perdesaan yakni 23,33 % dan 23,31 %. Sementara itu di KTI, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan didaerah perkotaan lebih sedikit dibanding dengan daerah perdesaan yakni 22,96 % dan 25,17 %.

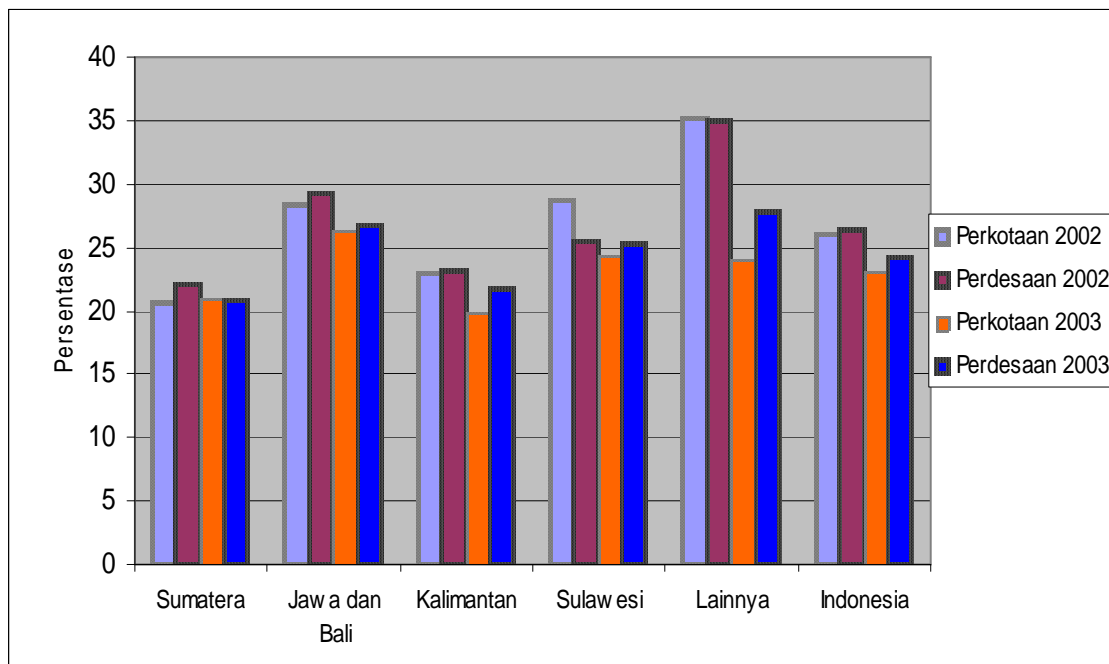
**Tabel 2.4.** Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi tahun 2002 dan 2003

Propinsi	2002		2003	
	K	P	K	P
NAD	na	na	20,05	25,16
Sumatera Utara	15,83	16,08	15,42	17,54
Sumatera Barat	20,92	30,42	19,91	25,98
Riau	18,05	16,97	17,86	17,39
Jambi	13,95	20,74	15,83	18,07
Sumatera Selatan	22,30	19,43	22,91	18,31
Bengkulu	30,52	30,87	26,64	26,67
Lampung	18,92	18,53	26,23	17,13
Bangka Belitung	24,17	23,47	23,32	21,65
Sumatera	20,58	22,06	20,91	20,88
DKI	28,91	-	27,61	-
Jawa Barat	22,18	27,52	20,70	25,22
Jawa Tengah	22,66	21,34	19,57	14,55
DIY	31,72	30,43	28,04	26,50
Jawa Timur	33,20	36,50	28,00	30,17
Banten	30,05	29,09	34,04	34,54
Jawa	28,12	28,98	26,33	26,20
Bali	30,04	30,13	27,12	29,34
Jawa dan Bali	28,39	29,17	26,44	26,72
Kalimantan Barat	24,26	26,53	20,30	22,09
Kalimantan Tengah	18,25	17,18	16,90	15,64

Propinsi	2002		2003	
	K	P	K	P
Kalimantan Selatan	24,74	27,78	24,39	25,93
Kalimantan Timur	24,70	21,38	18,35	22,97
Kalimantan	22,99	23,22	19,99	21,66
Sulawesi Utara	25,40	22,88	22,79	20,46
Sulawesi Tengah	34,81	31,46	30,97	41,90
Sulawesi Selatan	29,56	29,13	31,33	26,09
Sulawesi Tenggara	22,89	21,73	18,12	18,80
Gorontalo	30,45	22,25	18,41	19,61
Sulawesi	28,62	25,49	24,32	25,37
Nusa Tenggara Barat	37,56	33,85	37,05	35,77
Nusa Tenggara Timur	32,67	36,27	34,52	36,84
Maluku	na	na	16,82	21,95
Maluku Utara	na	na	18,17	24,85
Papua	na	na	13,26	19,41
Lainnya	35,12	35,06	23,96	27,76
KBI	24,23	25,11	23,55	23,08
KTI	27,75	26,40	24,83	26,01
Indonesia	26,03	26,43	23,15	24,16

**Keterangan: K = Perkotaan; D = Perdesaan**

**Sumber: BPS**



**Gambar 2.5.** Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2002 dan 2003

SUSENAS 2003 memperlihatkan status pendidikan penduduk perkotaan secara umum lebih baik dibanding penduduk perdesaan. Penduduk dengan status tidak atau belum pernah sekolah di daerah perkotaan 3,73 % sedangkan di daerah perdesaan 9,81 %. Untuk tingkat kawasan, di KBI, persentase penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah di daerah perkotaan 3,81 persen dan di daerah perdesaan 9,21 %. Di KTI, persentase penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah di daerah perkotaan 3,63 persen dan di daerah perdesaan 10,46 %.

Penduduk yang mencapai tingkat pendidikan menengah umum (SMU) di KBI lebih banyak dibanding dengan KTI, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Di KBI, persentase penduduk yang tamat SMU di daerah perkotaan 6,16 % dan di daerah perdesaan 3,55 %. Sedangkan di KTI, persentase penduduk yang tamat SMU di daerah perkotaan 6,49 % dan di daerah perdesaan 2,48 %.

Penduduk yang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi : diploma atau universitas juga menunjukkan di KBI lebih baik. Di KBI, persentase penduduk lulusan diploma atau universitas di daerah perkotaan 3,55 % dan di daerah perdesaan 0,43 %.



Sedangkan di KTI, persentase penduduk lulusan diploma atau universitas di daerah perkotaan 3,48 % dan didaerah pedesaan 0,33 %.

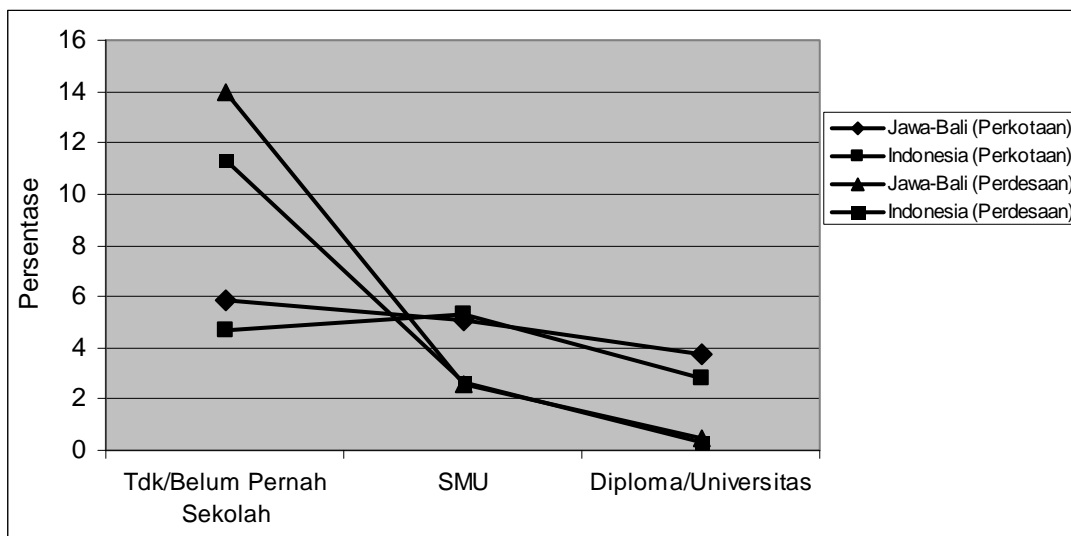
**Tabel. 2.5.** Persentase Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Perkotaan dan Pedesaan Menurut Propinsi Tahun 2003

Propinsi	Tdk/belum pernah Sekolah		SMU		Diploma/Universitas		Masih sekolah	
	K	P	K	P	K	P	K	P
NAD	1,58	4,81	7,98	5,88	4,86	0,77	28,54	24,85
Sumut	1,26	3,14	7,09	5,1	2,31	0,33	24,51	24,91
Sumbar	0,98	3,69	7,52	4,31	6,86	0,54	28,89	21,32
Riau	1,84	5,82	5,72	3,5	1,94	0,35	21,36	20,78
Jambi	3,32	6,16	7,03	3,13	3,56	0,47	23,35	19,14
Sumsel	1,82	5,59	7,42	2,28	3,34	0,11	25,67	18,45
Bengkulu	4,83	10,67	5,67	3,11	0,62	0,17	19,96	14,98
Lampung	1,09	6,77	8,83	3,21	4,61	0,53	27,93	20,58
Bangka Belitung	3,46	7,87	5,91	1,24	2,77	0,24	23,73	20,71
Sumatera	2,24	6,06	7,02	3,53	3,43	0,39	24,88	20,64
DKI	1,58	-	5,46	-	3,11	-	19,33	-
Jabar	3,42	7,88	4,58	1,69	2,09	0,25	20,38	14,84
Jateng	3,59	8,17	4,93	1,93	2,23	0,28	21,9	19,91
DIY	8,15	13,04	4,83	2,63	2,13	0,43	20,32	16,92
Jatim	8,39	17,69	5,42	4,19	11,18	1,24	26,65	17,02
Banten	7,17	18,19	4,67	2,2	2,50	0,3	18,75	13,72
Jawa	5,38	12,99	4,98	2,53	3,87	0,50	21,22	16,48
Bali	8,53	18,65	5,56	2,98	2,74	0,45	18,38	14,37
Jawa dan Bali	5,83	13,94	5,06	2,60	3,71	0,49	20,82	16,13
Kalbar	6,79	12,72	6,05	2,34	2,74	0,25	23,75	19,54
Kalteng	2,78	3,69	6,35	2,97	3,29	0,24	24,25	20,72
Kalsel	2,08	7,28	4,81	1,89	2,36	0,5	20,74	16,9
Kaltim	2,09	7,87	5,67	3,11	2,45	0,53	20,96	18,71
Kalimantan	3,44	7,89	5,72	2,58	2,71	0,38	22,43	18,97
Sulut	0,3	5,82	4,64	3,08	3,48	0,51	19,08	15,51
Sulteng	1,24	9,75	4,49	1,5	2,83	0,3	25,41	15,79
Sulsel	1,63	8,61	6,96	2,31	5,22	0,39	25,14	16,84
Sultra	6,42	8,59	6,06	2,48	6,32	0,42	30,41	16,7
Gorontalo	2,97	10,98	8,78	2,81	5,34	0,3	19,35	21,42

Propinsi	Tdk/belum pernah Sekolah		SMU		Diploma/Universitas		Masih sekolah	
	K	P	K	P	K	P	K	P
Sulawesi	2,51	8,75	6,19	2,44	4,64	0,38	23,88	17,25
NTB	16,18	23,02	4,97	2,42	1,2	0,27	21,74	18,84
NTT	2,39	13,56	9,19	1,37	3,91	0,2	29,84	17,6
Maluku	1,47	11,29	8,06	3,51	3,89	0,46	27,73	22,13
Maluku Utara	2,48	11,78	8,04	3,07	3,59	0,12	27,63	21,53
Papua	2,06	11,53	6,77	1,86	2,12	0,15	24,49	18,66
Lainnya	4,92	14,24	7,41	2,45	2,94	0,24	26,29	19,75
KBI	3,81	9,21	6,16	3,16	3,55	0,43	23,10	18,83
KTI	3,63	10,46	6,49	2,48	3,48	0,33	24,32	29,35
Indonesia	4,7	11,32	5,34	2,64	2,83	0,35	21,28	18,63

**Keterangan: K = Perkotaan ; D = Perdesaan**

**Sumber: BPS**



**Gambar 2.6.** Persentase Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2003

Status lapangan pekerjaan, di KBI persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian sudah berkurang terutama di daerah perkotaan karena berkembangnya sektor jasa-jasa dan industri. Di perkotaan, persentase penduduk yang bekerja di sektor perdagangan 29,27 persen dan jasa-jasa 24,25 persen, sedangkan sektor industri dan pertanian berimbang sekitar 15 persen, namun di daerah perdesaan KBI, sebagian besar

penduduk masih menggantungkan kelangsungan hidupnya pada sektor pertanian 69,52 %, diikuti sektor perdagangan 10,52 % dan transportasi serta industri masing-masing 8,41 % dan 6,14 %. Di KTI, persentase penduduk di perkotaan lebih banyak bekerja di sektor perdagangan 26,52 % dan jasa-jasa 27,64 %, sementara sektor industri masih belum berkembang sehingga menyerap lebih sedikit tenaga kerja 8,05 %. Di daerah perdesaan sekitar 75,85 persen masih menggantungkan kelangsungan hidupnya di sektor pertanian, sektor perdagangan masih dominan setelah sektor pertanian sebesar 7,98 %.

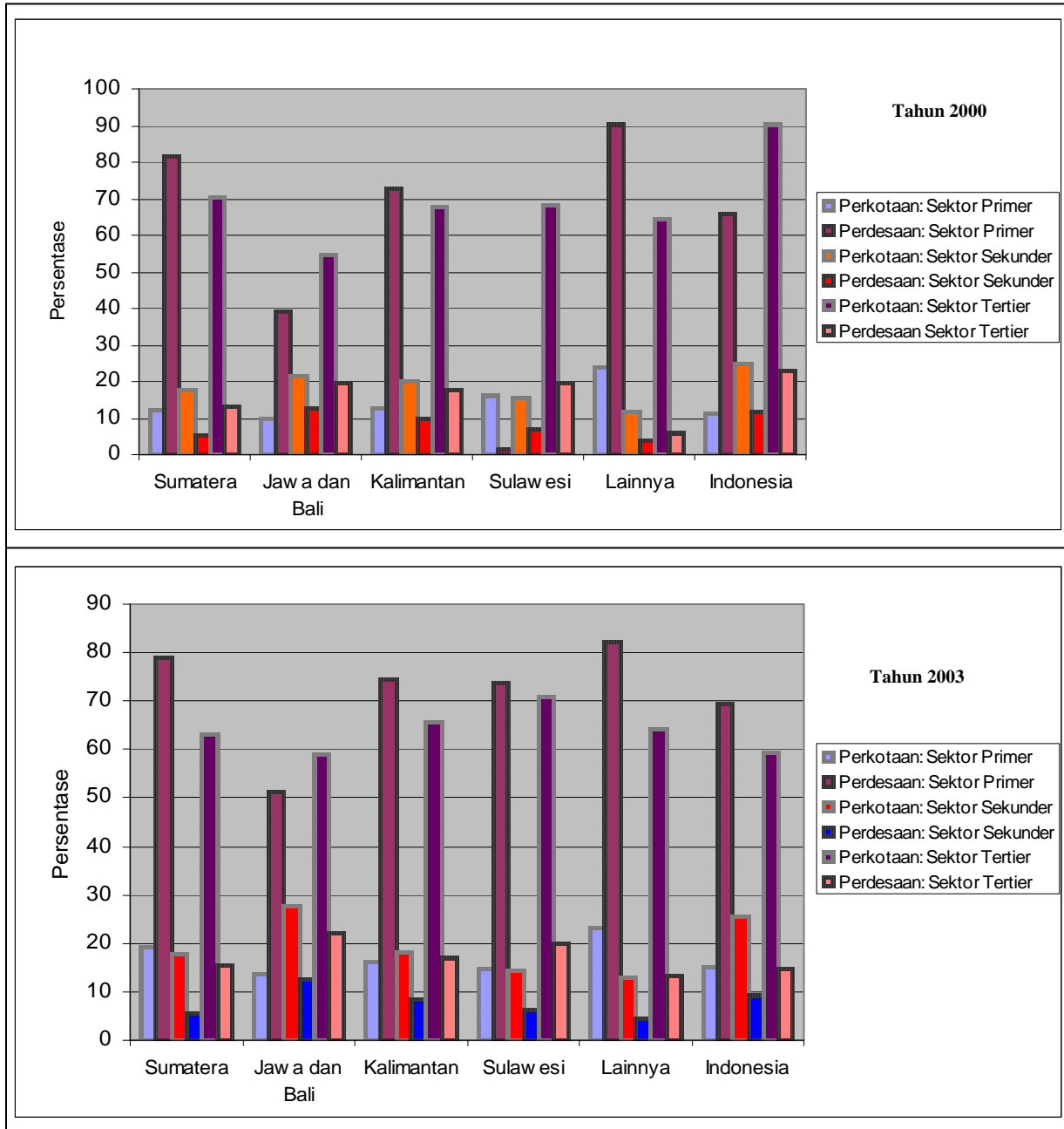
**Tabel 2.6.** Persentase Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2000 dan 2003

Propinsi	2000						2003					
	Primer		Sekunder		Tertier		Primer		Sekunder		Tertier	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
NAD	0,0	0,0					23,3	74,1	12,5	6,4	64,2	19,5
Sumut	14,9	81,7	19,3	3,5	65,8	14,9	14,6	78,5	22,1	6,1	63,2	15,5
Sumbar	14,8	62,5	15,5	10,2	69,7	27,3	13,9	65,4	14,1	9,0	72,0	25,6
Riau	16,0	67,4	16,6	7,2	67,3	25,3	14,0	75,8	27,6	6,1	59,4	18,2
Jambi	13,9	77,3	17,2	8,0	68,9	14,8	21,2	79,5	18,4	5,8	60,4	14,8
Sumsel	12,4	80,8	21,2	5,8	66,4	13,5	14,1	84,7	22,2	4,3	63,8	11,1
Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	82,5	15,5	4,1	49,0	7,5
Lampung	10,6	85,6	13,7	3,8	75,7	10,6	18,5	88,5	10,6	1,7	70,9	12,0
Bangka												
Belitung	13,8	77,0	21,6	7,4	64,7	15,7	18,4	82,0	17,1	5,5	64,6	16,3
Sumatera	12,2	81,3	17,7	5,6	70,2	13,2	19,3	79,0	17,8	5,4	63,1	15,6
DKI	0,9	0,0	22,5	0,0	76,6	0,0	1,8	0,0	27,3	0,0	70,0	0,0
Jabar	6,4	50,8	31,2	14,7	62,6	34,5	12,3	56,6	29,9	13,4	57,9	30,0
Jateng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	56,1	38,7	13,0	59,6	30,9
DIY	14,6	58,8	26,8	16,3	58,7	25,0	19,9	60,4	28,9	15,6	51,2	24,0
Jatim	21,9	52,0	19,7	21,8	58,4	26,1	21,0	58,5	20,4	15,9	58,7	25,6
Banten	14,2	64,5	27,4	12,9	58,4	22,6	19,4	67,5	25,0	10,7	55,6	21,7
Jawa	9,7	37,7	21,2	10,9	52,5	18,0	13,4	49,9	28,4	11,4	58,8	22,0
Bali	10,9	46,9	21,9	23,8	67,3	29,3	16,0	58,6	23,0	17,9	61,0	23,5
Jawa dan Bali	9,8	39,0	21,3	12,8	54,6	19,6	13,8	51,1	27,6	12,4	59,1	22,2
Kalbar	7,6	79,1	17,2	7,2	75,2	13,7	16,8	81,0	15,5	6,3	67,7	12,6
Kalteng	13,9	71,9	19,7	9,6	66,4	18,5	22,3	76,9	13,0	7,0	64,8	16,2
Kalsel	9,2	67,7	18,7	11,9	72,1	20,7	9,6	72,2	20,2	9,7	70,3	18,1

Propinsi	2000						2003					
	Primer		Sekunder		Tertier		Primer		Sekunder		Tertier	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
Kaltim	19,5	71,8	24,0	10,4	56,5	17,9	15,9	67,9	24,0	10,7	60,1	21,1
Kalimantan	12,5	72,6	19,9	9,8	67,6	17,7	16,1	74,5	18,1	8,4	65,7	17,0
Sulut	12,4	2,5	15,7	6,3	71,9	20,5	15,3	70,8	15,6	6,0	69,1	23,2
Sulteng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	72,1	14,4	6,1	71,0	21,9
Sulsel	15,0	0,5	15,0	6,2	70,1	21,6	15,8	76,1	12,0	4,8	72,2	19,1
Sultra	13,6	1,3	14,5	7,0	71,9	17,9	13,7	75,5	16,6	7,4	69,8	17,2
Gorontalo	24,4	1,4	16,6	7,8	59,0	18,1	14,7	75,0	13,5	6,8	71,8	18,2
Sulawesi	16,3	1,4	15,4	6,8	68,2	19,5	14,8	73,9	14,4	6,2	70,8	19,9
NTB	22,0	63,7	16,0	12,5	62,0	23,9	33,6	75,8	15,3	7,6	51,2	16,7
NTT	25,4	81,5	12,9	6,0	61,7	9,6	17,7	89,7	14,1	4,0	68,2	6,3
Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	80,0	11,4	4,2	67,7	15,8
Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	75,5	10,9	5,2	65,4	19,3
Papua	23,9	90,3	11,6	4,1	64,5	5,8	19,7	89,8	12,2	1,9	68,1	8,3
Lainnya	23,9	90,3	11,6	4,1	64,5	5,8	23,1	82,2	12,8	4,6	64,1	13,3
KBI	10,7	57,9	16,3	7,7	60,6	16,8	19,0	76,9	18,3	6,7	62,9	16,4
KTI	13,3	38,0	13,0	6,4	52,2	13,4	18,2	77,0	14,9	6,3	66,9	16,7
Indonesia	11,4	65,7	25,0	11,6	90,1	22,7	15,1	69,3	25,6	9,1	59,3	14,6

**Keterangan: K = Perkotaan; D = Perdesaan**

**Sumber: BPS**



**Gambar 2.7.** Persentase Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Propinsi Tahun 2000 dan 2003

Dari keseluruhan indikator yang telah disampaikan di atas dapat dinyatakan bahwa kondisi kesenjangan desa-kota bukan hanya isu yang tidak terbukti, tetapi merupakan suatu realita yang harus disikapi. Berbagai data BPS tahun 2004 tersebut

menunjukkan bahwa masih cukup berat tugas pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan yang notabene sebagian besar bertumpu di sektor pertanian.

Salah satu upaya penyeimbangan pembangunan antar wilayah adalah dengan memperhatikan kawasan-kawasan yang selama ini disebut sebagai kawasan tertinggal/perdesaan. Sebagai langkah awal tentunya perlu dipetakan tipologi dari daerah-daerah yang masuk dalam kategori kawasan tertinggal berdasarkan kondisi wilayah baik dari sisi potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan / infrastruktur (SDB), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya sosial / kelembagaan (SDS).

#### **2.4. Kebijakan Tipologi Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal di Indonesia**

Umumnya berbagai upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi ataupun membuat tipologi desa terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan program-program pembangunan berdasarkan prioritas-prioritas. Pada tingkat nasional terdapat kebijakan klasifikasi desa berdasarkan potensi arah pengembangannya dan tingkat perkembangannya (Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, 1996). Klasifikasi ini digunakan untuk meningkatkan status perkembangan desa. Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, BPS membuat tipologi desa untuk mengidentifikasi "Desa Miskin" atau yang lebih dikenal dengan Desa Tertinggal.

Berdasarkan potensi arah pengembangannya, dibedakan 9 Tipe Desa sebagai berikut:

1. Desa nelayan adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha kenelayanan.
2. Desa persawahan adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha pertanian sawah.
3. Desa perladangan adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha pertanian ladang.
4. Desa perkebunan adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha perkebunan.
5. Desa peternakan adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha peternakan.

6. Desa pertambangan/galian C adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha pertambangan/galian C.
7. Desa industri kecil dan kerajinan adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha industri kecil/ kerajinan
8. Desa industri sedang dan besar adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha industri sedang dan besar.
9. Desa jasa/perdagangan adalah Desa yang prioritas pengembangannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan usaha jasa dan perdagangan.

Ketika masih berlaku klasifikasi status perkembangan desa yang dibuat Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (1996), indikator makro yang digunakan dalam penentuan status perkembangan Desa adalah:

1. Kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Perekonomian Desa.
4. Peran serta masyarakat.
5. Pemasyarakatan P4 dan Kesadaran Berbangsa.
6. Keamanan, keterampilan, dan ketertiban.

Kategori Desa/Kelurahan berdasarkan tingkat perkembangannya terdiri dari:

#### 1. Desa Swadaya

Desa Swadaya adalah adalah Desa yang tingkat perkembangannya terendah, umumnya dicirikan dengan kualitas kesehatan penduduk, tingkat pendidikan penduduk dan perekonomian penduduk yang rendah. Selain itu, Desa ini] juga belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola sumber dayanya dalam kegiatan pembangunan.

#### 2. Desa/Kelurahan Swakarya

Desa/Kelurahan swakarya adalah Desa/Kelurahan yang tingkat perkembangannya pada tahap sedang berkembang. Umumnya dicirikan dengan kualitas kesehatan yang

belum baik, perekonomian penduduknya sudah cukup berkembang dan pendidikan penduduknya sudah cukup baik. Desa ini mulai dapat mengelola sumber daya yang dimiliki, walaupun masih membutuhkan pembinaan dari luar.

### 3. Desa/Kelurahan Swasembada

Desa/Kelurahan swasembada adalah Desa/Kelurahan yang tingkat perkembangannya sudah maju. Desa/Kelurahan ini dicirikan dengan kualitas kesehatan penduduk, tingkat perekonomian, dan tingkat pendidikan penduduknya yang sudah sangat baik. Desa ini sudah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri untuk pembangunan.

Dari ketiga kategori status (tingkat) perkembangan desa tersebut, dapat dikatakan bahwa kategori Desa Swadaya tergolong desa tertinggal. Dalam upaya pengembangannya, Desa Swadaya dikembangkan menjadi Desa Swakarya, dan berikutnya menjadi Desa Swasembada. Dengan mengacu pada kategori-kategori tingkat perkembangan desa tersebut, pembangunan desa tertinggal dapat diartikan sebagai pembangunan terhadap Desa-desi Swadaya.

Tampak terdapat dua macam kebijakan yang selalu terkait dengan pembangunan Desa Tertinggal di Indonesia, yaitu kebijakan pembangunan pengentasan atau penanggulangan kemiskinan dan kebijakan pembangunan sarana-prasarana. Inpres Desa Tertinggal atau Inpres No. 5 Tahun 1993 ditopang oleh Peta Desa-desi Miskin atau tepatnya Peta Desa-desi Tertinggal yang teridentifikasi berdasarkan tipologi yang dibuat BPS. Variabel-variabel yang digunakan untuk pembuatan tipologi ini terdiri dari; tipe LKMD, jalan utama desa, potensi desa, rata-rata tanah pertanian yang diusahakan per rumah tangga, jarak dari desa, kelurahan ke ibu kota kecamatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang tinggal di desa, sarana komunikasi, pasar, kepadatan penduduk, sumber air minum, wabah penyakit, bahan bakar, pembuangan sampah, jamban, penerangan, tempat ibadah, tingkat kelahiran kasar, tingkat kematian kasar, *enrollment ratio*, persentase rumah tangga pertanian, rata-rata banyaknya ternak per rumah tangga, persentase rumah tangga yang mempunyai TV, persentase rumah tangga yang memiliki telepon, angkutan penduduk, dan fasilitas dan kelembagaan sosial budaya.



Desa-deserta Tertinggal merupakan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Program Inpres Desa Tertinggal (dikenal dengan program IDT) adalah program peningkatan kesejahteraan penduduk yang tinggal di desa tertinggal (Mubyarto, 1997). Pelaksanaan program IDT mencakup lima aspek berikut (Summase, 1999):

1. Pengembangan sumber daya manusia.
2. Penciptaan peluang bekerja dan berusaha.
3. Penyediaan modal kerja, Rp.20 juta untuk setiap desa.
4. Pengembangan kelembagaan penduduk miskin.
5. Sistem pelayanan kepada penduduk yang sederhana tetapi efisien.

Dalam perkembangannya, pembangunan Desa Tertinggal berada di bawah koordinasi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan menggunakan sejumlah variabel Data Potensi Desa Tahun 2005, Kementerian ini melakukan penetapan Desa Tertinggal di seluruh Indonesia. Variabel-variabel yang digunakan adalah: lapangan usaha mayoritas penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana komunikasi, kepadatan penduduk, sumber air minum/masak, sumber bahan bakar, cara buang sampah, jenis jamban, persentase rumahtangga pengguna listrik, tenaga kesehatan, persentase rumahtangga pertanian, keadaan sosial ekonomi penduduk, kemudahan mencapai Puskesmas/fasilitas kesehatan lain, kemudahan ke pasar permanen, dan kemudahan mencapai pertokoan. Klasifikasi desa yang ditetapkan terdiri dari: Sangat Tertinggal, Tertinggal, Maju, dan Sangat Maju. Dari hasil penetapan yang dilakukan, terdapat 2 745 Desa Sangat Tertinggal dan 29 634 Desa Tertinggal. Dari 32 379 Desa Tertinggal (termasuk Sangat Tertinggal), 10 283 Desa (31,76 %) terdapat di Jawa-Bali, lainnya 22 096 Desa (68,24 %) berada di luar Jawa-Bali. Sedangkan yang terdapat di Daerah Tertinggal adalah sebanyak 17 649 Desa (54,51 %).

## **III. METODOLOGI**

### **3.1. Tahapan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu: (1) pendekatan deduktif, dan (2) pendekatan induktif (empiris). Pendekatan deduktif dimulai dengan mengkaji kerangka berpikir logis-teoritis tentang berbagai bentuk tipologi wilayah perdesaan, yang kemudian hasilnya digunakan untuk menetapkan tipologi wilayah perdesaan di Indonesia. Sebaliknya, pendekatan induktif (empiris) dimulai dengan mengkaji data-data empiris yang ada tentang wilayah perdesaan di Indonesia, yang selanjutnya hasilnya juga digunakan untuk menetapkan tipologi wilayah perdesaan di Indonesia. Kedua pendekatan ini akan saling melengkapi untuk dapat menghasilkan tipologi wilayah perdesaan yang lebih valid.

#### **3.1.1. Pendekatan Deduktif**

Dalam pendekatan deduktif, akan dilakukan studi terhadap literatur-literatur yang terkait dengan konsep, teori maupun isu-isu permasalahan yang umum dijumpai di wilayah perdesaan. Beberapa konsep dan teori akan mencakup misalnya karakteristik desa pantai, desa pengunungan, desa hutan, desa perbatasan dan sebagainya. Sementara beberapa isu permasalahan yang berkembang akan mencakup misalnya ketimpangan desa-kota, Jawa-luar Jawa, KBI-KTI dan sebagainya. Selain itu akan dikaji pula penentuan beberapa kelompok (kluster) kawasan tertinggal dan terpencil yang telah dikemukakan oleh Kementerian Daerah Tertinggal seperti : (1) Kelompok kawasan tertinggal dan terpencil disebabkan SDM yang rendah, tetapi memiliki SDA yang besar; (2) Kelompok kawasan tertinggal dan terpencil yang memiliki SDA dan SDM yang rendah; (3) Kelompok kawasan tertinggal dan terpencil yang disebabkan aspek penetapan kawasan sebagai kawasan lindung; (4) Kelompok kawasan tertinggal dan terpencil karena buruknya kondisi aksesibilitas; (5) Kelompok kawasan tertinggal dan terpencil karena faktor gangguan keamanan, dll. Berbagai faktor tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan pentipologian wilayah perdesaan.

Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Mengacu pada hal tersebut maka tipologi dan perkembangan desa perlu disusun dengan memperhatikan faktor-faktor penciri keberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat tersebut dapat dilihat melalui aspek :

1. Peningkatan keswadayaan masyarakat.
2. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya output dan indikator dari keberdayaan masyarakat desa dapat dirinci sbb:

No	Aspek	Output	Indikator
1	Peningkatan keswadayaan masyarakat	Pembentukan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat)	a. Jumlah KPM per desa
		Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus LKMD atau KPM	a. Prosentase kehadiran pengurus LKMD atau KPM dalam rapat b. Prosentase kunjungan KPM dalam pertemuan masyarakat c. Jumlah pelatihan pengurus

No	Aspek	Output	Indikator
			LKMD atau KPM
2.	Ketahanan sosial-budaya masyarakat	Penguatan kelembagaan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase kehadiran masyarakat dalam pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa</li> <li>b. Prosentase kehadiran masyarakat dalam penyusunan program</li> <li>c. Jumlah program yang diusulkan oleh kelompok masyarakat</li> </ul>
		Peningkatan motivasi, partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prestasi yang diraih dalam lomba desa</li> <li>b. Prosentase kelompok masyarakat yang aktif dalam lomba desa</li> <li>c. Jenis kegiatan yang diikuti kelompok masyarakat dalam lomba desa</li> <li>d. Prosentase masyarakat yang aktif dalam program peningkatan pendidikan</li> <li>e. Prosentase masyarakat yang aktif dalam program peningkatan kesehatan</li> <li>f. Prosentase dana yang berasal dari masyarakat dalam program pembangunan desa</li> </ul>
		Penguatan organisasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kelompok masyarakat yang aktif</li> <li>b. Jumlah pelatihan kelompok masyarakat</li> </ul>
		Penguatan sistem pendataan data dasar profil desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlibatan masyarakat dalam pendataan potensi desa</li> <li>b. Tersedianya pusat data potensi desa</li> <li>c. Tersedianya data potensi desa yang akurat</li> </ul>
		Pengembangan kemitraan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah stakeholders yang bekerjasama dalam program pembangunan desa</li> <li>b. Jumlah kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan stakeholders</li> </ul>

No	Aspek	Output	Indikator
			c. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan kemitraan
		Penguatan ketahanan keluarga	a. Terlaksananya 10 program pokok PKK b. Rutinitas kegiatan posyandu c. Prosentase keluarga yang aktif dalam PKK d. Prosentase keluarga yang aktif dalam posyandu
3.	Usaha ekonomi masyarakat	Penguatan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat	a. Jumlah usaha ekonomi produktif di masyarakat b. Jumlah pelatihan untuk usaha ekonomi produktif c. Jumlah sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha ekonomi produktif d. Jumlah dana kredit usaha yang diserap oleh usaha ekonomi produktif
		Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin	a. Tersedianya Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan b. Jumlah kasus yang terjadi dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BPM) c. Prosentase keluarga miskin d. Jumlah dana PKPS-BPM
		Penanggulangan pekerja anak	a. Prosentase pekerja anak b. Prosentase pekerja anak yang mendapatkan program pendidikan 9 tahun c. Jumlah pelatihan untuk pekerja anak
		Penguatan lembaga keuangan mikro perdesaan	a. Tersedianya lembaga keuangan mikro Perdesaan b. Jumlah pelatihan untuk pengurus LKMP c. Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam LKMP d. Jumlah dana yang dikelola LKMP
		Penguatan Komite Penanggulangan Kemiskinan	a. Jumlah pelatihan untuk pengurus KPM b. Prosentase kehadiran

No	Aspek	Output	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Tersedianya renstra</li> <li>d. Tersedianya data kondisi sosial ekonomi keluarga miskin</li> </ul>
		Penguatan pengelolaan dana pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berjalannya pemantauan penggunaan dana pembangunan desa</li> </ul>
		Peningkatan ketahanan pangan dan penguatan institusi pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Lembaga Lumbung Pangan</li> <li>b. Prosentase masyarakat yang terlibat dalam LLP</li> <li>c. Tersedianya pasar desa</li> <li>d. Jumlah pelatihan untuk pengelola pasar desa</li> </ul>
4.	Pemanfaatan sumber daya alam	Pengembangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase dana PPK (Program pengembangan kecamatan) yang digunakan untuk pembangunan fisik</li> <li>b. Prosentase usulan dari masyarakat yang diterima program</li> <li>c. Prosentase kehadiran masyarakat dalam penyusunan program</li> <li>d. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program</li> </ul>
		Pegembangan prasarana perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dana untuk pengembangan prasarana Perdesaan</li> <li>b. Jumlah kegiatan pengembangan prasarana Perdesaan</li> <li>c. Prosentase masyarakat yang menggunakan prasarana yang dibangun</li> </ul>
		Pengembangan informasi teknologi perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya pos pelayanan teknologi perdesaan</li> <li>b. Prosentase masyarakat yang memanfaatkan pos pelayanan teknologi perdesaan</li> </ul>

### **3.1.2. Pendekatan Induktif**

Sementara pada pendekatan induktif, akan dilakukan identifikasi data-data empirik yang diperlukan yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menentukan tipologi wilayah. Data-data ini bisa mencakup data primer maupun sekunder yang tersedia di berbagai instansi. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif.

Pada tahap selanjutnya data-data empirik yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik analisis statistik. Data-data ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai data ini kemudian dianalisis dengan teknik clustering untuk menghasilkan gerombol desa-desa berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Hasil cluster ini akan dijadikan acuan untuk menentukan tipologi dari wilayah perdesaan yang dinalisis.

Pada tahap akhir, hasil dari pendekatan deduktif dan induktif akan dielaborasi untuk memperoleh tipologi wilayah perdesaan yang lebih valid dan akurat. Selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif-logis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah yang sesuai untuk tiap tipologi. Dalam perumusan ini berbagai pengalaman dan hasil penelitian yang terkait akan dapat menjadi masukan berharga dalam perumusan kebijakan.

### **3.2. Data dan Sumber Data**

Pengumpulan data untuk melengkapi dan menyempurnakan data Podes yang sudah ada, serta untuk mendapatkan tambahan variabel yang dianggap penting dalam penyusunan tipologi perdesaan dalam rangka pengembangan keberdayaan masyarakat di daerah perbatasan, dilakukan baik melalui pengumpulan data primer berupa kegiatan wawancara, dan melalui data sekunder dari laporan dinas ataupun laporan kegiatan yang dilakukan sebelumnya oleh pihak terkait.

Data primer mencakup: pendataan penduduk, pentipologian perdesaan, kriteria tata-pamong desa dan karakteristik dukungan komunitas. Kriteria tata-pamong desa terdiri dari: kapasitas kelembagaan yang ada di desa, proses pengambilan keputusan oleh pemerintah desa, dan partisipasi komunitas. Sedangkan karakteristik dukungan komunitas terdiri dari: karakteristik kepala desa, dan karakteristik sosialbudaya komunitas. Pengumpulan data tentang informasi proses pendataan penduduk dan aspirasi terhadap pentipologian

perdesaan dilakukan dengan wawancara pada staf pelaksana dinas terkait di tingkat kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Sosial, dan BAPPEDA, serta BPS tingkat kabupaten. Pengumpulan data kriteria pamong desa dan karakteristik dukungan komunitas dilakukan dengan wawancara pada: kepala atau sekretaris desa, kepala dusun, ketua LPM atau BPD, tokoh masyarakat, aktivis (penggerak) desa, fasilitator (petugas lapang maupun kader) desa, pengurus kelembagaan desa.

Data sekunder mencakup: tingkat kemiskinan komunitas desa dan tingkat intervensi pihak luar desa terhadap komunitas desa. Tingkat kemiskinan komunitas desa terdiri dari: tingkat kemiskinan keluarga (data Pra KS dan KS I), pendapatan usaha tingkat rumahtangga (usaha tani, industri rumahtangga), pendapatan (omzet, asset) industri besar yang ada di desa. Sedangkan tingkat intervensi pihak luar desa terhadap komunitas desa terdiri dari: jumlah dan jenis intervensi, besar (nilai) dana intervensi, dana swadaya masyarakat, dan sasaran (target group) intervensi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara dengan staf yang berkompeten di Dinas terkait di tingkat lokal (desa.kecamatan/kabupaten), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas perikanan dan Kelautan, Dinas pemberdayaan Masyarakat, dan BPS tingkat kabupaten. Sumber data sekunder lain adalah dari dokumentasi hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi lain dan hasil laporan evaluasi program pengembangan masyarakat yang dilakukan pihak terkait.

## JENIS DATA DAN SUMBER INFORMASI

Jenis Data	Sumber Informasi				
	Dinas Terkait Tingkat Kabupaten	Kepala atau Sekretaris Desa	Tokoh Masyarakat (termasuk ketua LPM, ketua BPD)	Fasilitator (kader-kader desa dan petugas lapang dinas terkait)	Data sekunder
I. Pendataan Kependudukan	X	X			X
II. Pentipologian Desa	X				X



Jenis Data	Sumber Informasi				
	Dinas Terkait Tingkat Kabupaten	Kepala atau Sekretaris Desa	Tokoh Masyarakat (termasuk ketua LPM, ketua BPD)	Fasilitator (kader-kader desa dan petugas lapang dinas terkait)	Data sekunder
<b>III. Kriteria Tata Pamong Desa</b>					
1. Kapasitas kelembagaan desa		X	X	X	
2. Proses pengambilan keputusan pemerintah desa		X	X		
3. Partisipasi komunitas			X	X	
<b>IV. Karakteristik Dukungan Komunitas</b>					
4. Karakteristik kepala desa: pendidikan, cara pemilihan kepala desa, pendapat tentang ketidakberdayaan komunitas desa		X	X		
5. Karakteristik sosial budaya komunitas: bentuk teknik produksi, orientasi usaha, integrasi horizontal dan integrasi vertikal		X	X		
<b>V. Tingkat Kemiskinan Komunitas Desa</b>					
6. Tingkat kemiskinan keluarga	X			X	X
7. Tingkat pendapatan usaha rumah tangga	X			X	X
8. Tingkat pendapatan (omzet, asset) industri besar	X				X
9. Jumlah dan Jenis Intervensi	X			X	X
10. Besar (nilai) dana intervensi	X			X	X
11. Dana swadaya masyarakat	X			X	X
12. Sasaran (target group) intervensi	X			X	X

### **3.3. Pendekatan Pentipologian Deduktif**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa dibarengi dengan pemerataan pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan. Hal ini terbukti pada daerah-daerah dengan industri berkembang telah menunjukkan kemajuan ekonomi masyarakatnya sementara di daerah-daerah perbatasan dimana industri relatif belum berkembang masyarakatnya masih jauh tertinggal dan menimbulkan kesenjangan sosial serta kemiskinan struktural yang makin tinggi antar daerah.

Masalah kemiskinan di suatu daerah apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan disintegrasi sosial, seiring dengan bertambahnya penduduk yang makin menekan kapasitas daya dukung sumberdaya alam yang ada. Hal ini juga terjadi di daerah-daerah perbatasan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang relatif melimpah ternyata belum berhasil mensejahterakan masyarakatnya. Ketidakseimbangan antara eksploitasi sumberdaya alam dan pembagian manfaat pembangunan bagi masyarakat suatu daerah cenderung akan menimbulkan krisis ekonomi maupun krisis sosial budaya.

Dalam konteks seperti itulah maka dibutuhkan suatu pengelolaan dan pengorganisasian masyarakat yang mampu membawa pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan bagi lingkungannya (alam maupun manusia), dengan menciptakan kelembagaan-kelembagaan, teknologi dan perkembangan ekonomi lokal dengan berbasiskan pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.

Oleh sebab itu, seiring bergulirnya otonomi daerah, maka diperlukan suatu upaya untuk mendorong daerah-daerah perbatasan agar mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan masyarakatnya agar lebih berdaya. Pentipologian perdesaan di daerah perbatasan kemudian menjadi penting agar pemerintah daerah setempat dapat menentukan kebijakan yang akan dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah perbatasan kemudian dengan menggunakan analisa tipologi perdesaan dapat menentukan tipe pengembangan yang dapat dilakukan untuk setiap desa di daerah perbatasan. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi tipe pengembangan suatu wilayah (perdesaan) khususnya dalam kerangka keberdayaan masyarakatnya, yaitu (berdasarkan data PODES tahun 2005):

- 1) Faktor demografi, mencakup: jumlah penduduk, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, rasio jenis kelamin, jumlah keluarga, ukuran keluarga, kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, persentase jumlah penduduk yang meninggal akibat penyakit muntaber/ ISPA/ malaria selama setahun terakhir, dan jumlah buruh tani.
- 2) Faktor ekonomi, mencakup: potensi ekonomi desa/kelurahan yang menonjol dan yang sudah diberdayakan, persentase keluarga pertanian, sumber utama penghasilan penduduk, sumber penghasilan utama pertanian, pemanfaatan hasil tanaman pangan atau perkebunan, produk unggulan, rata-rata pemilikan lahan pertanian sawah, rata-rata pemilikan lahan non pertanian sawah, pola penggunaan lahan pertanian sawah, pola penggunaan lahan non pertanian sawah, pola penggunaan lahan non pertanian, luas lahan pertanian yang tidak diusahakan, kawasan sentra industri lingkungan atau perkampungan industri kecil, jumlah industri sedang, kecil dan rumah tangga, fasilitas perdagangan, lembaga keuangan formal.
- 3) Faktor sosialbudaya, mencakup: persentase jumlah keluarga pra KS dan KS I, persentase jumlah keluarga tidak menggunakan listrik PLN dan listrik non PLN, persentase jumlah keluarga di pemukiman kumuh, persentase jumlah keluarga yang menerima kartu sehat/kartu peserta program jaminan kesehatan, pendidikan tertinggi ditamatkan kepala desa, keberadaan kelembagaan komunitas, kasus/masalah lingkungan sosial yang terjadi setahun terakhir.
- 4) Faktor sumberdaya alam dan infrastruktur, mencakup: kasus/masalah lingkungan buatan yang terjadi setahun terakhir, kasus/masalah lingkungan alam yang terjadi 3 tahun terakhir, bahan bakar yang digunakan sebagian besar keluarga untuk memasak, tempat buang air besar sebagian besar keluarga, jenis permukaan jalan terluas, alat transportasi utama.

Selain berdasarkan data sekunder yang bersumber dari PODES tahun 2005, maka pentipologian perdesaan perlu dilakukan juga dengan menggali aspirasi dari stakeholders terkait di tingkat kabupaten maupun desa tentang pentipologian perdesaan dan prioritas pengembangan di daerah perbatasan. Beragam aspek yang dikaji mencakup: pendataan kependudukan, pentipologian perdesaan, kriteria tata pamong desa, karakteristik dukungan

komunitas, tingkat kemiskinan komunitas desa, dan intervensi pihak-pihak luar desa (program-program pembangunan).

### 3.4. Teknik Analisis Pentipologian Induktif

Pendekatan induktif dilakukan dengan mengidentifikasi data empirik yang diperlukan yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menentukan tipologi wilayah, yaitu data Potensi Desa dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini mencakup data kuantitatif maupun data kualitatif.

Pada tahap selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisis statistik, yaitu dengan Two Step Cluster (Penggerombolan Dua Tahap) Teknik ini merupakan teknik analisis peubah ganda (multivariate analysis) yang dapat mengatasi masalah skala pengukuran yang tidak sama (tipe kontinu dan kategorik), sehingga dapat menganalisis data kuantitatif (tipe data kontinu) maupun data kualitatif (tipe data kategorik) secara bersamaan.

Teknik Two Step Cluster melakukan penggerombolan objek-objek berdasarkan karakteristik variabel-variabelnya, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Jarak antar dua kelompok didefinisikan sebagai jarak antar pusat dari masing-masing kelompok tersebut. Pusat dari suatu kelompok adalah vektor dari rata-rata masing-masing variabelnya. Jarak yang digunakan dalam teknik Two Step Cluster adalah jarak Log-Likelihood dan jarak Euclidean.

Jarak Euclidean paling sering digunakan hampir diberbagai teknik analisis gerombol (cluster analysis), tetapi hanya dapat digunakan apabila semua variabel bertipe kontinu. Jarak Euclidean antara dua kelompok ke-i dan kelompok ke-j dari p variabel didefinisikan sebagai berikut:

$$d(i, j) = \left[ \sum_{k=1}^p (\bar{X}_{ik} - \bar{X}_{jk})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

di mana:

$d(i,j)$  = jarak antara kelompok ke-i dan kelompok ke-j

$\bar{X}_{ik}$  = nilai tengah (rata-rata) untuk variabel k pada kelompok ke-i

$\bar{X}_{jk}$  = nilai tengah (rata-rata) untuk variabel k pada kelompok ke-j

p = banyaknya variabel.

Jarak Log-Likelihood dapat digunakan untuk variabel kontinu maupun kategorik. Jarak antara dua kelompok ke-i dan kelompok ke-j didefinisikan sebagai berikut:

$$d(i, j) = \xi_i + \xi_j - \xi_{\langle i, j \rangle}$$

di mana:

$d(i, j)$  = jarak antara kelompok ke-i dan kelompok ke-j

$$\xi_i = -N \left( \sum_{k=1}^{K^A} \frac{1}{2} \log(\hat{\sigma}_k^2 + \hat{\sigma}_{jk}^2) + \sum_{k=1}^{K^B} \hat{E}_{jk} \right)$$

$$\hat{E}_{jk} = - \sum_{l=1}^{L_k} \frac{N_{jkl}}{N_{\dots}} \log \frac{N_{jkl}}{N_j}$$

$N_{\dots}$  = jumlah data

$N_{jkl}$  = jumlah data pada kelompok ke-j untuk peubah kategorik ke-k dengan kategorik ke-l

$\hat{\sigma}_{jk}^2$  = ragam dugaan untuk peubah kontinu ke-k pada kelompok ke-j

$K^A$  = jumlah peubah kontinu

$K^B$  = jumlah peubah kategorik

$L_k$  = jumlah kategori untuk variabel kategorik ke-k

$\langle i, j \rangle$  = indeks kombinasi kelompok ke-i dan ke-j.

Prosedur penggerombolan objek dalam teknik Two Step Cluster dilakukan melalui dua tahapan (SPSS 2004; Bacher et al, 2004), yaitu tahap penggerombolan awal dan tahap pembentukan gerombol optimal.

#### Tahap 1: Penggerombolan Awal

Tahapan ini bertujuan untuk meminimalisasi jumlah objek. Pada tahap ini data diamati secara acak, dan kemudian berdasarkan jarak tertentu, data tersebut ditentukan apakah dapat digabungkan dengan kelompok sebelumnya atau membentuk kelompok baru. Proses penggerombolan dilakukan dengan penyisipan (inserting) dan pembentukan kembali (rebuilding). Pada tahap penyisipan, satu objek dipilih secara acak dan kemudian diukur jaraknya dengan objek lainnya. Jika jarak tersebut kurang dari jarak maksimum, maka objek itu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Tetapi jika jarak tersebut melebihi

jarak maksimum, maka objek tersebut dianggap pencilan. Demikian seterusnya untuk objek-objek lainnya. Pada tahapan rebuilding, pencilan akan membentuk kelompok baru. Batas jarak maksimum ditingkatkan agar lebih banyak objek yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok baru. Peningkatan jarak ini dapat mengakibatkan objek-objek yang berasal dari kelompok yang berbeda bergabung menjadi satu kelompok.

#### Tahap 2: Pembentukan Gerombol Optimal

Suatu kelompok objek dikatakan optimal jika memiliki jarak antar kelompok paling jauh dan jarak antar objek dalam kelompok paling dekat. Semakin dekat jarak antar objek, semakin besar kemiripan antar objek dan satu kelompok. Penggerombolan menggunakan analisis gerombol berhierarki dengan metode penggabungan.

Penentuan jumlah gerombol optimal berdasarkan kriteria BIC (Bayesian Information Criterion) atau AIC (Akaike's Information Criterion) untuk setiap gerombol, dan peningkatan jarak terbesar antara dua gerombol terdekat. Tetapi dalam beberapa kasus jumlah gerombol terbaik ditentukan berdasarkan rasio perubahan BIC dan rasio perubahan jarak yang besar.

### **3.5. Pendekatan Pentipologian Terpadu Desa-Desa Perbatasan Tertinggal**

Pentipologian terpadu ini dilakukan dengan menggabungkan hasil pentipologian dengan pendekatan induktif dan hasil pentipologian dengan pendekatan deduktif. Pada tahap awal akan dibuat struktur matriks yang mampu menggambarkan pentipologian wilayah perdesaan berdasarkan isu dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah perdesaan. Secara paralel juga akan disusun struktur matriks yang mampu menggambarkan pentipologian wilayah perdesaan berdasarkan data-data empiris.

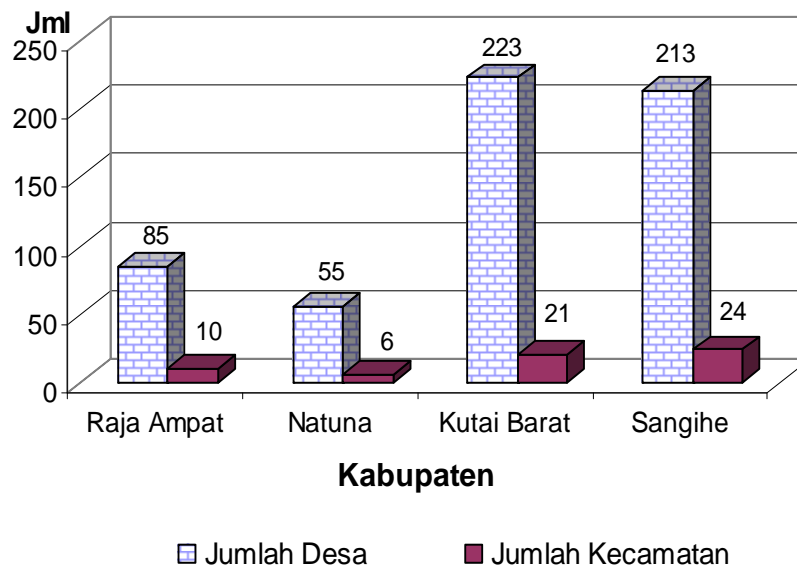
Kedua matriks tersebut kemudian digabungkan ke dalam struktur matriks gabungan untuk dilakukan reclustering berdasarkan kedua jenis pentipologian berbasis pendekatan induktif dan deduktif. Struktur matriks gabungan ini diharapkan dapat memetakan secara lebih detail dan mendalam tipologi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan struktur matriks gabungan tersebut kemudian disusun strategi pembangunan yang tepat untuk masing-masing tipologi wilayah.

## IV. KAJIAN UMUM TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI INDONESIA

### 4.1. Gambaran Umum Desa-desa di Kabupaten Perbatasan yang Dikaji

#### 4.1.1. Kondisi Geografis

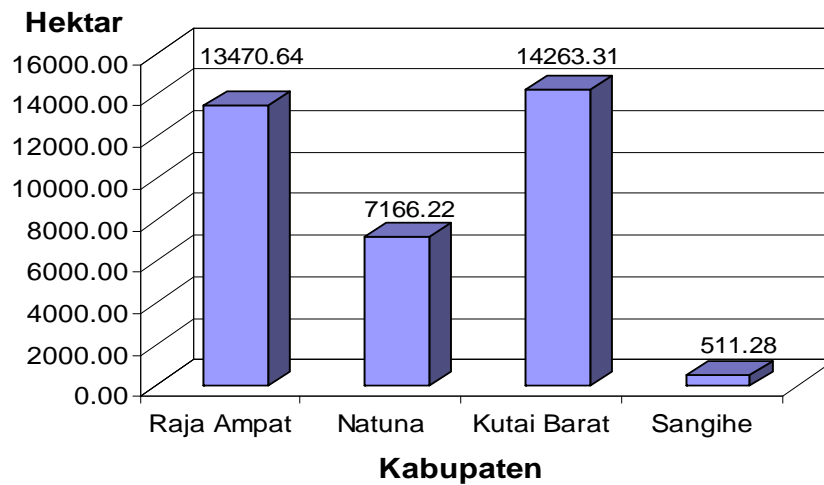
Jumlah desa di empat kabupaten yang dikaji seluruhnya sebanyak 576 desa yang tersebar pada 61 kecamatan. Kabupaten Kutai Barat dan Sangihe memiliki jumlah desa maupun kecamatan jauh lebih banyak dibandingkan dua kabupaten lainnya (Gambar 4.1). Total desa di Kabupaten Kutai Barat dan Sangihe masing-masing sebanyak 223 desa dan 213 desa, sementara di Kabupaten Raja Ampat sebanyak 85 desa dan paling sedikit di Natuna hanya sebanyak 55 desa. Semua desa-desa pada keempat kabupaten yang diteliti termasuk kriteria Perdesaan (rural). Tingkat pendidikan kepala desa pada umumnya minimal SD dan tertinggi hanya sampai SLTA.



**Gambar 4.1.** Jumlah Desa dan Kecamatan di Empat Kabupaten

Kutai Barat merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak (223 desa) dan terluas (sekitar 3,18 juta hektar) karena rata-rata luas desa di kabupaten tersebut tertinggi (14.263 hektar per desa) dibanding desa-desa di tiga kabupaten lainnya (Gambar 4.2).

Tidak demikian halnya dengan Kabupaten Sangihe, meskipun jumlah desanya menempati urutan kedua terbanyak (213 desa), namun rata-rata luas per desa sangat sempit yaitu hanya sekitar 511 hektar per desa. Sehingga luas wilayah Kabupaten Sangihe merupakan yang paling sempit. Seperti di Kabupaten Kutai Barat, desa-desa di Kabupaten Raja Ampat juga cukup luas yaitu sekitar 13.471 hektar per desa. Sehingga walaupun jumlah desanya sedikit tetapi total luas wilayah kabupaten (sekitar 1,15 juta hektar) menempati urutan kedua setelah Kutai Barat.

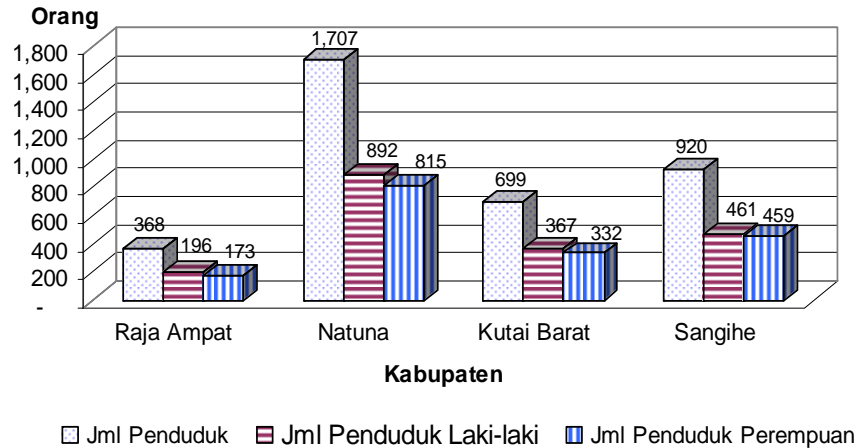


**Gambar 4.2.** Rata-rata Luas Desa di Empat Kabupaten

#### 4.1.2. Kondisi Demografi

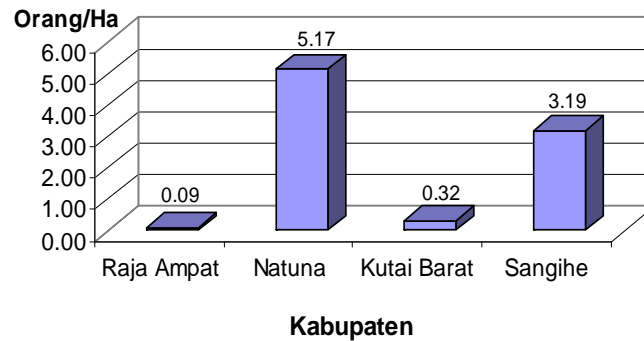
Rata-rata jumlah penduduk per desa di Kabupaten Natuna terbanyak, disusul desa-desa di Kabupaten Sangihe, Kutai Barat dan Raja Ampat (Gambar 4.3). Penduduk di Kabupaten Natuna mencapai lima kali lipat penduduk di Kabupaten Raja Ampat. Apabila dibandingkan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di desa-desa di empat kabupaten sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.





**Gambar 4.3.** Rata-rata Jumlah Penduduk per Desa menurut Jenis Kelamin di Empat Kabupaten

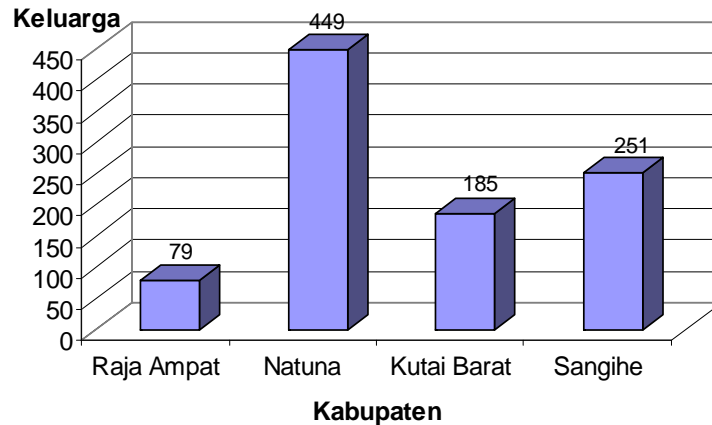
Konsekuensi dari penduduk yang terbanyak sementara luas areal tersempit, maka kepadatan geografis Kabupaten Natuna tertinggi mencapai 5,17 orang per hektar. Desa-desanya di Kabupaten Sangihe memiliki kepadatan geografis relatif tinggi sebesar 3,19 orang per hektar. Sementara desa-desa di Kabupaten Raja Ampat dan Kutai Barat memiliki kepadatan geografis yang sangat kecil bahkan kurang dari 1 orang per hektar (Gambar 4.4)



**Gambar 4.4.** Rata-rata Kepadatan Geografis per Desa di Empat Kabupaten

Tidak hanya terpadat penduduknya, Natuna juga merupakan Kabupaten terbanyak jumlah keluarga yaitu mencapai 449 keluarga. Sementara di Kabupaten Raja Ampat rata-rata jumlah keluarga per desa paling sedikit yaitu hanya 79 keluarga per desa. Namun demikian apabila dilihat dari ukuran keluarga, maka Kabupaten Raja Ampat menduduki

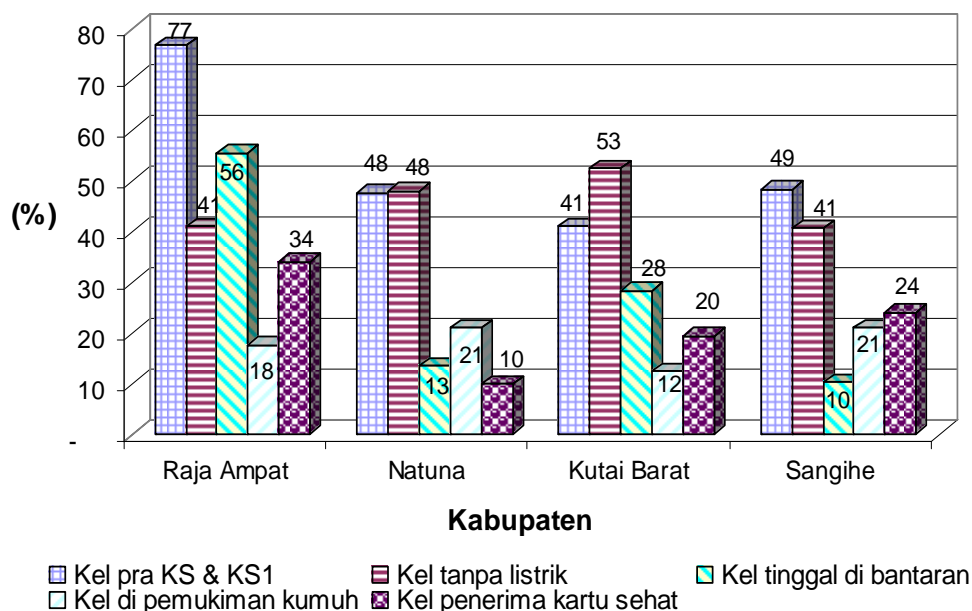
urutan pertama dengan lima orang per keluarga. Sedangkan ukuran keluarga di desa-desa lainnya di tiga kabupaten hanya empat orang per keluarga (Gambar 4.5).



**Gambar 4.5.** Rata-rata Jumlah Keluarga per Desa di Empat Kabupaten

#### 4.1.3 Kondisi Sosial Masyarakat

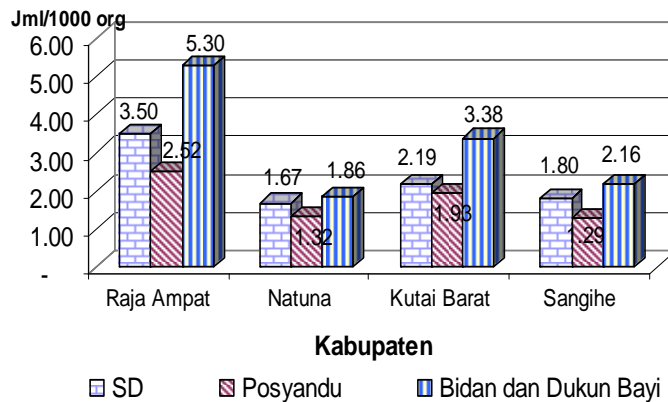
Berdasarkan dari beberapa indikator demografi dan geografis menunjukkan bahwa Kabupaten Natuna merupakan kabupaten terpadat penduduknya. Tekanan penduduk yang cukup besar bisa mengakibatkan terjadinya gangguan dalam kehidupan di masyarakat, salah satunya dipicu oleh tingginya persentase penduduk miskin. Namun demikian, kecenderungan bahwa kemiskinan akan lebih mungkin terjadi pada daerah yang berpenduduk padat ternyata tidak terbukti di empat kabupaten yang dikaji. Apabila memakai indikator persentase jumlah keluarga pra KS dan KS1 sebagai gambaran kemiskinan, ternyata desa-desa yang penduduknya kurang padat seperti desa-desa di Kabupaten Raja Ampat justru persentase penduduk miskinnya lebih banyak dibandingkan desa-desa di kabupaten lainnya. Persentase jumlah keluarga yang menerima/menggunakan kartu sehat di desa-desa di Kabupaten Raja Ampat juga lebih banyak, justru semakin memperkuat bahwa persentase penduduk miskinnya lebih banyak (Gambar 4.6). Demikian halnya persentase keluarga yang tinggal di bantara sungai di Desa-desa di Kabupaten Raja Ampat masih tinggi yaitu mencapai 56 persen, sementara di kabupaten lain kurang dari 20 persen.



**Gambar 4.6.** Persentase Keluarga menurut Kondisi Kesejahteraan, Kesehatan, Tempat Tinggal, dan Penerangan di Desa-desa di Empat Kabupaten

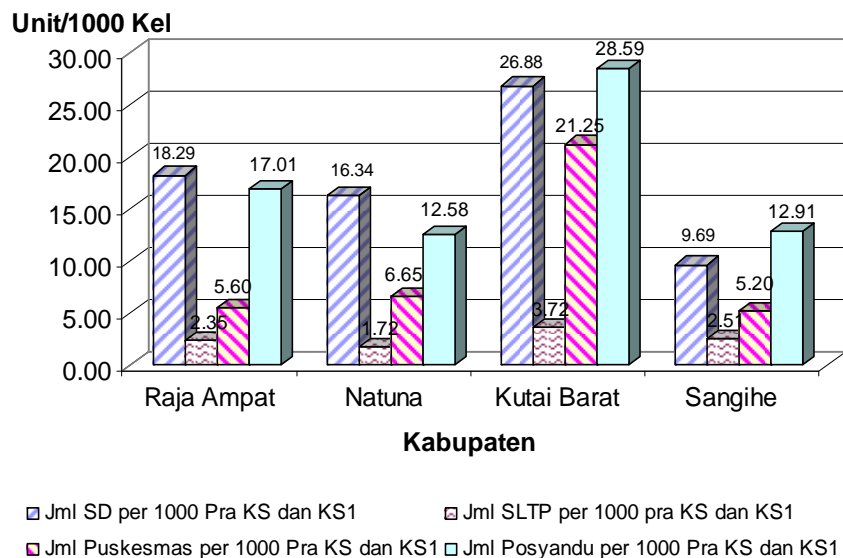
Kondisi kesejahteraan, kesehatan, dan pemukiman yang terjadi di desa-desa di Kabupaten Raja Ampat berkontradiksi dengan ketersediaan fasilitas seperti jumlah SD, posyandu, serta bidan dan dukun bayi. Ketiga jenis fasilitas tersebut di Kabupaten Raja Ampat justru lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya apabila dilihat dari rasio per 1000 penduduk (Gambar 4.7). Namun, jika ditelaah berdasarkan jumlah fasilitas per keluarga pra KS dan KS1 dapat dijelaskan bahwa persentase SLTP dan Puskesmas di Kabupaten Raja Ampat masih rendah (Gambar 4.8).

Fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa-desa kajian masih sangat minin. Rasio jumlah bidan/ dukun bayi justru cenderung lebih tinggi dibandingkan fasilitas pendidikan, yaitu berkisar antara 2-5 orang per seribu penduduk. Artinya setiap bidan/dukun bayi dapat melayani 200 sampai 500 penduduk. Bila dibandingkan antara empat kabupaten, maka fasilitas pendidikan maupun kesehatan di Kabupaten Raja Ampat relatif lebih baik dibandingkan pada kabupaten lain (Gambar 4.7).



**Gambar 4.7.** Rata-rata Rasio Jumlah SD, Posyandu serta Bidan dan Dukun Bayi per Desa di Empat Kabupaten

Namun jika rasionya berdasarkan jumlah penduduk yang pra KS dan KS1, maka rasio jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kutai Barat adalah yang tertinggi (Gambar 4.8). Setiap SD di Kabupaten Kutai Barat dapat melayani sekitar 30 keluarga pra KS dan KS1. Fasilitas pendidikan lanjutan (SLTP) di semua lokasi kajian masih sangat rendah dengan rasio tertinggi 3,72 atau setiap SLTP melayani sekitar 250 keluarga pra KS atau KS1.



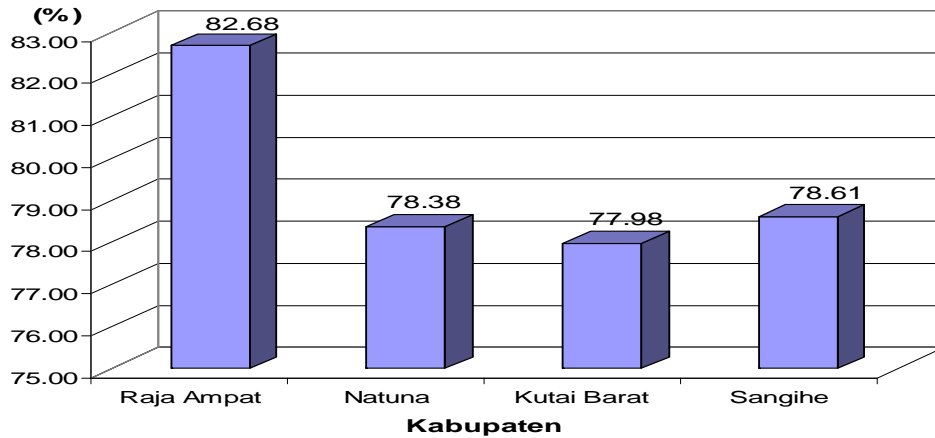
**Gambar 4.8.** Rata-rata Jumlah SD, SLTP, Puskesmas, dan Posyandu per Desa di Empat Kabupaten

Gambar 4.8 juga menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan berupa puskesmas secara umum masih rendah, rata-rata setiap puskesmas mampu melayani sekitar 200 – 300 keluarga pra KS atau KS1. Khusus Kabupaten Kutai Barat, rasio jumlah puskesmas dengan keluarga pra KS atau KS1 cukup tinggi yaitu setiap puskesmas mampu melayani sekitar 50 keluarga pra KS atau KS1. Selain jumlah puskesmas yang terbatas, masyarakat desa umumnya merasa sulit bahkan sangat sulit untuk menjangkau lokasi puskesmas.

Keadaan kehidupan masyarakat desa umumnya cukup baik jika dilihat dari ketersediaan kelembagaan komunitas desa. Demikian halnya, kasus atau masalah yang berhubungan dengan lingkungan sosial, alam maupun buatanya relatif jarang terjadi, kecuali di Kabupaten Kutai Barat dan Sangihe. Di Kutai Barat pernah terjadi masalah lingkungan alam maupun buatan, sedangkan di Kabupaten Sangihe terjadi masalah lingkungan alam dan sosial. Masalah lingkungan buatan seperti pencemaran udara, air dan tanah. Masalah lingkungan alam seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Sedangkan lingkungan sosial meliputi perkelahian massal, perampokan, penganiyaan, kekerasan, perkosaan, pengedaran narkoba, pembunuhan dan sebagainya.

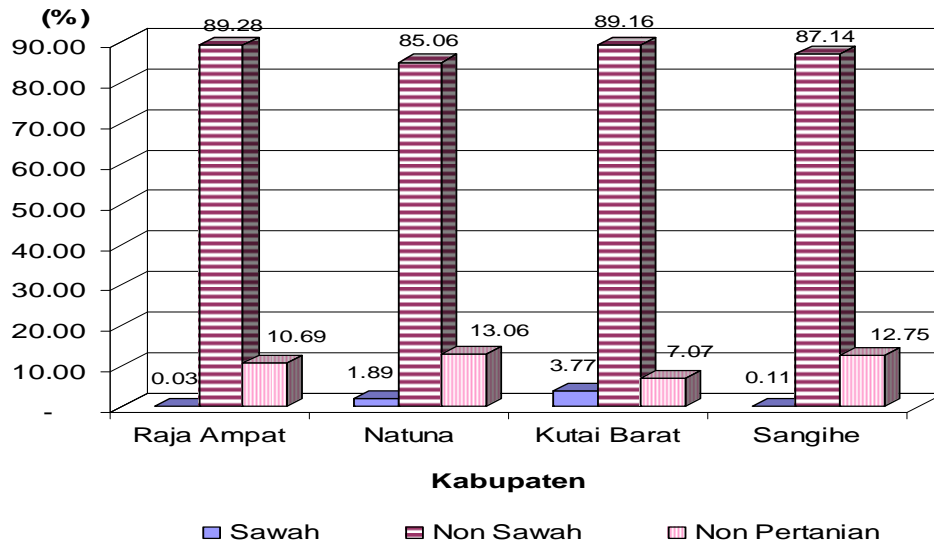
#### **4.1.4. Kondisi Ekonomi Masyarakat**

Potensi ekonomi desa yang menonjol dan sudah diberdayakan di semua kabupaten yang dikaji adalah sama yaitu sektor pertanian. Terlihat dari sebagian besar keluarga (lebih dari 75%) merupakan keluarga pertanian (Gambar 4.9). Bila dibanding dengan kabupaten lain, di Kabupaten Raja Ampat proporsi keluarga pertanian sangat dominan yaitu mencapai hampir 83 persen. Sementara itu kondisi sebaliknya terjadi bahwa persentase buruh tani sangat kecil yaitu tidak lebih dari 6 persen. Pada keempat kabupaten tersebut tidak ada perusahaan pertanian, artinya bentuk usaha pertanian umumnya perusahaan perorangan atau rakyat. Hal ini terlihat dari tidak adanya perusahaan pertanian di keempat kabupaten.



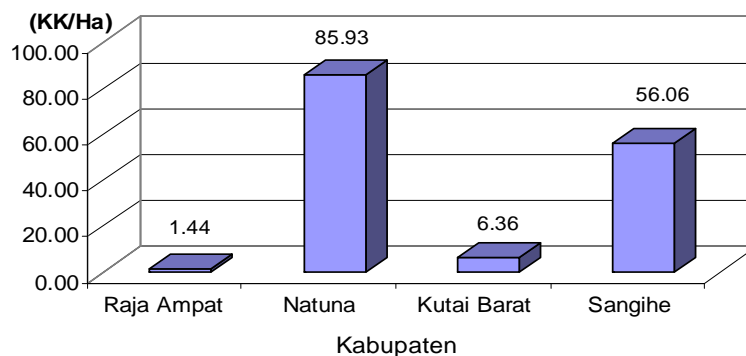
**Gambar 4.9.** Rata-rata Persentase Keluarga Pertanian per Desa di Empat Kabupaten

Pola penggunaan lahan sejalan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mayoritas penduduk. Sekitar 85 persen lahan digunakan sebagai lahan pertanian, baik lahan sawah maupun non sawah dan sisanya sekitar 15 persen digunakan untuk kegiatan usaha non pertanian (Gambar 4.10). Usaha pertanian yang dominan di keempat kabupaten adalah pertanian non sawah, hal ini terlihat dari persentase penggunaan lahan non sawah yang sangat dominan. Penggunaan lahan untuk sawah tidak lebih dari 3 persen, terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Lahan pertanian yang tidak diusahakan atau "lahan mati" di keempat kabupaten yang dikaji relatif sedikit yaitu kurang dari setengah hektar. Bahkan di Kabupaten Sangihe, lahan mati hampir tidak ada, artinya tingkat penggunaan lahan sangat tinggi. Diduga desa-desa yang terletak pada keempat kabupaten yang dikaji memang belum banyak "dijamah" oleh masyarakat luar desa atau luar kabupaten.



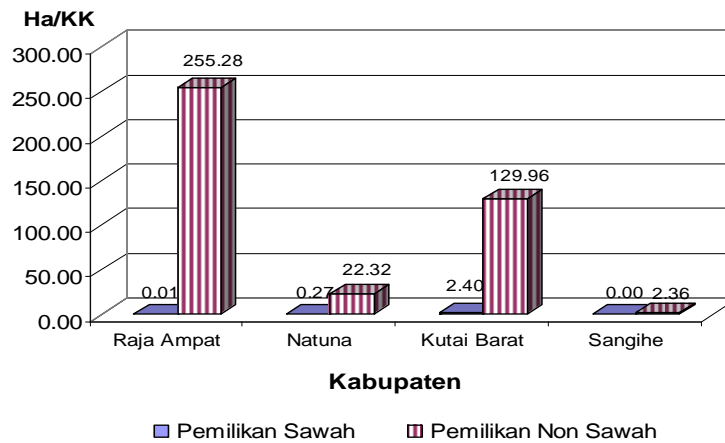
**Gambar 4.10.** Pola Penggunaan Lahan Pertanian dan Non Pertanian per Desa di Empat Kabupaten

Kepadatan agraris tertinggi terjadi di Kabupaten Natuna yaitu 86 KK/Ha, lalu diikuti Kabupaten Sangihe (56 KK/Ha) dan Kutai Barat (6 KK/Ha). Sedangkan kepadatan agraris di Kabupaten Raja Ampat hanya mencapai 1,44 Kel/ Ha artinya setiap satu hektar lahan pertanian hanya ditempati sekitar 1,44 keluarga petani (Gambar 4.11). Persentase keluarga pertanian di Kabupaten Raja Ampat lebih tinggi dibandingkan lainnya, namun kepadatan agrarisnya paling rendah. Artinya rata-rata kepemilikan lahan pertanian per keluarga masih cukup tinggi, seperti terlihat pada Gambar 4.12.



**Gambar 4.11.** Kepadatan Agraris per Desa di Empat Kabupaten

Sesuai dengan pola penggunaan lahan, maka rata-rata luas pemilikan lahan pertanian non sawah adalah yang lebih dominan di semua kabupaten. Luas pemilikan lahan pertanian non sawah di desa-desa di Kabupaten Raja Ampar mencapai 255 hektar per KK selanjutnya diikuti Kabupaten Kutai Barat dan Natuna (Gambar 4.12)



**Gambar 4.12.** Rata-rata Luas Pemilikan Sawah dan Non Sawah per Desa di Empat Kabupaten

Dukungan sarana penunjang sektor pertanian, seperti ketersediaan kios sarana produksi sangat rendah. Setiap kios sarana produksi melayani lebih dari seribu hektar lahan pertanian. Demikian halnya, pada desa-desa di empat kabupaten tersebut tidak tersedia lembaga keuangan formal, baik bank maupun non bank. Bahkan lembaga keuangan informal pun tidak tersedia. Sehingga tidak ada tersedia fasilitas kredit sebagai sumber permodalan bagi pengembangan usaha pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian desa dan masyarakat.

Sektor lain selain pertanian, seperti industri, dagang dan jasa, di keempat kabupaten tersebut kurang berkembang. Kecuali pada sektor pertanian, sub sektor yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat adalah tanaman perkebunan dan perikanan laut. Sub sektor yang berkembang di desa-desa di Kabupaten Kutai Barat yaitu tanaman pangan, perkebunan dan perikanan darat. Khusus untuk tanaman pangan dan perkebunan, produk yang dihasilkan seluruhnya berorientasi ke pasar yaitu untuk dijual. Hasil penjualan tersebut



baru dapat pakai untuk membeli berbagai kebutuhan hidup keluarga. Desa-desa pada keempat kabupaten tersebut belum memiliki komoditas unggulan.

#### 4.2. Tipologi Awal Terhadap Desa-desa Di Empat Kabupaten Lokasi Studi

Analisis gerombol dengan teknik Two Step Cluster dilakukan terhadap data sebanyak 576 desa dari empat kabupaten dalam empat propinsi, yaitu 213 desa di kabupaten Kepulauan Sangihe propinsi Sulawesi Utara, 85 desa di kabupaten Raja Ampat propinsi Papua, 223 desa di kabupaten Kutai Barat propinsi Kalimantan Timur, dan 55 desa di kabupaten Kepulauan Natuna propinsi Kepulauan Riau. Hasil pengerombolan tercantum pada Tabel 1, 2, 3, dan 4. Sebanyak 576 desa terbagi menjadi 3 gerombol seperti tercantum pada Tabel 3. Gerombol 1 terdiri dari 289 desa, gerombol 2 terdiri dari 282 desa, dan gerombol 3 yang terdiri dari 9 desa termasuk ekstrim dan terpisah dari kedua gerombol sebelumnya.

Penyebaran jumlah desa per kabupaten tercantum pada Tabel 2. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah desa yang termasuk gerombol 1 tersebar di Kepulauan Sangihe sebanyak 164 desa, di kabupaten Raja Ampat 1 desa, di kabupaten Kutai Barat 89 desa, dan di kabupaten Kepulauan Natuna 31 desa, sedangkan dalam gerombol 2 terdapat 45 desa di Kepulauan Sangihe, 83 desa di kabupaten Raja Ampat, 132 desa di kabupaten Kutai Barat, dan 22 desa di kabupaten Kepulauan Natuna. Nampaknya gerombol 1 didominasi oleh jumlah desa di Kepulauan Sangihe dan Kutai Barat, sedangkan gerombol dua oleh jumlah desa di Kutai Barat dan Raja Ampat. Pada umumnya desa-desa di Raja Ampat termasuk gerombol 2. Desa-desa di Kepulauan Natuna terbagi kurang lebih sama. Jumlah desa di Kepulauan Sangihe yang termasuk gerombol 1 lebih banyak daripada jumlah desa yang termasuk gerombol 2, sedangkan jumlah desa di Kutai Barat yang termasuk gerombol 1 lebih sedikit dari jumlah desa yang termasuk gerombol 2.

**Tabel 4.1.** Jumlah Desa Setiap Gerombol

Gerombol	Jumlah Desa	%
1	285	49.5
2	282	49.0
3*	9	1.6
Total desa	576	

Keterangan: \*) desa-desa diluar dua gerombol (1 dan 2)

**Tabel 4.2.** Jumlah Desa Setiap Propinsi dalam Setiap Gerombol

Propinsi	Kabupaten	Jumlah Desa
<u>Gerombol 1:</u>		
SULAWESI	KEPULAUAN	
UTARA	SANGIHE	164
PAPUA	RAJA AMPAT	1
KALIMATAN		
TIMUR	KUTAI BARAT	89
KEPULAUAN	KEPULAUAN	
RIAU	NATUNA	31
Subtotal gerombol 1		285
<u>Gerombol 2:</u>		
SULAWESI	KEPULAUAN	
UTARA	SANGIHE	45
PAPUA	RAJA AMPAT	83
KALIMATAN		
TIMUR	KUTAI BARAT	132
KEPULAUAN	KEPULAUAN	
RIAU	NATUNA	22
Subtotal gerombol 2		282
<u>Luar Gerombol:</u>		
SULAWESI	KEPULAUAN	
UTARA	SANGIHE	4
PAPUA	RAJA AMPAT	1
KALIMATAN		
TIMUR	KUTAI BARAT	2
KEPULAUAN	KEPULAUAN	
RIAU	NATUNA	2
Subtotal Luar gerombol		9
Total Desa		576

Penggerombolan tersebut dilakukan berdasarkan 26 variabel kuantitatif (pada Tabel 3) dan 9 variabel kualitatif (pada Tabel 4). Tabel 3 memberikan gambaran tentang profil masing-masing gerombol, dan beberapa variabel penting yang berpengaruh dalam penggerombolan. Variabel-variabel tersebut adalah Jumlah Penduduk, Ukuran Keluarga, Persentase Penduduk Perempuan, Kepadatan Penduduk Geografis, Rasio Jumlah SD terhadap Jumlah Penduduk, Rasio Jumlah Bidan dan Dukun Bayi Terhadap Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Keluarga pra KS dan KS I, Jumlah Buruh Tani, Rata-rata Pemilikan Lahan Pert Non Sawah, Luas Lahan Pertanian yg tidak diusahakan, dan Fasilitas Jasa Bengkel atau reparasi kendaraan bermotor/ alat-alat elektronik/ Usaha foto kopi.

Variabel-variabel tersebut dapat juga dikatakan sebagai penciri dari setiap gerombol. Gerombol 1 dicirikan dengan rata-rata Jumlah Penduduk (1,059.1) yang lebih besar daripada Jumlah Penduduk (534.6), Ukuran Keluarga (3.7) yang lebih kecil daripada Ukuran Keluarga (4.1), Persentase Penduduk Perempuan (49.3%) yang hampir sama dengan Persentase Penduduk Perempuan (47.2%), Kepadatan Penduduk Geografis (3.1) yang lebih besar daripada Kepadatan Penduduk Geografis (0.4), Rasio Jumlah SD terhadap Jumlah Penduduk (0.0016) yang lebih kecil daripada Rasio Jumlah SD terhadap Jumlah Penduduk (0.0028), Rasio Jumlah Bidan dan Dukun Bayi Terhadap Jumlah Penduduk (0.0020) yang lebih kecil daripada Rasio Jumlah Bidan dan Dukun Bayi Terhadap Jumlah Penduduk (0.0044), Persentase Jumlah Keluarga pra KS dan KS I (39.3) yang lebih kecil daripada Persentase Jumlah Keluarga pra KS dan KS I (60.4), Jumlah Buruh Tani (8.3%) yang lebih besar daripada Jumlah Buruh Tani (2.5%), Rata-rata Pemilikan Lahan Pert Non Sawah (16.77) yang lebih kecil daripada Rata-rata Pemilikan Lahan Pert Non Sawah (167.81), Luas Lahan Pertanian yg tidak diusahakan (0.12) yang lebih kecil daripada Luas Lahan Pertanian yg tidak diusahakan (0.27), dan Fasilitas Jasa Bengkel atau reparasi kendaraan bermotor/ alat-alat elektronik/ Usaha foto kopi (0.0018) yang lebih besar daripada Fasilitas Jasa Bengkel atau reparasi kendaraan bermotor/ alat-alat elektronik/ Usaha foto kopi (0.0003) di gerombol 2.

Berdasarkan Tabel 4 ada 9 variabel kualitatif penting yang membedakan kedua gerombol. Di desa-desa pada gerombol 1 lebih banyak kendaraan roda dua sebanyak 55,5% dan kendaraan roda tiga (98.7%), sedangkan pada gerombol 2 lebih banyak kendaraan lainnya (82.9%). Jamban sendiri (76.9%) lebih banyak terdapat di gerombol 1, sedangkan di gerombol 2 lebih banyak menggunakan Jamban bersama/umum (76.8%) dan Bukan jamban (82.4%). Pada umumnya di desa-desa pada gerombol 1 terdapat lebih banyak tempat sampah (90.0%) dan buang sampah di lubang/dibakar (66.6%), sedangkan pada gerombol 2 lebih banyak buang sampah ke sungai dan lainnya. Di desa-desa pada gerombol 1 puskesmas lebih mudah akses daripada di desa-desa pada gerombol 2. Bahan bakar minyak tanah lebih banyak digunakan di desa-desa pada gerombol 1 daripada gerombol 2 yang banyak menggunakan kayu bakar. Lembaga keuangan informal lebih banyak pada gerombol 1. Di dalam gerombol 1 terdapat sejumlah desa perkotaan (33 desa), sedangkan di gerombol 2 semuanya tergolong Perdesaan. Pada umumnya di kedua

gerombol terdapat Kelembagaan Komunitas Masyarakat, namun di gerombol 2 jumlah desa yang belum memiliki Kelembagaan Komunitas Masyarakat lebih banyak dari pada di gerombol 2.

**Tabel 4.3.** Profil Setiap Gerombol dan Kepentingan Beberapa Variabel dalam Setiap Gerombol

Variabel Kuantitatif	Gerombol				Keterangan <sup>*)</sup>
	1		2		
	Rata-Rata	Std	Rata-Rata	Std	
Luas Desa (Ha)	4,017.51	10,577.49	12,824.36	19,047.95	
Jumlah Penduduk (Orang)	1,059.1	736.0	534.6	401.9	1
Ukuran Keluarga	3.7	0.5	4.1	0.9	1 & 2
Jumlah Keluarga KS dan Pra KS I	109.7	97.6	74.8	66.8	
Persentase Penduduk Laki-laki (%)	50.7	3.3	52.8	5.1	
Persentase Penduduk Perempuan (%)	49.3	3.3	47.2	5.1	1
Kepadatan Penduduk Geografis (Orang/Ha)	3.1	12.3	0.4	0.9	2
Rasio Jumlah SD terhadap Jumlah Penduduk	0.0016	0.00083	0.0028	0.00241	2
Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Jumlah Penduduk	0.0012	0.00098	0.0022	0.00236	
Rasio Jumlah Bidan dan Dukun Bayi Terhadap Jumlah Penduduk	0.0020	0.00180	0.0041	0.00441	1 & 2
Persentase Jumlah Keluarga pra KS dan KS I (%)	39.3	24.3	60.4	29.1	1
Persentase Jumlah Keluarga yang menerima kartu sehat/ kartu peserta program jaminan kesehatan (%)	17.4	19.1	27.8	28.4	
(Jumlah SD dan yang sederajat Negeri / jumlah Keluarga pra KS dan KS I) x 1000 (Unit/Keluarga)	18.9	46.4	17.8	22.9	
(Jumlah SLTP dan yang sederajat Negeri / jumlah Keluarga pra KS dan KS I) x 1000 (Unit/Keluarga)	2.5	7.3	3.2	10.1	
(Jumlah puskesmas atau puskesmas pembantu / jumlah pra KS dan KS I) x 1000 (Unit/Keluarga)	12.9	46.5	10.4	21.7	
Rasio Jumlah Wartel/Kiospon/ Warpostel/ Warparpostel terhadap jumlah penduduk (unit/orang)	0.0003	0.00061	0.0005	0.00147	
Jumlah Buruh Tani (%)	8.3	17.5	2.5	6.9	2
Kepadatan Agraris (KK/Hektar)	53.5	201.0	9.6	23.3	

Variabel Kuantitatif	Gerombol				Keterangan <sup>*)</sup>
	1		2		
	Rata-Rata	Std	Rata-Rata	Std	
Rata-rata Pemilikan Lahan Pert Sawah (Ha/KK)	1.39	10.51	0.55	1.63	
Rata-rata Pemilikan Lahan Pert Non Sawah (Ha/KK)	16.77	44.71	167.81	275.32	2
Pola Penggunaan Lahan Pertanian Sawah (%)	0.016	0.057	0.018	0.081	
Pola Penggunaan Lahan Pertanian Non Sawah (%)	0.868	0.117	0.892	0.153	
Pola Penggunaan Lahan Non Pertanian (%)	0.116	0.107	0.089	0.135	1
Luas Lahan Pertanian yg tidak diusahakan (Ha)	0.12	0.20	0.27	0.32	2
Rasio Kios Saprodi (unit/ha)	0.0003	0.0024	0.0006	0.0092	
Fasilitas Jasa Bengkel atau reparasi kendaraan bermotor/ alat-alat elektronik/ Usaha foto kopi (unit/orang)	0.0018	0.0034	0.0003	0.0010	1 & 2

<sup>\*)</sup> menunjukkan variabel-variabel kuantitatif penting pada setiap gerombol

**Tabel 4.4.** Variabel-Variabel Kualitatif (Kategorik) Pembeda Gerombol

Variabel: Alat Transportasi Utama

Gerombol	Tidak bermotor		Roda dua		Roda tiga		Lainnya	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	1	100.0%	94	55.0%	147	98.7%	42	17.1%
2	0	.0%	77	45.0%	2	1.3%	203	82.9%
gabungan	1	100.0%	171	100.0%	149	100.0%	245	100.0%

Variabel: Tempat buang air besar sebagian besar keluarga

Gerombol	Jamban sendiri		Jamban bersama/umum		Bukan jamban	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	233	76.9%	23	23.2%	29	17.6%
2	70	23.1%	76	76.8%	136	82.4%
gabungan	303	100.0%	99	100.0%	165	100.0%

Variabel: Fasilitas kredit Ketahanan Pangan (KKP)/ Kredit Usaha Kecil (KUK)/ Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/ Kredit lainnya

Gerombol	Ada		Tidak ada	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	140	80.5%	145	36.9%
2	34	19.5%	248	63.1%
gabungan	174	100.0%	393	100.0%

Variabel: Tempat buang sampah sebagian besar keluarga

Gerombol	Tempat sampah		Lubang/dibakar		Sungai		Lainnya	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	27	90.0%	181	66.3%	29	22.8%	48	35.0%
2	3	10.0%	92	33.7%	98	77.2%	89	65.0%
gabungan	30	100.0%	273	100.0%	127	100.0%	137	100.0%

Variabel: Kemudahan Mencapai Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Lain

Gerombol	Sangat mudah		Mudah		Sulit		Sangat sulit	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	12	92.3%	88	84.6%	84	48.0%	101	36.7%
2	1	7.7%	16	15.4%	91	52.0%	174	63.3%
gabungan	13	100.0%	104	100.0%	175	100.0%	275	100.0%

Variabel: Bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar keluarga untuk memasak

Gerombol	Minyak tanah		Kayu bakar		Lainnya	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	131	77.5%	153	38.6%	1	50.0%
2	38	22.5%	243	61.4%	1	50.0%
gabungan	169	100.0%	396	100.0%	2	100.0%



Variabel: Lembaga Keuangan Informal

Gerombol	Ada		Tidak ada	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	55	94.8%	230	45.2%
2	3	5.2%	279	54.8%
gabungan	58	100.0%	509	100.0%

Variabel: Desa ini berada di wilayah: 1.Perkotaan 2.Perdesaan

Gerombol	Perkotaan		Perdesaan	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	33	100.0%	252	47.2%
2	0	.0%	282	52.8%
gabungan	33	100.0%	534	100.0%

Variabel: Keberadaan Kelembagaan Komunitas Masyarakat

Gerombol	Ya		Tidak	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1	258	54.5%	27	28.7%
2	215	45.5%	67	71.3%
gabungan	473	100.0%	94	100.0%

### **4.3. Hipotesis Umum Atas Tipologi Desa-desa Perbatasan Tertinggal**

Berdasarkan hasil sementara dari analisis penggerombolan tersebut di atas, secara umum terdapat dua gerombol desa-desa di keempat kabupaten (empat propinsi), di mana masing-masing gerombol mempunyai karakteristik tersendiri. Apabila semua desa (576 desa) dalam analisis ini tergolong desa tertinggal, desa-desa tersebut dapat dikelompokkan sehingga dalam masing-masing kelompok dapat diketahui apa yang menjadi kendala di setiap kelompok desa secara khusus. Dengan demikian diharapkan ada suatu solusi yang tepat untuk meningkatkan setiap kelompok desa tertinggal desa tertinggal sesuai dengan permasalahannya.

Kondisi desa-desa tertinggal nampaknya berbeda antara satu desa dengan lainnya, namun mungkin masih ada beberapa kesamaannya. Hal terutama berkaitan dengan jarak desa ke perbatasan dan jarak antar desa. Semakin dekat suatu desa dengan desa lainnya diharapkan semakin banyak kesamaannya. Sebaliknya, semakin jauh suatu desa dari perbatasan, desa tersebut akan berbeda dengan desa sekitar perbatasan. Desa-desa sekitar perbatasan akan mempunyai kesamaan, tetapi sejauh mana atau jarak berapa suatu desa dari perbatasan akan berbeda dengan desa terdekatnya (di sekitarnya). Penggerombolan diharapkan dapat mengungkap kesamaan dan perbedaan antar desa tertinggal, dan masing-masing gerombol mempunyai tipe atau karakteristik tertentu.

## V. PENGEMBANGAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS TIPOLOGI PERDESAAN

Indonesia yang mempunyai wilayah, masyarakat, dan budaya yang sangat beragam mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dalam upaya-upaya peningkatan (kesejahteraan) masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa. Salah satu ciri keragaman wilayah adalah lokasi daerah-daerah dan desa-desa yang berada pada perbatasan dengan negara-negara lain.

Empat kabupaten yang merupakan fokus kegiatan lapang penyusunan tipologi perdesaan, daerah dan desa-desa perbatasan yang terdiri dari Kabupaten Raja Ampat Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara mencerminkan keragaman di atas. Dari hasil wawancara dan observasi lapang, uraian berikut ini mengungkapkan potensi dan permasalahan secara umum di kabupaten-kabupaten tersebut.

Pemberdayaan (*empowerment*) sebagaimana dinyatakan oleh Ife (1995) merupakan unsur pokok sebagai pondasi dalam upaya pengembangan masyarakat (*Community Development*) yang mengacu pada perspektif keadilan sosial. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan daya (*power*) orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang tidak beruntung. Dengan daya (*power*) yang meningkat, orang-orang secara individual ataupun secara berkelompok akan lebih mampu mengakses sumberdaya di lingkungannya ataupun peluang-peluang untuk memperbaiki kehidupannya.

Dengan pentipologian desa akan diperoleh kelompok-kelompok desa yang dalam sejumlah ciri atau indikator mempunyai kesamaan. Telah diungkapkan bahwa selama ini upaya pentipologian desa yang telah dilakukan umpamanya oleh BPS untuk mengidentifikasi "Desa Miskin" (Desa Tertinggal) dan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral PMD untuk mengklasifikasikan Desa/kelurahan berdasarkan tingkat perkembangannya yang terdiri dari Desa Swadaya, Desa/Kelurahan Swakarya dan Desa/Kelurahan Swasembada. Kajian ini

merupakan salah satu upaya pentipologian desa dalam hal ini desa-desa tertinggal di kawasan perbatasan.

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi lapang dan hasil analisis dalam kajian ini dapat dinyatakan bahwa desa-desa tertinggal di wilayah perbatasan keadanya bervariasi cukup besar dalam hal ciri-ciri tertentu. Dengan berbasis tipologi yang dibuat, dapat diidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok desa perbatasan tertinggal yang mempunyai kesamaan ciri-cirinya, umpamanya permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan akses terhadap transportasi, akses terhadap permodalan, akses terhadap teknologi pertanian dan perikanan, akses terhadap pemasaran hasil, akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan akses terhadap sumberdaya alam (SDA) di lingkungannya. Dengan demikian, dapat disusun program-program pemberdayaan yang meningkatkan "beragam akses" yang lebih terarah berbasiskan tipologi kelompok-kelompok desa perbatasan tertinggal. Dalam hubungan meningkatkan "beragam akses" itu juga sangat penting diperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

## **5.1. KABUPATEN RAJA AMPAT – PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

### **5.1.1. KEBIJAKAN PENTIPOLOGIAN PERDESAAN**

Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 10 distrik (kecamatan) dan 85 kampung (desa). Distrik dan kampung tersebut tersebar di empat pulau besar yaitu P. Waigeo, P. Batanta, P. Salawati, dan P. Misool. Kampung-kampung di wilayah kabupaten Raja Ampat secara sederhana dapat ditipologikan menurut infrastruktur dan kapasitas SDM nya, menjadi dua tipe: 1) sangat tertinggal, dan 2) relatif lebih maju. Kampung yang sangat tertinggal menjadi tanggungjawab Dinsa Sosial dengan program-program stimulan bersifat hibah. Kampung relatif lebih maju menjadi tanggungjawab Dinas-Dinas teknis (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan) dengan program-program peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta pengembangan ekonomi produktif.

Dalam hal konsep desa perbatasan, pemerintah daerah tidak menetapkan menurut wilayah desa namun dalam satuan pulau perbatasan. Pulau perbatasan

adalah pulau-pulau yang berlokasi berbatasan dengan negara tetangga, dan umumnya pulau ini tidak berpenghuni (contoh: Pulau Fani).

Bila ditipologikan menurut sektor pertanian, maka kampung di kabupaten Raja Ampat dapat dibedakan menjadi: 1) desa nelayan, dan 2) desa petani-nelayan. Desa nelayan berlokasi di pesisir pantai dimana lahan datarnya sangat sempit (hanya untuk pemukiman), mata pencaharian utama adalah menangkap ikan dengan peralatan tradisional. Sedangkan desa petani-nelayan berlokasi di pulau-pulau besar, dengan mata pencaharian utama menangkap ikan dan berkebun kelapa. Desa nelayan relatif lebih miskin atau tertinggal dibanding desa petani-nelayan. Hal ini terkait dengan kebijakan pemda Kabupaten Sorong waktu itu, yang lebih memfokuskan pada pembangunan desa-desa pedalaman atau daratan dan pegunungan. Setelah pemekaran menjadi Kabupaten Raja Ampat, maka kampung-kampung pesisir pantai mendapat perhatian lebih serius.

#### **5.1.2. POTENSI WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA**

Kabupaten Raja Ampat adalah satu dari kabupaten di Provinsi Irian Jaya Barat. Luas wilayah kabupaten ini sekitar 4000 km<sup>2</sup> (laut dan darat) dengan luas daratan hanya 6.084,50 km<sup>2</sup>. Letak kabupaten Raja Ampat berbatasan langsung dengan negara Australia. Jumlah penduduk seluruhnya berjumlah 30.375 jiwa (6.911 KK) dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 3 jiwa per kilometer persegi.

Kondisi dari 80-an kampung yang ada hampir sama yaitu tertinggal atau miskin. Sebagian penduduk yang relatif kaya adalah para pendatang dari Sulawesi Selatan (orang bugis) yang menjadi pegawai distrik atau pedagang (memiliki kios/warung kelontong). Mata pencaharian penduduk hampir sama yaitu nelayan dan petani. Tanaman yang dihasilkan adalah singkong (untuk konsumsi sendiri) dan kopra. Namun harga kopra sangat rendah, satu kilogram kopra (6-8 buah kelapa) dihargai sekitar 1000 – 1500 rupiah. Luas pemilikan lahan kebun kelapa sekitar 2 Ha per KK, dan rata-rata per KK dapat menjual sekitar 500 kg kopra per bulan. Sementara sebagai nelayan, penduduk hanya menangkap ikan lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari saja. Pemasaran ikan masih sulit karena kendala

transportasi dan es. Pembuatan ikan asin sudah dilakukan tetapi juga lebih banyak untuk kebutuhan sendiri.

Dalam hal pendidikan, di setiap kampung sudah mempunyai satu SD. Meski demikian dengan jumlah kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, rata-rata jumlah total muridnya hanya sekitar 20-30 orang saja. Sementara dari sisi ketersediaan pengajar, hanya satu guru yang mengajar untuk satu SD.

Struktur organisasi kampung sudah ada. Kepala Desa rata-rata lulusan SMP bahkan ada yang sudah lulus SMA. Dalam hal kelembagaan, kelompok yang ada adalah berdasarkan ikatan kekerabatan (marga), dan kerjasama kelompok ini masih dalam hal aktivitas sosial seperti membangun rumah. Kerjasama dalam kegiatan pembangunan relatif masih lemah, dan masih terbatas pada kerjasama dalam satu keluarga saja.

Di Kabupaten ini potensi yang terungkap adalah :

1. Sumberdaya laut (ikan) melimpah
2. Penduduk terbiasa sebagai nelayan dan kondisi laut yang ada
3. Penduduk sudah mengenal pembuatan ikan asin dan pembuatan kopra
4. Sudah terdapat listrik
5. Sudah terjangkau telepon selular
6. Perekonomian sudah mulai tumbuh
7. Terdapat keamanan dan ketertiban

### **5.1.3. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN DESA**

Pelaksanaan program-program pembangunan di kabupaten Raja Ampat masih menghadapi kendala, antara lain:

1. Belum selesainya pembangunan prasarana perkantoran Pemda. Saat ini kegiatan administratif masih lebih banyak dilakukan di kota Sorong sebagai kantor perwakilan Pemda Raja Ampat.
2. Belum adanya transportasi reguler dan masih sangat mahalnya transportasi Sorong-Waisai (ibukota kabupaten Raja Ampat). Kapal perintis Raja Ampat I belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sangat dipengaruhi oleh gelombang laut (bulan Juli-September gelombang sangat besar dan hanya kapal besar yang tetap berlayar). Hal ini juga menyebabkan

keengganan pegawai untuk bekerja di Waisai, karena tidak ada kepastian pulang ke Sorong.

3. Masih banyak pegawai yang belum "definitif", dan berstatus Pejabat Sementara (PJs). Hal ini terkait dengan usia pemerintahan Kabupaten Raja Ampat yang masih muda (3 tahun).

Sementara bagi dinas-dinas teknis (Dinas pertanian, Perkebunan dan Perhutanan), program-program pembangunan yang sudah direncanakan dalam pelaksanaannya belum dapat terealisasi karena juga menghadapi permasalahan yang hampir sama, yaitu:

1. Sarana transportasi masih sangat terbatas, sementara jangkauan wilayah kerjanya sangat luas.
2. Jumlah tenaga kerja atau personil Dinas yang masih sangat terbatas. Sementara Kepala Dinas (Eselon dua) masih berstatus Pejabat Sementara (PJs).

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani dan nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya adalah masih lemahnya akses pada teknologi, permodalan, dan pemasaran. Pemasaran ikan maupun kopra masih dikuasai oleh tengkulak (pedagang), dimana petani maupun nelayan tidak mempunyai posisi tawar karena juga memiliki ketergantungan modal pada tengkulak tersebut.

Berbagai permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Raja Ampat, antara lain adalah:

1. Permodalan masyarakat yang masih terbatas (miskin)
2. Warga masyarakat kesulitan memperoleh pinjaman modal dari Bank
3. Intensifikasi pengelolaan sumberdaya laut dan pertanian belum maksimal
4. Lembaga keuangan mikro belum tersedia

#### **5.1.4. PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN**

Dinas Sosial lebih memusatkan program-programnya pada kampung-kampung yang sangat tertinggal (miskin). Program Dinas Sosial yang dilaksanakan saat ini adalah berupa stimulan (hibah) seperti Bantuan Subsidi

Langsung Tunai dan Beras untuk keluarga miskin (Raskin). Usulan dari Dinas Sosial bagi program pemberdayaan masyarakat desa tertinggal antara lain:

1. Bantuan peralatan untuk mencari nafkah bagi nelayan, seperti ketinting. Ketinting dikelola oleh satu kelompok (tiga orang, biasanya satu keluarga).
2. Program pengembangan ekonomi (bantuan modal) dalam bentuk hibah untuk nelayan yang lebih tua.
3. Program beasiswa untuk meningkatkan pendidikan generasi muda agar tidak putus sekolah.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki dua program besar yaitu bantuan pengembangan rumput laut dengan dana sebesar 1.8 milyar rupiah dan proyek Coremap untuk pelestarian terumbu karang. Bantuan rumput laut dilakukan untuk nelayan di distrik Waigeo Selatan, dan saat ini baru tahap pembudidayaan untuk bibit. Masalahnya, untuk merubah perilaku dari masyarakat berburu meramu menjadi masyarakat berbudidaya memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu diberikan pendampingan yang dilakukan oleh 4 sarjana pendamping dari Jakarta.

Untuk pelaksanaan program Coremap sudah berlangsung lima tahun mencakup 17 desa dengan pendekatan partisipatif. Di desa. Program Coremap menempatkan 1 fasilitator desa dan dua orang kader desa (1 laki-laki dan 1 perempuan) dari warga setempat. Tujuan program Coremap adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan terumbu karang tetap terjaga kelestariannya, melalui dua program yaitu pemberdayaan pemerintah desa dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) dilakukan melalui pembentukan koperasi nelayan dengan nama LEM3 (Lembaga Ekonomi Mikro Mitra Mina) yang berkedudukan di Kabupaten.

Usulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk program pemberdayaan masyarakat desa tertinggal adalah lebih diarahkan untuk mengubah perilaku masyarakatnya dulu dari masyarakat berburu meramu menjadi masyarakat budidaya perikanan dan pertanian, dengan diiringi transfer teknologi untuk pengolahan sumberdaya yang lebih baik.



## **5.2.KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE – PROVINSI SULAWESI UTARA**

### **5.2.1. KEBIJAKAN PENTIPOLOGIAN PERDESAAN**

Kabupaten Kepulauan Sangihe dikelompokkan menjadi enam kluster yaitu:

- (1) Kluster pulau-pulau perbatasan: P. Marore, P. Kawio, P. Kemboleng, P. Ehise, P. Memanuk, P. Malutuang, P. Kawaluso, P. Dumarehe.
- (2) Kluster Pulau Sangihe: P. Lipaeng, P. Buseng, P. Nusa, P. Bukide, P. Nipa, P. Beeng Laut, P. Beeng Darat, P. Bebalang, dan P. Sangihe
- (3) Kluster Tatoareng: P. Kahakitang, P. Kalama, P. Mahengetang, P. Para
- (4) Kluster Pulau Siau: P. Siau, P. Makalehi, P. Gunatin, P. Pahape, P. Mahoro
- (5) Kluster Pulau Tagulandang: P. Tagulandang dan P. Ruang
- (6) Kluster P. Biaro: P. Biaro

Pengklusteran tersebut didasarkan pada lokasi pulau yang saling berdekatan. Sedangkan kluster pulau-pulau perbatasan didasarkan pada lokasi pulau pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Philipina. Dua desa yang berbatasan langsung dengan Philipina adalah desa Kawio (P Kawio) dan desa Marore (P Marore), dimana masyarakatnya lebih sering berhubungan dengan warga Philipina daripada dengan masyarakat Tahuna (ibukota kabupaten Sangihe). Setiap kluster memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu: 1) kepulauan, 2) bergunung, 3) daerah miskin, dan 4) rawan bencana.

Pemerintah daerah Sangihe dalam membangun daerahnya didasarkan pada Strategi Daerah yang telah disusun dalam buku "Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007-2009". Pengklusteran wilayah tersebut telah dikukuhkan melalui SK Bupati. Sementara untuk pentipologian desa (kampung) masih mengacu pada pentipologian tingkat nasional, yaitu: desa swadaya, swakarya, dan swasembada.

Dinas Pertanian mentipologikan enam kluster menjadi tiga tipologi pulau yaitu pulau kecil, pulau besar dan pulau menengah. Sementara dari tipe lahan dibedakan menjadi dua, pertama pulau Siau yang tanahnya merupakan bahan dari

gunung api, semua pulau lainnya memiliki tipe lahan sama. Usulan dari Dinas Pertanian untuk pentipologian desa, selain masih mengacu pada tipologi desa swadaya, swakarya, dan swasembada, maka perlu dimasukkan unsur jenis lahan dan pemanfaatan lahannya, serta prasarana dan sarana pertaniannya.

### **5.2.2. POTENSI WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA**

Aksesibilitas ke pulau-pulau wilayah kabupaten Sangihe masih sangat rendah. Transportasi penghubung antar pulau saat ini adalah kapal perintis yang sudah tua (kapal kayu), yang berlayar ke pulau-pulau setiap dua minggu sekali.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani kebun (lahan kering) dan nelayan tradisional. Dalam mencari ikan sebagian penduduk masih menyewa perahu dari orang lain, dan penangkapan ikan yang dilakukan masih untuk kebutuhan sendiri.

Sejumlah potensi yang terungkap di Kabupaten Sangihe adalah:

1. Transportasi dari desa ke Ibukota kabupaten sangat lancar
2. Sumber daya laut cukup melimpah
3. Terdapat produk-produk unggulan seperti Pala, Cengkeh, Kelapa, dan Kacang Tanah
4. Warga masyarakat sudah terbiasa dengan adanya kerjasama kelompok
5. Petani sudah mengenal teknologi intensifikasi
6. Sudah terjangkau listrik dan telepon
7. Keadaan masyarakat yang religius dan keamanan yang kondusif

### **5.2.3 MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN DESA**

Desa-desa perbatasan memiliki sumberdaya banyak tetapi aksesibilitas sangat rendah, terutama akses kepada pemasaran. Pasar yang ada saat ini didominasi oleh kapal-kapal dari pedagang Philipina. Hal lain, masih lambatnya perhatian kepada desa-desa tertinggal juga karena kendala politik, yaitu masalah aturan pusat tentang kelautan. Demikian pula masalah penetapan harga kopra yang lebih banyak ditentukan oleh pusat, bukan oleh harga pasar (catatan: jika ditentukan oleh pasar, maka harga kopra jauh lebih mahal). Masalah lain adalah kendala transportasi yang mengakibatkan biaya kegiatan pembangunan di desa

terpencil menjadi lebih mahal daripada desa daratan. Selain itu masih terbatasnya tenaga yang ada di dinas-dinas teknis juga merupakan kendala untuk melaksanakan program pembangunan.

Adapun permasalahan yang diungkapkan di Kabupaten ini antara lain adalah:

1. Biaya transportasi ke daerah luar sangat mahal
2. Prasarana transportasi sangat tergantung pada laut
3. Tingkat pendidikan dan keterampilan SDM lokal sangat rendah
4. Budaya subsisten warga masyarakat yang masih tinggi
5. Belum ada Bank sebagai sumber permodalan
6. Sangat kesulitan untuk pemasaran produk

#### **5.2.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN**

Program yang pernah dilaksanakan oleh Dinas Sosial masih berupa bantuan langsung (stimulan) berupa alat-alat pertanian untuk petani dan peralatan menangkap ikan untuk nelayan. Dinas Sosial juga sedang merencanakan bantuan dana bergulir bagi desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan langsung, serta program pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Badan Pemberdayaan Masyarakat memiliki kebijakan terhadap desa-desa perbatasan, yaitu melakukan koordinasi dengan dinas-dinas teknis untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa-desa perbatasan yang merupakan desa tertinggal. Program-program yang dilaksanakan BPM antara lain:

1. Sektor pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Khusus Murid
2. Sektor jaminan pemeliharaan kesehatan: Puskesmas dan Rumah Sakit, yang ditangani langsung oleh PT Askes
3. Bantuan Beras untuk keluarga miskin (Raskin)
4. Bantuan infrastruktur perdesaan
5. Subsidi langsung tunai.

Disamping itu juga terdapat program-program pemerintah pusat untuk penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2001 sampai sekarang yaitu:

1. Program penanggulangan kecamatan (PPK)
2. Program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)
3. Marginal Fishing Community Development Pipit (MFCDP) atau program pengembangan wilayah pesisir pantai.

Dinas pertanian memiliki program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Strategi pembangunannya dengan menetapkan sentra-sentra produksi misalnya kelapa, pala dan cengkeh. Pada desa-desa perbatasan, program yang dilaksanakan adalah pemanfaatan lahan pekarangan untuk perbaikan gizi keluarga (misalnya ditanami sayur-sayuran, di desa Kawio dan Marore).

### **5.3. KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **5.3.1. KEBIJAKAN PENTIPOLOGIAN PERDESAAN**

Tipologi desa di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau didasarkan kepada Keputusan Mendagri nomor 75 tahun 1999, tanggal 24 Desember 1999 tentang Tipologi Desa berdasarkan data Potensi Desa (Podes). Tipologi tersebut menetapkan desa-desa menjadi desa/kelurahan maju dan desa/kelurahan tertinggal. Kriteria ketertinggalan desa terutama terkait dengan ketersediaan infrastruktur desa. Pentipologian tersebut relevan dengan pentipologian desa yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang lebih diarahkan untuk kepentingan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pentipologian tersebut muncul program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yaitu Inpres nomor 5 tahun 1993. Dengan berlakunya tipologi desa berdasarkan Kep Mendagri tersebut, maka tipologi desa yang terdiri dari desa swadaya, swakarya, dan swasembada tidak berlaku lagi.

Sekitar 169 desa/kelurahan dari total 274 desa/kelurahan (sekitar 62 %) di Provinsi Kepulauan Riau tergolong desa tertinggal, bahkan masih terdapat kelurahan yang masuk tipologi tertinggal. Tingginya persentasi desa/kelurahan tertinggal ini disebabkan beberapa hal, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan (*skill*), dan kepemilikan modal. Ketertinggalan desa-desa di Kepulauan Riau identik dengan kemiskinan.

Tipologi desa/kelurahan yang digunakan BPS menggunakan 14 indikator kemiskinan meliputi (a) luas lantai kurang dari 82 M<sup>2</sup>, (b) jenis lantai bangunan terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, (c) jenis dinding tempat tertinggal, (d)

tidak memiliki fasilitas buang air besar , (e) sumber penerangan rumahtangga, (f) sumber air minum, (g) bahan bakar, (h) konsumsi daging dan susu satu kali per minggu, (i) hanya membeli satu kali stel pakaian per tahun, (j) makan satu atau dua kali per hari, (k) tidak sanggup membayar biaya pengobatan, (l) sumber penghasilan kepala RT, (m) pendidikan petani, dan (n) tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,-. Dalam implementasi indikator tersebut, pelaksanaan seringkali dihadapkan pada kendala teknis sehingga memerlukan modifikasi sesuai dengan kondisi riil. Oleh karena itu dari 14 indikator ditetapkan jika rumahtangga memenuhi 9 indikator, maka rumahtangga tersebut dianggap sebagai rumahtangga miskin. Pada tahun 2006 (per Mei) terdapat 24.414 rumahtangga (RT) yang tergolong miskin (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Jumlah Rumahtangga Miskin Pasca Pencocokan dan Penelitian per Desa di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Per 1 Mei 2006

No	Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jml RT	JRM1	JRM D-1	JRM Posko	JRM D-2	JRM D1+2
<b>I</b>	<b>JEMAJA</b>	<b>2,044</b>	<b>427</b>	<b>415</b>	<b>1,055</b>	<b>543</b>	<b>958</b>
1	Ulu Maras	235	72	68	76	51	119
2	Kuala Maras	181	56	53	90	23	76
3	Bukit Padi	90	43	40	24	13	53
4	Mampok	273	14	14	236	153	167
5	Letung*	769	132	130	446	174	304
6	Rewak	234	50	50	57	48	98
7	Keramut	128	23	23	69	49	72
8	Impol	134	37	37	57	32	69
<b>II</b>	<b>SIANTAN</b>	<b>3,598</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>571</b>	<b>232</b>	<b>1,063</b>
1	Kiabu	405	116	116	0	0	116
2	Nyamuk	509	85	85	241	102	187
3	Terempa barat	836	181	181	163	26	207
4	Terempa*	1,332	300	300	98	44	344
5	Batu Belah	305	90	90	30	21	111
6	Telaga	211	59	59	39	39	98
<b>III</b>	<b>PALMATAK</b>	<b>3,031</b>	<b>772</b>	<b>757</b>	<b>1,376</b>	<b>662</b>	<b>1,419</b>
1	AirAsuk	835	267	265	600	237	502
2	Tebang	494	138	135	132	76	211
3	Ladan	722	149	147	283	207	354
4	Mubur	412	56	53	274	82	135
5	Payalaman	568	162	157	87	60	217
<b>IV</b>	<b>MIDAI</b>	<b>1,549</b>	<b>364</b>	<b>340</b>	<b>299</b>	<b>22</b>	<b>362</b>
1	Sabelat	324	84	81	76	2	83
2	Batu Belanak	456	101	99	86	7	106
3	Sabang Barat (Midai*)	769	179	160	137	13	173

<b>V</b>	<b>BUNGUAN BARAT</b>	<b>2,796</b>	<b>917</b>	<b>838</b>	<b>1,200</b>	<b>466</b>	<b>1,304</b>
1	Sedanau Timur	258	120	100	51	24	124
2	Sedarat barn	122	63	51	68	29	80
3	Batubi Jaya	343	167	149	108	65	214
4	Gunung Putri	345	150	136	75	14	150
5	Sedanau*	1,578	346	332	868	308	640
6	Mekar Jaya	150	71	70	30	26	96
<b>VI</b>	<b>BUNGURAN UTARA</b>	<b>990</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>364</b>	<b>98</b>	<b>330</b>
1	Kelarik Barat	181	58	58	0	49	107
2	Kelarik	473	88	88	261	7	95
3	Kelarik Utara	336	88	88	103	42	128
<b>VII</b>	<b>PULAU LAUT</b>	<b>545</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>89</b>	<b>80</b>	<b>200</b>
1	Air Payang	235	61	61	60	54	115
2	Tanjung Pala	310	59	59	29	26	85
<b>VIII</b>	<b>PULAU TIGA</b>	<b>1,144</b>	<b>268</b>	<b>248</b>	<b>99</b>	<b>41</b>	<b>289</b>
1	Sededap	176	50	44	4	0	44
2	Sabang mawang	610	157	145	23	12	157
3	Pulau Tiga	358	61	59	72	29	88
<b>IX</b>	<b>BUNGURAN TIMUR</b>	<b>6,211</b>	<b>1,765</b>	<b>1,616</b>	<b>1,080</b>	<b>440</b>	<b>2,156</b>
1	Cemaga	648	169	155	100	88	243
2	Sungai Ulu	471	125	125	61	60	285
3	Ranai*	3,040	680	547	318	188	735
4	Harapan Jaya	263	118	118	105	14	132
5	Tapau	184	68	67	90	24	91
6	Air Lengit	202	73	73	115	13	86
7	Ceruk	243	93	93	11	10	103
8	Sepempang	349	81	81	159	13	94
9	Tanjung	327	135	135	109	18	153
10	Kelanga	361	121	121	12	12	133
11	Pengadah	123	102	101	0	0	101
<b>X</b>	<b>SERASAN</b>	<b>1,831</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>82</b>	<b>63</b>	<b>553</b>
1	Kampung Hilir	495	115	115	15	14	129
2	Serasan*	712	165	165	26	16	181
3	Arung Ayam	325	112	112	8	7	119
4	AirNusa	299	98	98	33	26	124
<b>XI</b>	<b>SUBI</b>	<b>675</b>	<b>229</b>	<b>220</b>	<b>140</b>	<b>111</b>	<b>331</b>
1	Pulau Panjang	222	35	35	80	63	98
2	Subi Besar	121	60	58	10	10	68
3	Subi	231	94	89	26	14	103
4	Meliah	101	40	38	24	24	62
	<b>KAB.NATUNA</b>	<b>24,414</b>	<b>6,417</b>	<b>6,109</b>	<b>6,355</b>	<b>2,758</b>	<b>8,965</b>

Keterangan: JRM = Jumlah Rumahtangga Miskin

Strategi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk memberdayakan desa/kelurahan tertinggal adalah melalui percepatan pembangunan (*acceleration of development program*). Tahap pertama pembangunan dimulai tahun 2006 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5 milyar untuk 10 desa tertinggal yang

bersumber dari APBD I. Dua diantara 10 desa yang mendapat dana percepatan pembangunan merupakan desa di wilayah Kabupaten Natuna yaitu Desa Klarik, Kecamatan Bunguran Barat dan Desa Telaga, Kecamatan Siantan. Program percepatan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Tim Program Percepatan Pembangunan Desa yang melibatkan instansi lintas sektoral di tingkat provinsi sampai pada tingkat desa. Instansi yang terlibat yaitu Biro Ekonomi, Pemda Kepulauan Riau, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dll. Program akselerasi menerapkan model bantuan langsung masyarakat (BLM) yang merupakan perpaduan dua program yang dinilai sukses yaitu model PPK dan PPKS. Program akselerasi dengan model BLM dirancang dengan mengutamakan partisipasi langsung masyarakat mulai tahap perencanaan sampai evaluasi. Program ini diprioritaskan pada desa/kelurahan atau kecamatan yang paling tertinggal dan kecamatan yang berbatasan dengan negara lain.

Kabupaten Natuna masuk menjadi wilayah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2003. Sebelumnya, Kabupaten Natuna termasuk wilayah Provinsi Riau. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Natuna terus bertambah dan saat ini terdiri dari 49 desa dan 6 kelurahan yang tercakup pada 9 kecamatan. Berdasarkan kriteria sesuai KepMendagri nomor 75 tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, di Kabupaten Natuna telah diidentifikasi desa/kelurahan tertinggal seperti pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Daftar Nama Desa/Kelurahan Tertinggal di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2001

No	Kecamatan-Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jml Jiwa
1	Bunguran Timur-Rinai	1.Ceruk*** 2.Cemaga *** 3-Kelanga * 4.Pengadah** 5.Sepempang *** 6.Sungai Ulu* 7-Tanjung *** 8.Air Lengit* 9-Harapan Jaya*	1.Ranai*	16.599
2	Midai-Midai	1.Batu Belanak***	1.Midai*	3.745

		2.Sebelat*		
3	Serasan-Serasan	1. Arung Ayam* 2. Kampung Hilir* 3- Subi***	1.Serasan**	8.745
4	Siantan-Tarempa	1.Air Asuk* 2.Batu Belah* 3-Klabu* 4. Ladan* 5-Mubur* 6-Tarempa Luar Kota* 7.Tebang* 8. Nyamuk* 9.Telaga ***	1 .Tarempa*	31.440
5	Jemaja-Letung	1. Impol*** 2.Keramut* 3-Kuala Maras** 4.Mampok* 5.Rewak* 6.Ulu Maras** 7.Bukit Padi *	1. Letung **	22.288
6	Bunguran Barat-Sedanau	LKelarikUtara* 2-Kelarik Barat* 3.Kelarik Selatan* 4.Pulau Laut* 5.Pulau Tiga* 6.Sabang Mawang* 7.Sedanau Timur* 8. Sededap*	1.Sedanau*	19.184

Keterangan: # =Tahun pelaporan tidak jelas, diperkirakan tahun 2001,

\*= Desa penerima program IDT 1 kali

\*\*= Desa penerima program IDT 2 kali

\*\*\*= Desa penerima program IDT 3 kali

S umber : Data BPM Kabupaten Natuna, 2001

Pentipologian lain yang masih digunakan dalam pelaporan pembangunan di Kabupaten Natuna berdasarkan **SK Dirjen PMD/Depdagri tahun 1996** yang menggunakan kriteria berdasarkan potensi arah pembangunan dan tingkat perkembangan, seperti berdasarkan aktivitas dominan warga masyarakat. Berdasarkan pentipologian tersebut, maka desa/kelurahan di Kabupaten Natuna meliputi Desa Perladangan (DPL), Desa Perkebunan (DPB), Desa Nelayan (DNL), Desa Pertanian (NPT), Desa Persawahan (DPS), Desa Jasa-Perdagangan (DJP), dan Desa Industri Besar (DIB).

Kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan dalam pengembangan atau penanganan daerah tertinggal perbatasan adalah pembangunan fisik, infrastruktur tetapi dengan mempertimbangkan unsur



keamanan dan kesatuan wilayah. Salah satu program yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). Program tersebut salah satunya akan dilaksanakan di Pulau Sekatung mulai bulan April 2007 dengan alokasi dana sebesar Rp 3 milyar yang bersumber dari APBD I Kepulauan Riau. Kegiatan lain yang akan dilaksanakan terkait dengan program akselerasi pembangunan melalui program PPK Mandiri tahun 2007 yaitu pembangunan infrastruktur di lima kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp 500 juta per kecamatan per tahun. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membuka aksesibilitas desa atau kecamatan sehingga dapat berdampak pada percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Setiap kecamatan harus mengusulkan prioritas satu desa, yaitu Desa Pulau Panjang Kecamatan Subi, Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut, Desa Impul Kecamatan Jemaja, Desa Telaga Kecamatan Siantan, serta Desa Kelarik Barat Kecamatan Bunguran Utara.

Secara deduktif dapat diidentifikasi di setiap daerah dan desa-desa perbatasan terdapat sejumlah potensi utama yang terdiri dari:

1. Penduduk atau sumber daya manusia (SDM)
2. Sumber daya alam (SDA)
3. Teknologi
4. Organisasi – kelembagaan mencakup sosial budaya

Tingkat hidup (tingkat kesejahteraan) penduduk dapat dipandang sebagai hasil interaksi SDM dengan SDA, dimana kemampuan berinteraksi SDM dengan SDA sangat ditentukan oleh kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi dan organisasi-kelembagaan.

Sumber daya manusia mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Dari hasil kegiatan lapang diketahui bahwa kuantitas penduduk di daerah dan desa-desa perbatasan bervariasi cukup besar. Keadaan ini dapat ditunjukkan umpamanya pada indikator jumlah dan perkembangan penduduk kabupaten dan kecamatan, jumlah penduduk per desa, dan juga pada ukuran keluarga (rumah tangga). Dari hasil analisis gerombol juga diketahui sejumlah variabel demografi (penduduk)

yang merupakan penciri gerombol yang meliputi: jumlah penduduk, ukuran keluarga, persentase penduduk laki-laki dan perempuan, kepadatan penduduk geografis, kepadatan agraris, dan jumlah buruh tani.

Kualitas penduduk meliputi kualitas fisik dan non-fisik. Kualitas fisik sangat terkait dengan kemampuan penyediaan kebutuhan pokok (kebutuhan dasar) manusia. Kualitas fisik sangat ditentukan oleh keadaan pangan dan gizi masyarakat, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan. Kualitas non-fisik penduduk terkait dengan keadaan sosial budaya masyarakat setempat seperti aspek tingkat pendidikan atau keterampilan dan pembentukan sikap-sikap efisiensi, kerajinan, dan etos kerja.

Potensi SDA daerah dan desa-desa perbatasan terletak di laut dan di darat. Desa-desa perbatasan yang memang terletak sepanjang garis pantai atau tidak jauh dari pantai dan di pulau-pulau kecil mempunyai potensi perikanan laut yang melimpah seperti yang terlihat di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sangihe. Selain itu, terdapat potensi lahan pertanian sawah dan lahan pertanian non sawah, serta lahan non pertanian yang sangat bervariasi di desa-desa perbatasan. Sejumlah variabel dari potensi SDA ini dapat diidentifikasi sebagai penciri gerombol yang terdiri dari rata-rata kepemilikan lahan pertanian sawah, rata-rata kepemilikan lahan pertanian non sawah, pola penguasaan lahan pertanian sawah, pola penguasaan lahan pertanian non sawah, pola penguasaan lahan non pertanian, dan luas lahan pertanian yang tidak diusahakan.

Teknologi dapat diartikan secara luas yang mencakup sarana-prasarana teknologi yang terdapat pada bidang pertanian dan perikanan, bidang non-pertanian, dan modal. Hasil kegiatan lapang menunjukkan bahwa dalam hal teknologi terlihat variasi antar daerah-daerah dan desa-desa perbatasan, umpamanya dalam hal prasarana, sarana dan biaya transportasi, sarana komunikasi, teknologi di bidang pertanian dan perikanan, dan produk-produk unggulan.

Organisasi-kelembagaan terdapat di berbagai bidang yang dapat dibedakan sebagai organisasi-kelembagaan dibidang ekonomi dan organisasi-kelembagaan dibidang non ekonomi. Keberadaan organisasi-kelembagaan bervariasi antara daerah dan desa-desa perbatasan, misalnya dalam hal keberadaan Bank dan

lembaga keuangan lainnya dan kelembagaan kerjasama kelompok. Berbagai organisasi-kelembagaan yang merupakan penciri gerombol antara lain adalah: kelembagaan kredit (KKP, KUK, KPR, lainnya) kelembagaan keuangan informal, kelembagaan pendidikan (SD, SLTP) dan kelembagaan komunitas masyarakat.

## **BAB VII.**

### **REKOMENDASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL DI KAWASAN PERBATASAN**

Pada dasarnya rekomendasi ini dibuat berdasarkan hasil dari analisis clustering yang telah dilakukan pada Bab VI. Dalam merumuskan rekomendasi yang tepat dan akurat, pemahaman mengenai kondisi eksisting tentunya sangat diperlukan. Dalam hal ini pengenalan terhadap kondisi eksisting dilakukan melalui proses pentipologian yang ditujukan untuk memetakan karakteristik dari setiap kelompok wilayah. Karakteristik ini bisa mencakup keunggulan maupun kelemahan yang dimiliki oleh satu kelompok wilayah. Berdasarkan keduanya maka dapat disusun rekomendasi kebijakan yang tepat untuk masing-masing tipologi wilayah. Berikut ini adalah hasil perumusan rekomendasi pemberdayaan masyarakat desa tertinggal di kawasan perbatasan, berdasarkan karakteristik tipologi wilayah pada masing-masing skenario.

#### **7.1. Skenario Pentipologian 2 Kelompok/Cluster**

Seperti telah diuraikan sebelumnya pentipologian dengan skenario 2 kelompok/cluster menghasilkan cluster wilayah tertinggal (cluster 1) dan cluster wilayah lebih maju (cluster 2). Pada cluster wilayah tertinggal terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan. Rekomendasi kebijakan ini disusun atas dasar keunggulan dan kelemahan dari setiap tipologi wilayah. Secara rinci pemetaan keunggulan dan kelemahan serta rekomendasi kebijakan pembangunan yang menyertainya terdapat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster I pada skenario 2 Kelompok/Cluster.

<b>Cluster I (Wilayah Tertinggal)</b>	<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekomendasi</b>
Energi		X	Perlu pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya lokal (biodiesel, biogas, dsb)
Sanitasi dan Kesehatan		X	Perlu penyuluhan mengenai sanitasi dan peningkatan sarana prasarana kesehatan
Kelembagaan		X	Perlu pemberdayaan

			kelembagaan masyarakat lokal dan penguatan kapasitas lembaga pemerintahan desa
Lingkungan Buatan		X	Perlu pengendalian pencemaran dan rehabilitasi tanah dan air
Lingkungan Alam	X		Perlu perencanaan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan
Lingkungan Sosial	X		Perlu pengembangan potensi sosial menjadi modal sosial
Aktivitas Ekonomi		X	Perlu pengembangan investasi, aktivitas industri dan akses kepada sumber daya financial
Infrastruktur		X	Perlu pengembangan sarana prasarana transportasi dan komunikasi
Lokasi	Kawasan Perdesaan		

Selanjutnya rekomendasi kebijakan yang tepat untuk wilayah-wilayah pada cluster 2, secara rinci terdapat pada tabel 7.2. Meskipun wilayah-wilayah pada cluster 2 ini memiliki kondisi yang relatif lebih unggul, namun rekomendasi kebijakan pembangunan diperlukan mengingat tantangan pembangunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tanpa adanya keunggulan komparatif maupun kompetitif yang memadai, maka suatu wilayah akan semakin sulit untuk bersaing.

Tabel 7.2. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster II pada Skenario 2 Kelompok/Cluster.

<b>Cluster II (Wilayah Maju)</b>	<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekomendasi</b>
Energi	X		Perlu optimalisasi pemanfaatan energi dan pengembangan sumber energi baru non BBM
Sanitasi dan Kesehatan	X		Perlu upaya-upaya untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat kepada masyarakat dan meningkatkan status kesehatan masyarakat
Kelembagaan	X		Perlu penguatan kelembagaan masyarakat lokal dan penciptaan <i>good</i>

			<i>governance</i>
Lingkungan Buatan	X		Perlu monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara
Lingkungan Alam		X	Perlu pengendalian pemanfaatan lahan dan sumber daya alam serta rehabilitasi lingkungan
Lingkungan Sosial		X	Perlu upaya-upaya resolusi konflik dan pemerataan tingkat kesejahteraan
Aktivitas Ekonomi	X		Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat
Infrastruktur	X		Perlu upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk menarik investasi
Lokasi	Kawasan Perkotaan		

## 7.2. Skenario Pentipologian 3 Kelompok/Cluster

Seperti telah diuraikan sebelumnya dalam bab VI, kelompok/ cluster wilayah yang dihasilkan mencakup tipologi wilayah tertinggal, wilayah transisi, dan wilayah yang lebih maju. Dapat dilihat bahwa cluster I menunjukkan kelompok wilayah transisi. Secara rinci rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.3. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster I pada Skenario 3 Kelompok/Cluster.

Cluster I (Wilayah Transisi)	Keunggulan	Kelemahan	Rekomendasi
Energi	X		Perlu optimalisasi pemanfaatan energi dan pengembangan sumber energi baru non BBM
Sanitasi dan Kesehatan		X	Perlu penyuluhan mengenai sanitasi dan peningkatan sarana prasarana kesehatan
Kelembagaan	X		Perlu penguatan kelembagaan masyarakat lokal dan

			penciptaan <i>good governance</i>
Lingkungan Buatan		X	Perlu pengendalian pencemaran dan rehabilitasi tanah dan air
Lingkungan Alam		X	Perlu pengendalian pemanfaatan lahan dan sumber daya alam serta rehabilitasi lingkungan
Lingkungan Sosial		X	Perlu upaya-upaya resolusi konflik dan pemerataan tingkat kesejahteraan
Aktivitas Ekonomi	X*		Perlu upaya-upaya untuk melakukan industrialisasi dan meningkatkan akses kepada sumber daya finansial
Infrastruktur		X	Perlu pengembangan sarana prasarana transportasi dan komunikasi
Lokasi	Kawasan Perdesaan		

Keterangan : X\* menunjukkan keunggulan aktivitas ekonomi (sudah terdapat perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan) tetapi belum ada kawasan sentra industri dan akses kepada sumber daya finansial

Berikutnya untuk wilayah-wilayah yang masuk dalam cluster II yang merupakan kelompok wilayah tertinggal, rekomendasi kebijakan pembangunan yang disampaikan dapat dilihat secara rinci pada tabel 7.4. dapat dilihat bahwa rekomendasi kebijakan pembangunan yang disampaikan merupakan upaya-upaya dasra yang umum dilakukan pada masa-masa awla pembangunan, meningkat kondisi wilayahnya yang benar-benar tertinggal.

Tabel 7.4. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster II pada Skenario 3 Kelompok/Cluster.

Cluster II (Wilayah Tertinggal)	Keunggulan	Kelemahan	Rekomendasi
Energi		X	Perlu pengembangan energi alternatif

			berbasis sumber daya lokal (biodiesel, biogas, dsb)
Sanitasi dan Kesehatan		X	Perlu penyuluhan mengenai sanitasi dan peningkatan sarana prasarana kesehatan
Kelembagaan		X	Perlu pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal dan penguatan kapasitas lembaga pemerintahan desa
Lingkungan Buatan	X		Perlu monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara
Lingkungan Alam	X		Perlu perencanaan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan
Lingkungan Sosial	X		Perlu pengembangan potensi sosial menjadi modal social
Aktivitas Ekonomi		X	Perlu pengembangan investasi, aktivitas industri dan akses kepada sumber daya financial
Infrastruktur		X	Perlu pengembangan sarana prasarana transportasi dan komunikasi
Lokasi	Kawasan Perdesaan		

Selanjutnya rekomendasi kebijakan pembangunan yang dapat disampaikan untuk wilayah-wilayah pada cluster III secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.5. Meskipun wilayah-wilayah pada cluster III ini merupakan kelompok wilayah yang relatif lebih maju, masih diperlukan upaya-upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah baik berupa keunggulan komparatif maupun kompetitif. Kedua keunggulan ini penting sebagai pijakan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 7.5. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster III pada Skenario 3 Kelompok/Cluster.

<b>Cluster III (Wilayah Maju)</b>	<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekomendasi</b>
Energi	X		Perlu optimalisasi pemanfaatan energi dan pengembangan sumber energi baru non BBM
Sanitasi dan Kesehatan	X		Perlu upaya-upaya untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat kepada masyarakat dan meningkatkan status kesehatan masyarakat
Kelembagaan	X		Perlu penguatan kelembagaan masyarakat lokal dan penciptaan <i>good governance</i>
Lingkungan Buatan	X		Perlu monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara
Lingkungan Alam		X	Perlu pengendalian pemanfaatan lahan dan sumber daya alam serta rehabilitasi lingkungan
Lingkungan Sosial		X	Perlu upaya-upaya resolusi konflik dan pemerataan tingkat kesejahteraan
Aktivitas Ekonomi	X		Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat
Infrastruktur	X		Perlu upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk menarik investasi
Lokasi	Kawasan Perkotaan		

### 7.3. Skenario Pentipologian 4 Kelompok/Cluster

Seperti telah dikemukakan dalam bab VI, proses pentipologian dengan menggunakan 4 kelompok/cluster wilayah ternyata menghasilkan kelompok wilayah maju di kawasan perdesaan (cluster I), kelompok wilayah tertinggal di kawasan perdesaan (cluster II), kelompok wilayah berbasis pertanian di kawasan perkotaan (cluster III), dan kelompok wilayah berbasis pertanian dan industri di kawasan perkotaan (cluster IV). Secara rinci rekomendasi kebijakan pembangunan untuk

wilayah-wilayah pada cluster I dapat dilihat pada tabel 7.6. Dari rekomendasi ini dapat dilihat bahwa kebijakan pembangunan dapat lebih difokuskan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada untuk dapat mendorong percepatan pembangunan di kawasan perdesaan.

Tabel 7.6. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster I pada Skenario 4 Kelompok/Cluster.

<b>Cluster I (Wilayah Maju di Kawasan Perdesaan)</b>	<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekomendasi</b>
Energi	X		Perlu optimalisasi pemanfaatan energi dan pengembangan sumber energi baru non BBM
Sanitasi dan Kesehatan		X	Perlu penyuluhan mengenai sanitasi dan peningkatan sarana prasarana kesehatan
Kelembagaan	X		Perlu penguatan kelembagaan masyarakat lokal dan penciptaan <i>good governance</i>
Lingkungan Buatan		X	Perlu pengendalian pencemaran dan rehabilitasi tanah dan air
Lingkungan Alam		X	Perlu pengendalian pemanfaatan lahan dan sumber daya alam serta rehabilitasi lingkungan
Lingkungan Sosial		X	Perlu upaya-upaya resolusi konflik dan pemerataan tingkat kesejahteraan
Aktivitas Ekonomi	X*		Perlu upaya-upaya untuk melakukan industrialisasi dan meningkatkan akses kepada sumber daya finansial
Infrastruktur		X	Perlu pengembangan sarana prasarana transportasi dan komunikasi
Lokasi	Kawasan Perdesaan		

Kemudian rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih terperinci untuk wilayah-wilayah pada cluster II dapat dilihat secara rinci pada tabel 7.7. Dalam cluster

ini cukup banyak upaya-upaya pembangunan yang harus dilakukan mengingat kondisi wilayahnya yang relatif lebih tertinggal. Dalam hal ini upaya-upaya pembangunan masih mencakup hala-hal dasar yang sangat penting untuk dapat mengatasi ketertinggalan dan sekaligus melandasi pembangunan perekonomian wilayah yang lebih tangguh.

Tabel 7.7. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster II pada Skenario 4 Kelompok/Cluster.

<b>Cluster II (Wilayah Tertinggal di Kawasan Perdesaan)</b>	<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekomendasi</b>
Energi		X	Perlu pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya lokal (biodiesel, biogas, dsb)
Sanitasi dan Kesehatan		X	Perlu penyuluhan mengenai sanitasi dan peningkatan sarana prasarana kesehatan
Kelembagaan		X	Perlu pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal dan penguatan kapasitas lembaga pemerintahan desa
Lingkungan Buatan	X		Perlu monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara
Lingkungan Alam	X		Perlu perencanaan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan
Lingkungan Sosial	X		Perlu pengembangan potensi sosial menjadi modal sosial
Aktivitas Ekonomi		X	Perlu pengembangan investasi, aktivitas industri dan akses kepada sumber daya finansial
Infrastruktur		X	Perlu pengembangan sarana prasarana transportasi dan komunikasi
Lokasi	Kawasan Perdesaan		

Selanjutnya upaya-upaya pembangunan yang dapat dilakukan untuk wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam cluster III dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 7.8. Dapat dilihat bahwa rekomendasi kebijakan pembangunan yang disampaikan lebih ditujukan untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk menunjang pembangunan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian penduduk.

Tabel 7.8. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster III pada Skenario 4 Kelompok/Cluster.

<b>Cluster III (Wilayah Berbasis Pertanian di Kawasan Perkotaan)</b>	<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekomendasi</b>
Energi	X		Perlu optimalisasi pemanfaatan energi dan pengembangan sumber energi baru non BBM
Sanitasi dan Kesehatan	X		Perlu upaya-upaya untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat kepada masyarakat dan meningkatkan status kesehatan masyarakat
Kelembagaan	X		Perlu penguatan kelembagaan masyarakat lokal dan penciptaan <i>good governance</i>
Lingkungan Buatan	X		Perlu monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara
Lingkungan Alam	X		Perlu perencanaan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan
Lingkungan Sosial		X	Perlu upaya-upaya resolusi konflik dan pemerataan tingkat kesejahteraan
Aktivitas Ekonomi	X		Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat
Infrastruktur	X*		Perlu upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk menarik investasi dan pengembangan

			infrastruktur transportasi dan komunikasi
Lokasi	Kawasan Perkotaan		

Keterangan : X\* menunjukkan keunggulan infrastruktur transportasi tetapi masih memerlukan peningkatan karena alat transportasi utama yang digunakan masih kendaraan roda dua

Berikutnya rekomendasi kebijakan pembangunan yang dapat disampaikan untuk wilayah-wilayah pada cluster IV, secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.9. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa rekomendasi kebijakan pembangunan yang disamoaink khususnya dari sisi ekonomi ditujukan untuk lebih mendorong industrialisasi. Diharapkan industrialisasi ini dapat mendorong tingkat keunggulan kompaatif mauapun kompetitif dari wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam cluster IV ini.

Tabel 7.9. Pemetaan Keunggulan dan Kelemahan serta Rekomendasi yang Diusulkan untuk Cluster IV pada Skenario 4 Kelompok/Cluster.

<b>Cluster IV (Wilayah Berbasis Pertanian dan Industri di Kawasan Perkotaan)</b>	<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekomendasi</b>
Energi		X	Perlu pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya lokal (biodiesel, biogas, dsb)
Sanitasi dan Kesehatan		X	Perlu penyuluhan mengenai sanitasi dan peningkatan sarana prasarana kesehatan
Kelembagaan	X		Perlu penguatan kelembagaan masyarakat lokal dan penciptaan <i>good governance</i>
Lingkungan Buatan	X		Perlu monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara
Lingkungan Alam		X	Perlu pengendalian pemanfaatan lahan dan sumber daya alam serta rehabilitasi lingkungan
Lingkungan Sosial		X	Perlu upaya-upaya resolusi konflik dan pemerataan tingkat kesejahteraan
Aktivitas Ekonomi	X*		Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan investasi di

			sektor pertanian dan meningkatkan akses kepada sumber daya finansial
Infrastruktur	X		Perlu upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk menarik investasi
Lokasi	Kawasan Perkotaan		

Keterangan : X\* menunjukkan telah terdapat kawasan sentra industri tetapi belum ada perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya dan belum ada akses kepada sumber daya finansial

## **BAB VI.**

### **TIPOLOGI DESA PERBATASAN TERTINGGAL**

Berdasarkan hasil analisis pentipologian dengan menggunakan teknik *two step clustering*, terdapat 3 skenario yang masing-masing menghasilkan 2, 3 dan 4 kelompok/ *cluster* wilayah berdasarkan tipologinya. Pengelompokan yang menghasilkan 3 kelompok/ *cluster* wilayah secara statistik merupakan pengelompokan yang paling optimal. Meskipun demikian pengelompokan yang menghasilkan 2 dan 4 kelompok/ *cluster* wilayah perlu diperhatikan mengingat tipologi wilayah yang lebih sedikit memiliki karakteristik penciri kelompok yang secara signifikan cukup berbeda, dan tipologi wilayah yang lebih beragam akan memudahkan perumusan program-program pembangunan prioritas untuk masing-masing tipologi wilayah.

#### **6.1. Hasil Pentipologian Berdasarkan Skenario 2 Kelompok/ *cluster* Wilayah**

Berdasarkan pengelompokan yang menghasilkan 2 kelompok/ *cluster* wilayah ternyata masing-masing tipologi memiliki karakteristik penciri kelompok yang secara signifikan cukup berbeda (Tabel 6.1). Wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kelompok/ *cluster* I secara umum dapat digambarkan sebagai desa-desa tertinggal di daerah perbatasan.

Ketertinggalan ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang muncul sebagai penciri karakteristik kelompok/ *cluster* wilayah I. Dari sisi kapasitas energi ternyata kebanyakan masyarakatnya menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Pasokan BBM kemungkinan besar sulit untuk dijangkau sehingga akibatnya aktivitas ekonomi atau produksi akan sulit berkembang. Selanjutnya dilihat dari sisi sanitasi dan kesehatan, rata-rata tempat buang air sebagian besar keluarga adalah jamban bersama/ umum. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk membiasakan diri hidup sehat masih sangat rendah. Belum lagi karakteristik penciri lainnya yang memperburuk sanitasi adalah kebiasaan sebagian besar keluarga yang masih membuang sampah ke sungai dan sulitnya untuk mencapai puskesmas/ fasilitas kesehatan yang lain.

Dari sisi kelembagaan kondisinya juga relatif lemah dimana hal ini ditandai dengan tidak adanya kelembagaan masyarakat seperti majelis taklim, kelompok pengakian, kelompok kebaktian, LSM dan sebagainya. Situasi ini menunjukkan bahwa modal sosial dari masyarakat di wilayah-wilayah ini sangat rapuh. Ditambah lagi kapasitas pemerintah desa juga relatif terbatas yang ditandai dari indikator tingkat pendidikan kepala desa yang hanya tamatan SD.

Satu hal yang cukup mengherankan, wilayah-wilayah tertinggal ini juga dicirikan oleh adanya kasus/ masalah lingkungan buatan dalam setahun terakhir yang bisa mencakup pencemaran tanah/ air/ udara. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas-aktivitas *enclave* yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tanpa memperhatikan besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat desa.

Meskipun demikian sampai sejauh ini tidak ada kasus lingkungan alam dalam 3 tahun terakhir dan tidak ada kasus/ masalah sosial yang terjadi dalam setahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah tertinggal rata-rata kondisi alam dan lingkungannya masih sangat baik meskipun di beberapa tempat harus menerima limbah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.

Sementara itu dari sisi aktivitas ekonomi sebagian besar masih mengandalkan pada aktivitas pertanian dimana jumlah KK yang bekerja di sektor pertanian mencapai lebih dari 87,5%. Sayangnya aktivitas pertanian masih bersifat tradisional dimana hal ini ditandai dengan tidak adanya perusahaan pertanian; tidak adanya kawasan/sentra industri; tidak adanya lembaga keuangan informal; dan tidak adanya fasilitas kredit ketahanan pangan (KKP), Kredit Usaha Kecil (KUK) dan sebagainya. Dengan terbatasnya akses terhadap industri dan sumber finansial maka aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah ini menjadi sulit untuk berkembang.

Terbatasnya aktivitas ekonomi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas ternyata juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Situasi ini ditunjukkan oleh indikator terbatasnya alat transportasi yang dapat digunakan. Berbagai indikator yang mencirikan ketertinggalan ini ternyata banyak terdapat di desa-desa yang memang berlokasi di kawasan perdesaan.



Tabel 6.1. Deskripsi Tipologi Kecamatan Terluar dengan Skenario 2 Cluster

Skenario Cluster	Tipologi	Deskripsi Tipologi
Luar_2Cluster	I	Kayu bakar pada umumnya digunakan masyarakat sebagai bahan bakar untuk memasak, sanitasi lingkungan kurang baik, tidak ada kelembagaan komunitas masyarakat, kelembagaan pemerintah masih kurang memadai, terdapat kasus lingkungan buatan, tidak ada kasus lingkungan alam, tidak ada kasus lingkungan sosial, aktivitas ekonomi didominasi sektor pertanian bersifat tradisional, infrastruktur kurang memadai, lokasi di wilayah perdesaan.
	II	Minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak, sanitasi lingkungan relatif baik, terdapat kelembagaan komunitas masyarakat, kelembagaan pemerintah cukup memadai, tidak ada kasus lingkungan buatan, terdapat kasus lingkungan alam, terjadi kasus/ masalah lingkungan alam, aktivitas ekonomi selain sektor pertanian mulai berkembang, infrastruktur relatif memadai, lokasi di wilayah perkotaan.

Selanjutnya desa-desa yang termasuk ke dalam kelompok/ *cluster* wilayah II memiliki ciri-ciri sebagai wilayah desa yang lebih maju. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan bahan bakar yang telah berupa minyak tanah. Sementara dari sisi sanitasi dan kesehatan dicirikan oleh tempat buang air besar sebagian keluarga adalah jamban sendiri, pembuangan sampah yang telah menggunakan angkutan sampah, dan akses yang relatif mudah ke rumah sakit/ fasilitas kesehatan yang lain.

Sementara dari sisi kelembagaan, kelembagaan-kelembagaan komunitas masyarakat mulai berkembang baik berupa majelis taklim, kelompok pengajian, kelompok kebaktian, LSM dan sebagainya. Kondisi ini mencerminkan adanya modal sosial masyarakat yang cukup berkembang. Demikian pula kapasitas aparat desanya sudah cukup baik dimana hal ini ditunjukkan oleh tingkat pendidikan kepala desa yang tamatan Perguruan Tinggi.

Satu hal yang menarik ternyata kondisi wilayah yang lebih maju di daerah perbatasan tidak memiliki masalah lingkungan buatan seperti pencemaran tanah, udara dan air. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah-wilayah ini merupakan aktivitas ekonomi yang mampu meminimalkan

limbah seperti pertanian, perkebunan, perikanan ataupun ekowisata. Namun sayangnya wilayah ini diwarnai oleh adanya kasus/ masalah lingkungan alam seperti banjir, longsor dan sebagainya. Kemungkinan situasi ini menggambarkan pembukaan lahan yang berlebihan baik untuk pertanian, perkebunan maupun permukiman yang kemudian mendorong timbulnya berbagai dampak negatif seperti banjir, longsor dan sebagainya. Kasus lainnya yang juga terjadi adalah masalah sosial seperti konflik, kriminalitas dan sebagainya. Kemajuan atau perkembangan wilayah di Indonesia yang lebih dominan mengikuti mekanisme *market* memang seringkali diikuti dengan masalah-masalah lingkungan dan sosial.

Dari sisi aktivitas ekonomi, meskipun sektor pertanian terlihat masih dominan namun persentase keluarga pertanian sudah mulai berkurang yaitu kurang dari 65%. Hal ini menunjukkan aktivitas-aktivitas non pertanian juga sudah mulai berkembang. Kemajuan perekonomian wilayah juga ditunjukkan oleh berkembangnya perusahaan pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan dan sebagainya, adanya kawasan sentra industri, terdapatnya lembaga keuangan informal sebagai alternatif sumber modal finansial, dan adanya fasilitas kredit KKP, KUK dan sebagainya.

Berkembangnya aktivitas perekonomian di wilayah pada *cluster* II ini juga diakibatkan oleh kondisi infrastruktur transportasi yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator alat transportasi utama yang berupa kendaraan roda tiga atau lebih. Berbagai indikator yang mencerminkan wilayah yang lebih maju ini ternyata dimiliki oleh desa-desa yang termasuk dalam kategori desa-desa di wilayah perkotaan.

## **6.2. Hasil Pentipologian Berdasarkan Skenario 3 Kelompok/*cluster* Wilayah**

Secara umum desa-desa yang masuk ke dalam kelompok/ *cluster* wilayah I memiliki karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai tipologi wilayah transisi antara wilayah tertinggal dan maju (Tabel 6.2). Dari sisi kapasitas energi ternyata bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat adalah minyak tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan BBM sudah dapat diakses di wilayah ini. Namun dari sisi sanitasi dan kesehatan kondisinya masih memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari tempat buang air besar sebagian besar keluarga yang

masih berupa jamban bersama/ umum, kebiasaan masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke sungai, dan fasilitas kesehatan juga sulit untuk diakses. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk membiasakan diri hidup sehat masih relatif rendah.

Selanjutnya dari sisi kelembagaan, kelembagaan komunitas masyarakat sudah mulai berkembang baik berupa majelis taklim, kelompok pengajian maupun kelompok kebaktian. Dari sisi kapasitas kelembagaan pemerintah juga relatif memadai dimana hal ini ditunjukkan oleh indikator status pendidikan kepala Desa yang tamatan Akademi/ Diploma Tiga.

Namun sangat disayangkan di kelompok wilayah transisi ini sudah mulai dijumpai kasus/ masalah baik di lingkungan buatan, alam maupun sosial. Masalah yang timbul di lingkungan buatan mencakup pencemaran tanah, air dan udara. Sementara masalah yang timbul di lingkungan alam mencakup banjir, longsor dan sebagainya. Sedangkan masalah di lingkungan sosial mencakup konflik dan kriminalitas. Ketiga masalah yang muncul secara paralel ini menunjukkan situasi yang biasa dijumpai di wilayah-wilayah transisi dimana seringkali muncul masalah-masalah yang biasa terjadi di wilayah tertinggal dan wilayah maju sekaligus.

Dilihat dari aktivitas ekonomi, ternyata sektor pertanian di wilayah-wilayah cluster I ini masih menjadi sumber utama penghasilan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah keluarga pertanian yang mencapai lebih dari 87,5%. Aktivitas pertanian di wilayah ini relatif sudah mulai berkembang yang dicirikan oleh keberadaan perusahaan pertanian tanaman pangan/ perkebunan/ peternakan/ perikanan dan sebagainya. Namun sayangnya perkembangan aktivitas pertanian dan produk-produk yang dihasilkan belum optimal karena tidak adanya kawasan sentra industri, tidak adanya lembaga keuangan informal dan tidak ada fasilitas kredit seperti KKP, KUK dan sebagainya. Akses kepada sumber daya finansial perlu ditingkatkan agar aktivitas pertanian dan industrialisasinya dapat berkembang.

Terhambatnya perkembangan aktivitas pertanian antara lain juga diakibatkan oleh terbatasnya infrastruktur transportasi. Hal ini dapat dilihat dari indikator alat transportasi utama yang belum mengandalkan pada kendaraan

bermotor. Desa-desa yang termasuk ke dalam kelompok/ *cluster* I ini rata-rata berada di kawasan perdesaan.

Tabel 6.2. Deskripsi Tipologi Kecamatan Terluar dengan Skenario 3 Cluster (Optimal)

Skenario Cluster	Tipologi	Deskripsi Tipologi
Luar_3Cluster	I	Minyak tanah umumnya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, sanitasi dan kesehatan masih memprihatinkan, kelembagaan komunitas mulai berkembang, kelembagaan pemerintah relatif memadai, mulai dijumpai kasus lingkungan alam, buatan maupun sosial. Aktifitas ekonomi masih dominan sektor pertanian yang baru mulai berkembang. Infrastruktur masih terbatas. rata-rata berada di lokasi perdesaan.
	II	Bahan bakar untuk memasak yaitu kayu bakar, sanitasi dan kesehatan cukup parah, tidak ada kelembagaan komunitas masyarakat, kelembagaan pemerintah terbatas, kondisi alam masih asri, tidak ada kasus lingkungan alam, buatan maupun sosial, aktifitas ekonomi masih didominasi sektor pertanian yang bersifat tradisional, infrastruktur terbatas, umumnya berada di wilayah perdesaan.
	III	Bahan bakar untuk memasak minyak tanah, sanitasi dan kesehatan cukup baik, terdapat kelembagaan komunitas masyarakat dan berkembang, kelembagaan pemerintahan cukup baik, tidak ada kasus lingkungan buatan, terdapat kasus lingkungan alam dan lingkungan sosial, aktifitas ekonomi selain sektor pertanian mulai berkembang, infrastruktur memadai, umumnya berada di wilayah perkotaan.

Selanjutnya desa-desa yang masuk ke dalam kelompok/ *cluster* wilayah II secara umum menunjukkan tipologi wilayah tertinggal. Dari sisi kapasitas energi, bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat masih berupa kayu bakar. Dari sisi sanitasi dan kesehatan kondisinya juga cukup parah. Hal ini dapat dilihat dari tempat buang air besar sebagian besar keluarga yang bukan berupa jamban, kebiasaan masyarakat membuang sampah di berbagai tempat, dan akses terhadap fasilitas kesehatan relatif sulit.

Selanjutnya dari sisi kelembagaan, ketertinggalan ini nampak dari tidak adanya kelembagaan komunitas masyarakat seperti majelis taklim, kelompok pengajian, ataupun kelompok kebaktian. Selain itu kapasitas kelembagaan

pemerintah desa juga terbatas yang dapat dilihat dari indikator tingkat pendidikan Kepala Desa yang hanya lulusan SD. Situasi ini menunjukkan lemahnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah-wilayah *cluster II* ini.

Situasi yang cukup mengembirakan ketertinggalan masyarakat di wilayah ini mengakibatkan kondisi lingkungan masih asri dan hubungan kekerabatan antar anggota masyarakat masih relatif kuat. Hal ini ditunjukkan oleh indikator tidak adanya kasus/ masalah lingkungan buatan yang berupa pencemaran tanah, air, udara; tidak adanya kasus/ masalah lingkungan alam yang berupa banjir dan tanah longsor; serta tidak adanya kasus/ masalah lingkungan sosial seperti konflik dan kriminalitas.

Dilihat dari aktivitas ekonominya ternyata sektor pertanian masih menjadi andalan untuk memperoleh penghasilan. Namun ternyata persentase keluarga pertanian hanya mencapai 65 – 89 %, yaitu tidak sebesar persentase keluarga pertanian di desa-desa yang termasuk ke dalam kelompok/ *cluster I* yang mencapai lebih dari 87,5%. Hal ini bisa saja terjadi mengingat kondisi di desa-desa tertinggal yang rata-rata lahanya sulit untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian baik karena kondisi alamnya, atau karena aksesibilitasnya yang buruk. Aktivitas pertanian yang berkembang di kelompok/ *cluster II* juga masih tradisional. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya perusahaan pertanian/ perkebunan/ peternakan/ pertanian dan sebagainya; tidak adanya kawasan/ sentra industri; tidak adanya lembaga keuangan informal; dan tidak adanya fasilitas kredit KKP atau KUK.

Kondisi wilayah yang relatif tertinggal ini juga terjadi karena terbatasnya infrastruktur transportasi yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya alat transportasi utama yang biasa digunakan. Desa-desa yang termasuk dalam kelompok/ *cluster* wilayah tertinggal ini ternyata merupakan desa-desa yang berada di kawasan perdesaan.

Berikutnya desa-desa yang termasuk ke dalam kelompok/ *cluster* wilayah III adalah desa-desa di kawasan perbatasan yang tergolong maju. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas energinya dimana sebagian besar masyarakat menggunakan bahan bakar berupa minyak tanah. Selanjutnya dari sisi sanitasi dan kesehatan kondisinya juga lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari tempat buang air besar

sebagian keluarga yang berupa jamban sendiri. Selain itu infrastruktur untuk mengangkut sampah juga sudah ada sehingga masyarakat terbiasa untuk membuang sampah pada tempat-tempat penampungan sampah. Demikian pula fasilitas kesehatan relatif lebih mudah untuk diakses.

Dari sisi kelembagaan, kelembagaan komunitas masyarakat juga berkembang. Hal ini ditandai dengan keberadaan majelis taklim, kelompok pangajian, kelompok kebaktian dan sebagainya. Sementara kapasitas lembaga pemerintah juga cukup baik apabila dilihat dari indikator tingkat pendidikan kepala desa yang mencapai perguruan tinggi.

Selanjutnya di kelompok/ *cluster* wilayah III ini ternyata tidak ada kasus/ masalah lingkungan buatan seperti pencemaran tanah, air dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang kemungkinan adalah aktivitas-aktivitas berbasis sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, ekowisata dan sebagainya yang tidak terlalu banyak menimbulkan pencemaran. Namun demikian dari sisi lingkungan alam ternyata dijumpai kasus seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Kemungkinan besar pembukaan lahan baik untuk pertanian maupun permukiman dan ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan menjadi penyebab timbulnya berbagai bencana alam tersebut. Demikian pula di wilayah kelompok/ *cluster* III muncul pula masalah-masalah sosial seperti konflik dan kriminalitas. Hal ini memang merupakan masalah yang biasa dijumpai di wilayah-wilayah maju.

Dari sisi aktivitas ekonomi dapat dilihat bahwa peranan sektor pertanian masih dominan. Sektor pertanian masih dijadikan sumber utama bagi sebagian besar penduduk untuk memperoleh penghasilan. Namun demikian persentase keluarga pertanian tidak sebesar wilayah-wilayah pada kelompok/ *cluster* I dan II, yaitu hanya mencapai kurang dari 65%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas non pertanian juga sudah mulai berkembang.

Sektor pertanian yang adapun juga sudah berkembang ditanda dengan keberadaan perusahaan-perusahaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya. Sementara itu aktivitas-aktivitas yang menunjang pengembangan perekonomian juga sudah ada seperti kawasan sentra industri, terdapatnya lembaga keuangan meskipun sifatnya informal, dan adanya fasilitas kredit KKP,

KUK dan sebagainya. Berbagai aktivitas perekonomian ini akan memberikan modal dan peluang yang lebih besar bagi wilayah-wilayah pada kelompok/ *cluster* III untuk terus tumbuh dan berkembang.

Perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah kelompok/ *cluster* III ini sebenarnya juga tidak terlepas dari infrastruktur transportasi yang lebih baik. Dapat dilihat bahwa alat transportasi utama yang digunakan adalah kendaraan roda tiga atau lebih. Desa-desa yang termasuk ke dalam kelompok wilayah maju ini ternyata merupakan desa-desa yang terdapat di kawasan perkotaan.

### **6.3. Hasil Pentipologian Berdasarkan Skenario 4 Kelompok/ *cluster* Wilayah**

Hasil pentipologian berdasarkan skenario 4 kelompok/*cluster* wilayah menghasilkan 4 karakteristik wilayah yang menggambarkan karakteristik yaitu (1) wilayah tertinggal di kawasan perdesaan (2) wilayah maju di kawasan perdesaan, (3) wilayah berbasis pertanian di kawasan perkotaan, dan (4) wilayah berbasis pertanian dan industri kecil di kawasan perkotaan (Tabel 6.3). Desa-desa yang termasuk dalam kelompok/ *cluster* I menunjukkan karakteristik wilayah maju di kawasan perdesaan. Hal ini bisa dilihat dari kapasitas energi dimana sebagian besar masyarakat sudah menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Sementara dari sisi sanitasi sebagian besar masyarakat sudah menggunakan jamban sebagai tempat buang air besar meskipun masih berupa jamban bersama atau umum. Namun sayangnya masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan fasilitas kesehatan juga relatif sulit untuk dijangkau.

Selanjutnya dari sisi kelembagaan, kelembagaan komunitas masyarakat sudah cukup berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga berupa majelis taklim, kelompok pengajian maupun kelompok kebaktian. Sementara itu kapasitas kelembagaan pemerintahan desa juga relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan Kepala Desa yang mencapai Akademi/Diploma 3.

Sayangnya karakteristik kelompok wilayah maju di kawasan perdesaan ini diwarnai dengan permasalahan lingkungan buatan, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Permasalahan lingkungan buatan menunjukkan adanya pencemaran tanah, air dan udara. Kemungkinan ini diakibatkan oleh penggunaan

pupuk kimia atau pestisida yang berlebihan dalam aktivitas pertanian. Sementara permasalahan lingkungan alam menunjukkan adanya kejadian banjir, tanah longsor dan sebagainya. Kemungkinan ini diakibatkan oleh meluasnya pembukaan lahan untuk pertanian dan permukiman. Sedangkan permasalahan lingkungan sosial yang berupa konflik atau kriminalitas biasa dijumpai pada wilayah- wilayah yang mulai maju. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa keeratan sosial dalam masarakat di wilayah kelompok/*cluster* I masih lemah.

Tabel 6.3. Deskripsi Tipologi Kecamatan Terluar dengan Skenario 4 Cluster

Skenario Cluster	Tipologi	Deskripsi Tipologi
Luar_4Cluster	I	sebagian besar masyarakat sudah menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, sanitasi dan kesehatan relatif masih kurang baik, kelembagaan komunitas masyarakat sudah cukup berkembang, kelembagaan pemerintah relatif baik, memiliki kasus/ masalah lingkungan alam, buatan maupun sosial, aktivitas ekonomi masih didominasi sektor pertanian dan belum berkembang, infrastruktur transportasi kurang memadai, merupakan wilayah yang relatif maju di kawasan perdesaan
	II	bahan bakar yang digunakan oleh sebagaian besar penduduk masih berupa kayu bakar, sanitasi dan kesehatan kondisinya sangat memprihatinkan, belum ada kelembagaan komunitas masyarakat, kapasitas kelembagaan pemerintah desa terbatas, tidak ada masalah-masalah lingkungan alam, buatan maupun sosial, aktivitas ekonominya masih mengandalkan pada sektor/aktivitas pertanian, Infrastruktur terbatas, berada di kawasan perdesaan.
	III	sebagiaian besar masyarakat sudah menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, sanitasi dan kesehatan kualitasnya lebih baik, kelembagaan komunitas masyarakat sudah relatif berkembang, kelembagaan pemerintah relatif lebih baik, tidak memiliki kasus/ masalah lingkungan alam atau buatan, namun memiliki kasus lingkungan sosial. aktifitas ekonomi yang masih menjadi andalan adalah sektor pertanian dan sudah cukup berkembang tapi belum mencapai tahap industrialisasi, Infrastruktur relatif cukup baik, rata-rata berlokasi di kawasan perkotaan



	IV	jenis bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat masih berupa kayu bakar, sanitasi dan kesehatan kondisinya sudah cukup baik, kelembagaan komunitas masyarakat dan pemerintah relatif baik, tidak ada kasus/ masalah lingkungan buatan, dijumpai kasus/ masalah lingkungan alam dan sosial. sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan, perkembangan aktifitas ekonomi belum optimal, Infrastruktur cukup baik, umumnya berada di wilayah perkotaan.
--	----	---

Selanjutnya dilihat dari aktivitas ekonomi, sektor pertanian ternyata masih dominan. Hal ini bisa dilihat dari sumber penghasilan utama penduduk yang mengandalkan pada sektor pertanian dan persentase keluarga pertanian yang mencapai lebih dari 87.5%. Aktivitas pertanian yang dijalankan juga sudah lebih berkembang dimana hal ini ditandai dengan adanya perusahaan-perusahaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya.

Namun sayangnya perkembangan aktivitas ekonomi masih belum optimal karena desa-desa dalam kelompok/*cluster* I ini belum memiliki kawasan sentra industri dan akses terhadap sumber daya finansial juga relatif terbatas. Terbatasnya akses terhadap sumber daya finansial ini dapat dilihat dari indikator tidak adanya lembaga keuangan informal dan juga tidak adanya fasilitas kredit seperti KKP ataupun KUK.

Kurang berkembangnya perekonomian di wilayah kelompok/*cluster* I antara lain juga diakibatkan oleh infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari alat transportasi utama yang belum menggunakan kendaraan. Meskipun demikian desa-desa yang masuk dalam kawasan perdesaan ini masih merupakan wilayah yang relatif maju di kawasan perdesaan.

Selanjutnya desa-desa yang termasuk ke dalam kelompok/*cluster* II secara umum menggambarkan karakteristik wilayah tertinggal di kawasan perdesaan. Dari sisi kapasitas energi, dapat dilihat bahwa bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar penduduk masih berupa kayu bakar. Sementara dari sisi sanitasi dan kesehatan, kondisinya juga sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari tempat buang air besar sebagian keluarga yang belum menggunakan jamban,

kebiasaan penduduk membuang sampah di sembarang tempat, dan akses kepada fasilitas kesehatan yang relatif sulit.

Dari sisi kelembagaan, ternyata belum ada kelembagaan komunitas masyarakat seperti majelis taklim, kelompok pengajian, kelompok kebaktian dan sebagainya. Hal ini menunjukkan minimnya kapasitas masyarakat dalam mengorganisasikan diri. Kondisi ini kemudian diperparah dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Indikasinya bisa dilihat dari tingkat pendidikan Kepala Desa yang hanya tamatan SD.

Desa-desanya yang masuk dalam kelompok/*cluster* II ternyata juga memiliki keunggulan yaitu tidak ada masalah-masalah lingkungan buatan seperti pencemaran, lingkungan alam seperti banjir dan tanah longsor, serta masalah lingkungan sosial seperti konflik dan kriminalitas. Situasi ini menggambarkan potensi alam dan lingkungan yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Dilihat dari aktivitas ekonominya, desa-desanya di kelompok/*cluster* II ini masih mengandalkan pada sektor/aktivitas pertanian. Hal ini bisa dilihat dari indikator sumber utama penghasilan penduduk yang masih mengandalkan kepada sektor pertanian. Selain itu nilai presentase keluarga pertanian juga relatif tinggi yaitu mencapai 65-80%. Namun sayangnya nilai persentase keluarga pertanian di *cluster* II masih lebih rendah daripada *cluster* I. Kemungkinan ini disebabkan oleh aktivitas pertanian yang masih bersifat tradisional, tidak seperti *cluster* I yang aktivitas pertaniannya sudah jauh lebih berkembang.

Selain faktor-faktor di atas, kondisi infrastruktur khususnya transportasi dan komunikasi juga ikut berdampak terhadap kinerja aktivitas ekonomi. Buruknya infrastruktur transportasi di wilayah kelompok/*cluster* II ini merupakan satu hal yang perlu dibenahi untuk dapat meningkatkan perekonomian wilayah. Dapat dilihat bahwa desa-desanya yang termasuk dalam kelompok/*cluster* wilayah I ini merupakan wilayah-wilayah yang berada di kawasan perdesaan.

Selanjutnya secara umum dapat dilihat bahwa desa-desanya yang termasuk dalam kelompok/*cluster* III merupakan desa-desanya berbasis aktivitas pertanian di kawasan perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas energi, dimana sebagian besar masyarakat sudah menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Sementara dari sisi sanitasi dan kesehatan kualitasnya juga lebih baik. Hal ini

dapat dilihat dari tempat buang air besar sebagian besar keluarga yang sudah menggunakan jamban sendiri. Selain itu masyarakat juga sudah terbiasa untuk membuang sampah di tempat-tempat penampungan sampah. Demikian pula fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah ini mudah untuk diakses.

Dari sisi kelembagaan, dapat dilihat bahwa kelembagaan komunitas masyarakat sudah relatif berkembang dimana sudah terdapat lembaga-lembaga seperti Majelis Taklim, kelompok pengajian, kelompok kebaktian dan sebagainya. Dari sisi kapasitas kelembagaan pemerintah kondisinya juga lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator tingkat pendidikan Kepala Desa yang mencapai Perguruan Tinggi.

Saru hal yang cukup menarik ternyata di desa-desa pada kelompok/cluster III ini tidak dijumpai permasalahan lingkungan buatan seperti pencemaran tanah, air dan udara dan tidak dijumpai permasalahan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Situasi ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di wilayah-wilayah ini relatif masih bagus ditengah perekonomian wilayah yang makin berkembang. Tentunya kondisi ini harus dipertahankan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun sayangnya dari sisi sosial masih dijumpai masalah-masalah seperti konflik maupun kriminalitas. Ternyata berkembangnya perekonomian di wilayah-wilayah ini masih belum diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk meredam masalah-masalah sosial.

Dari sisi aktivitas ekonomi, sektor pertanian ternyata masih menjadi andalan di desa-desa pada kelompok/cluster III ini. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase keluarga pertanian yang mencapai 80 – 87.5% dan sumber utama penghasilan penduduk yang masih mengandalkan kepada sektor pertanian. Namun nampaknya aktivitas pertanian yang diusahakan sudah cukup berkembang dimana ini dapat dilihat dari adanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya.

Sayangnya aktivitas ekonomi yang ada masih belum mencapai tahap industrialisasi. Hal ini nampak dari indikator tidak adanya kawasan sentra industri di wilayah-wilayah ini. Meskipun demikian aktivitas ekonomi yang ada dapat berkembang karena akses yang cukup baik terhadap sumber daya finansial.

Hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga keuangan informal dan adanya fasilitas kredit KKP dan KUK.

Perkembangan perekonomian di desa-desa pada kelompok/*cluster* III sebenarnya juga dipengaruhi oleh infrastruktur transportasi yang relatif cukup baik meskipun hanya menggunakan kendaraan roda dua. Tentunya kondisi infrastruktur transportasi ini masih harus ditingkatkan paling tidak hingga dapat dilalui oleh kendaraan roda tiga atau lebih. Dapat dilihat pula bahwa desa-desa ini rata-rata berlokasi di kawasan perkotaan.

Berikutnya desa-desa yang termasuk ke dalam kelompok/*cluster* IV secara umum menggambarkan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan industri di kawasan perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari jenis bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang masih berupa kayu bakar. Sementara dari sisi sanitasi dan kesehatan ternyata kondisinya sudah cukup baik meskipun tidak sebaik desa-desa yang termasuk dalam kelompok/*cluster* III. Hal ini dapat dilihat dari tempat buang air besar sebagian besar keluarga yang sudah berupa jamban sendiri. Selain itu meskipun infrastruktur pengangkut sampah masih terbatas ternyata masyarakat sudah terbiasa membuang sampah dalam lubang/dibakar. Namun sayangnya fasilitas kesehatan di desa-desa pada kelompok/*cluster* IV ini masih sulit untuk diakses.

Dari sisi kelembagaan, kondisinya juga relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kelembagaan komunitas masyarakat seperti Majelis Taklim, kelompok pengajian maupun kelompok kebaktian. Kapasitas kelembagaan pemerintahan juga relatif baik apabila dilihat dari indikator tingkat pendidikan Kepala desa yang mencapai Akademi/Diploma tiga.

Pada kelompok/*cluster* IV ternyata tidak dijumpai permasalahan lingkungan buatan yang berupa pencemaran tanah, air dan udara. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi produksi yang berkembang tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Namun sayangnya di wilayah-wilayah ini dijumpai adanya permasalahan lingkungan alam seperti banjir, longsor dan sebagainya maupun lingkungan sosial seperti konflik dan kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi yang meningkat telah mendorong

terjadinya degradasi lingkungan dan secara sosial juga menimbulkan konflik dan kriminalitas.

Dari sisi aktivitas ekonomi, sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan. Hal ini dapat dilihat dari sumber utama penghasilan penduduk yang masih mengandalkan pada aktivitas pertanian dan jumlah persentase keluarga pertanian yang mencapai kurang dari 65%. Persentase keluarga pertanian yang rendah ini kemungkinan diakibatkan oleh berkembangnya industri kecil yang mampu memberikan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari indikator adanya kawasan sentra industri di desa-desa pada kelompok/*cluster* IV ini.

Sayangnya perkembangan perekonomian yang terjadi kurang dapat dioptimalkan karena terbatasnya akses kepada sumber daya finansial. Hal ini dapat dilihat dari indikator tidak adanya lembaga keuangan informal, dan tidak adanya fasilitas kredit KKP atau KUK.

Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur transportasi. Desa-desa di kelompok/*cluster* IV ternyata memiliki infrastruktur transportasi yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator alat transportasi utama yang digunakan adalah kendaraan roda tiga atau lebih. Desa-desa yang termasuk dalam kelompok/*cluster* IV merupakan desa-desa yang terdapat di kawasan perkotaan.

Lampiran 6.1. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_2 Cluster

ID Wilayah	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Cluster
6402120001	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	DELANG KEROHON	1
6402120002	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAKAQ	1
6402120003	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG LUNUK	1
6402120004	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LIRUNG UBING	1
6402120005	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	DATAH NAHA	1
6402120006	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG ISUN	1
6402120007	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	NAHA ARU	1
6402120008	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAHANGAI DUA	1
6402120009	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAHANGAI SATU	1
6402120010	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG TUYOQ	1
6402120011	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LIU MULANG	1
6402130001	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH SATU	1
6402130002	KUTAI BARAT	LONG APARI	TIONG OHANG	1
6402130003	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG KERIOK	1
6402130004	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH TIGA	1
6402130005	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH DUA	1
6402130006	KUTAI BARAT	LONG APARI	TIONG BUU	1
6402130007	KUTAI BARAT	LONG APARI	NAHA BUAN	1
6402130008	KUTAI BARAT	LONG APARI	NAHA TIFAB	1
6402130009	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG APARI	1
6402130010	KUTAI BARAT	LONG APARI	NOHA SILAT	1
9423050001	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	GAG	1
9423050002	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	PAM	1
9423050003	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MEOSMANGGARA	1
9423050004	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MANYAIFUIN	1
9423050005	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SELPELE	1
9423050006	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	BIANCI/ WAISELIP	1
9423050007	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MUTUS	1
9423050008	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SALIO	1
9423050009	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SAUKABU	1
9423050010	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	FAGALO	1
9423060001	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	MNIER	1
9423060002	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	WARWANAY	1
9423060003	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	BONI	1
9423060004	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	ASUKWERI	1
9423060005	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	ANDEY	1
9423060006	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	KABARE	1
9423060007	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	RAUKI	1
9423060008	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	KAPADIRI	1
9423060009	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	BONSAYOR	1
9423070001	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	YENKAWIR	1
9423070002	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	DOREKAR	1
9423070003	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	MEOSBEKWAN	1

Lampiran 6.1. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_2 Cluster (Lanjutan)

ID Wilayah	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Cluster
9423070004	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	RUTUM	1
9423070005	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	RENI	1
2103010001	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010001	2
2103010002	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	KUALA MARAS	2
2103010003	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010003	2
2103010004	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010004	2
2103010005	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	LETUNG	2
2103010006	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010006	2
2103010007	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	KERAMUT	2
2103010008	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010008	2
2103030001	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	2103030001	2
2103030002	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	2103030002	2
2103030003	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	SABANG BARAT	2
2103041001	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	2
2103041002	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	2103041002	2
2103041003	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	2103041003	2
2103042001	KEPULAUAN NATUNA	PULAU LAUT	2103042001	2
2103042002	KEPULAUAN NATUNA	PULAU LAUT	2103042002	2
2103050001	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	CEMAGA	2
2103050002	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	2
2103050004	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050004	2
2103050005	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	TAPAU	2
2103050006	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050006	2
2103050007	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	CERUK	2
2103050008	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050008	2
2103050009	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050009	2
2103050010	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050010	2
2103050011	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050011	2
7103100001	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	LENGANENG	2
7103100002	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	TAROLANG	2
7103100003	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	TOLA	2
7103100004	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU	2
7103100005	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	PETTA	2
7103100006	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BENGETANG	2
7103100007	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALURAE	2
7103100008	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	UTAUANO	2
7103100009	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	NAHASAHABE	2
7103100010	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BEHA	2
7103100011	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALEKUBE	2
7103100012	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MALA	2
7103100013	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BAHU	2
7103100014	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALASUGE	2
7103100018	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MARORE	2

Lampiran 6.1. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_2 Cluster (lanjutan)

<b>ID Wilayah</b>	<b>Nama Kabupaten</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Cluster</b>
7103100019	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	PUSUNGE	2
7103100020	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MOADE	2
7103101001	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	NUSA	2
7103101002	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	NANEDAKELE	2
7103101003	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	BUKIDE	2
7103101004	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	BUKIDE TIMUR	2
7103110001	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KENDAHE DUA	2
7103110002	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KENDAHE SATU	2
7103110003	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	TALAWID	2
7103110004	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	TARIANGLAMA	2
7103110005	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	PEMPALARAENG	2
7103110006	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	MOHONGSAWANG	2
7103110007	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	LIPAENG	2
7103110008	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KAWALUSO	2
7103110009	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KAWIO	2
2103050003	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050003	.



Lampiran 6.2. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_3Cluster (Optimal)

ID Wilayah	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Cluster
6402120001	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	DELANG KEROHON	1
6402120002	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAKAQ	1
6402120003	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG LUNUK	1
6402120004	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LIRUNG UBING	1
6402120005	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	DATAH NAHA	1
6402120006	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG ISUN	1
6402120007	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	NAHA ARU	1
6402120008	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAHANGAI DUA	1
6402120009	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAHANGAI SATU	1
6402120010	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG TUYOQ	1
6402120011	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LIU MULANG	1
6402130001	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH SATU	1
6402130002	KUTAI BARAT	LONG APARI	TIONG OHANG	1
6402130003	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG KERIOK	1
6402130004	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH TIGA	1
6402130005	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH DUA	1
6402130006	KUTAI BARAT	LONG APARI	TIONG BUU	1
6402130007	KUTAI BARAT	LONG APARI	NAHA BUAN	1
6402130008	KUTAI BARAT	LONG APARI	NAHA TIFAB	1
6402130009	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG APARI	1
6402130010	KUTAI BARAT	LONG APARI	NOHA SILAT	1
9423050001	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	GAG	2
9423050002	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	PAM	2
9423050003	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MEOSMANGGARA	2
9423050004	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MANYAIFUIN	2
9423050005	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SELPELE	2
9423050006	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	BIANCI/ WAISELIP	2
9423050007	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MUTUS	2
9423050008	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SALIO	2
9423050009	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SAUKABU	2
9423050010	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	FAGALO	2
9423060001	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	MNIER	2
9423060002	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	WARWANAY	2
9423060003	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	BONI	2
9423060004	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	ASUKWERI	2
9423060005	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	ANDEY	2
9423060006	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	KABARE	2
9423060007	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	RAUKI	2
9423060008	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	KAPADIRI	2
9423060009	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	BONSAYOR	2
9423070001	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	YENKAWIR	2
9423070002	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	DOREKAR	2
9423070003	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	MEOSBEKWAN	2

Lampiran 6.2. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_3Cluster (Lanjutan)

ID Wilayah	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Cluster
9423070004	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	RUTUM	2
9423070005	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	RENI	2
2103010001	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010001	3
2103010002	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	KUALA MARAS	3
2103010003	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010003	3
2103010004	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010004	3
2103010005	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	LETUNG	3
2103010006	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010006	3
2103010007	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	KERAMUT	3
2103010008	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010008	3
2103030001	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	2103030001	3
2103030002	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	2103030002	3
2103030003	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	SABANG BARAT	3
2103041001	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	3
2103041002	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	2103041002	3
2103041003	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	2103041003	3
2103042001	KEPULAUAN NATUNA	PULAU LAUT	2103042001	3
2103042002	KEPULAUAN NATUNA	PULAU LAUT	2103042002	3
2103050001	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	CEMAGA	3
2103050002	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	3
2103050004	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050004	3
2103050005	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	TAPAU	3
2103050006	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050006	3
2103050007	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	CERUK	3
2103050008	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050008	3
2103050009	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050009	3
2103050010	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050010	3
2103050011	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050011	3
7103100001	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	LENGANENG	3
7103100002	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	TAROLANG	3
7103100003	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	TOLA	3
7103100004	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU	3
7103100005	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	PETTA	3
7103100006	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BENGETANG	3
7103100007	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALURAE	3
7103100008	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	UTAUANO	3
7103100009	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	NAHASAHABE	3
7103100010	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BEHA	3
7103100011	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALEKUBE	3
7103100012	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MALA	3
7103100013	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BAHU	3
7103100014	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALASUGE	3
7103100018	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MARORE	3

Lampiran 6.2. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_3Cluster (Lanjutan)

<b>ID Wilayah</b>	<b>Nama Kabupaten</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Cluster</b>
7103100019	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	PUSUNGE	3
7103100020	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MOADE	3
7103101001	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	NUSA	3
7103101002	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	NANEDAKELE	3
7103101003	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	BUKIDE	3
7103101004	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	BUKIDE TIMUR	3
7103110001	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KENDAHE DUA	3
7103110002	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KENDAHE SATU	3
7103110003	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	TALAWID	3
7103110004	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	TARIANGLAMA	3
7103110005	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	PEMPALARAENG	3
7103110006	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	MOHONGSAWANG	3
7103110007	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	LIPAENG	3
7103110008	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KAWALUSO	3
7103110009	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KAWIO	3
2103050003	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050003	.

Lampiran 6.3. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_4 Cluster

ID Wilayah	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Cluster
6402120001	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	DELANG KEROHON	1
6402120002	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAKAQ	1
6402120003	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG LUNUK	1
6402120004	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LIRUNG UBING	1
6402120005	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	DATAH NAHA	1
6402120006	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG ISUN	1
6402120007	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	NAHA ARU	1
6402120008	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAHANGAI DUA	1
6402120009	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG PAHANGAI SATU	1
6402120010	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LONG TUYOQ	1
6402120011	KUTAI BARAT	LONG PAHANGAI	LIU MULANG	1
6402130001	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH SATU	1
6402130002	KUTAI BARAT	LONG APARI	TIONG OHANG	1
6402130003	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG KERIOK	1
6402130004	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH TIGA	1
6402130005	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG PENANEH DUA	1
6402130006	KUTAI BARAT	LONG APARI	TIONG BUJ	1
6402130007	KUTAI BARAT	LONG APARI	NAHA BUAN	1
6402130008	KUTAI BARAT	LONG APARI	NAHA TIFAB	1
6402130009	KUTAI BARAT	LONG APARI	LONG APARI	1
6402130010	KUTAI BARAT	LONG APARI	NOHA SILAT	1
9423050002	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	PAM	2
9423050003	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MEOSMANGGARA	2
9423050004	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MANYAIFUIN	2
9423050005	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SELPELE	2
9423050006	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	BIANCI/ WAISELIP	2
9423050007	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	MUTUS	2
9423050008	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SALIO	2
9423050009	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	SAUKABU	2
9423050010	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	FAGALO	2
9423060001	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	MNIER	2
9423060002	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	WARWANAY	2
9423060003	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	BONI	2
9423060004	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	ASUKWERI	2
9423060005	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	ANDEY	2
9423060006	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	KABARE	2
9423060007	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	RAUKI	2
9423060008	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	KAPADIRI	2
9423060009	RAJA AMPAT	WAIGEO UTARA	BONSAYOR	2
9423070001	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	YENKAWIR	2
9423070002	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	DOREKAR	2
9423070003	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	MEOSBEKWAN	2
9423070004	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	RUTUM	2

Lampiran 6.3. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_4 Cluster (Lanjutan)

ID Wilayah	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Cluster
9423070005	RAJA AMPAT	KEPULAUAN AYAU	RENI	2
2103010001	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010001	3
2103010002	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	KUALA MARAS	3
2103010003	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010003	3
2103010004	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010004	3
2103010005	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	LETUNG	3
2103010006	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010006	3
2103010007	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	KERAMUT	3
2103010008	KEPULAUAN NATUNA	JEMAJA	2103010008	3
2103030001	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	2103030001	3
2103030002	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	2103030002	3
2103030003	KEPULAUAN NATUNA	MIDAI	SABANG BARAT	3
2103041001	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	3
2103041002	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	2103041002	3
2103041003	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN UTARA	2103041003	3
2103042001	KEPULAUAN NATUNA	PULAU LAUT	2103042001	3
2103042002	KEPULAUAN NATUNA	PULAU LAUT	2103042002	3
2103050001	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	CEMAGA	3
2103050002	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	3
2103050004	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050004	3
2103050005	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	TAPAU	3
2103050006	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050006	3
2103050007	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	CERUK	3
2103050008	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050008	3
2103050009	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050009	3
2103050010	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050010	3
2103050011	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050011	3
7103100011	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALEKUBE	3
7103110001	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KENDAHE DUA	3
7103110002	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KENDAHE SATU	3
7103110003	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	TALAWID	3
7103110004	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	TARIANGLAMA	3
7103110005	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	PEMPALARAENG	3
7103110006	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	MOHONGSAWANG	3
7103110007	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	LIPAENG	3
7103110009	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KAWIO	3
9423050001	RAJA AMPAT	WAIGEO BARAT	GAG	3
7103100001	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	LENGANENG	4
7103100002	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	TAROLANG	4
7103100003	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	TOLA	4
7103100004	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU	4
7103100005	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	PETTA	4

Lampiran 6.3. Anggota Masing-masing Cluster pada Skenario Luar\_4 Cluster (Lanjutan)

ID Wilayah	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Cluster
7103100006	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BENGGKETANG	4
7103100007	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALURAE	4
7103100008	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	UTAUURANO	4
7103100009	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	NAHASAHABE	4
7103100010	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BEHA	4
7103100012	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MALA	4
7103100013	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BAHU	4
7103100014	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALASUGE	4
7103100018	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MARORE	4
7103100019	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	PUSUNGE	4
7103100020	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	MOADE	4
7103101001	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	NUSA	4
7103101002	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	NANEDAKELE	4
7103101003	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	BUKIDE	4
7103101004	KEPULAUAN SANGIHE	NUSA TABUKAN	BUKIDE TIMUR	4
7103110008	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KAWALUSO	4
2103050003	KEPULAUAN NATUNA	BUNGURAN TIMUR	2103050003	.

### Lampiran 7.1. Daftar Variabel-variabel

Kode Variabel	Keterangan Variabel
V01	Luas Desa (Ha)
V02	Jumlah Penduduk (Orang)
V03	Jumlah Penduduk Laki-laki (Orang)
V04	Jumlah Penduduk Perempuan (Orang)
V05	Jumlah Keluarga
V06	Ukuran Keluarga
V07	Jumlah Keluarga KS dan Pra KS I (Keluarga)
V08	Persentase Penduduk Laki-laki (%)
V09	Persentase Penduduk Perempuan (%)
V10	Kepadatan Penduduk Geografis (Orang/Ha)
V11	Rasio Jumlah SD terhadap Jumlah Penduduk
V12	Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Jumlah Penduduk
V13	Rasio Jumlah Bidan dan Dukun Bayi Terhadap Jumlah Penduduk
V14	Persentase Jumlah Keluarga pra KS dan KS I (%)
V15	Persentase Jumlah Keluarga tidak menggunakan listrik PLN dan listrik non PLN (%)
V16	Persentase Jumlah Keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/ tepi sungai (%)
V17	Persentase Jumlah Keluarga di permukiman kumuh (%)
V18	Persentase Jumlah Keluarga yang menerima kartu sehat/ kartu peserta program jaminan kesehatan (%)
V19	(Jumlah SD dan yang sederajat Negeri / jumlah Keluarga pra KS dan KS I) x 1000 (Unit/Keluarga)
V20	(Jumlah SLTP dan yang sederajat Negeri / jumlah Keluarga pra KS dan KS I) x 1000 (Unit/Keluarga)
V21	(Jumlah puskesmas atau puskesmas pembantu / jumlah pra KS dan KS I) x 1000 (Unit/Keluarga)
V22	(Jumlah posyandu / jumlah pra KS dan KS I) x 1000 (Unit/Keluarga)
VN23	Bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar keluarga untuk memasak: 1.LPG, 2.Minyak tanah, 3.Kayu bakar, 4.lainnya
VN24	Tempat buang air besar sebagian besar keluarga: 1.Jamban Sendiri 2.Jamban Bersama /Umum 3.Bukan Jamban
VN25	Jenis Permukaan Jalan yang Terluas: 1.Aspal/Beton 2.Diperkeras (kerikil,Batu,dsb) 3.Tanah dan Lainnya
V26	Rasio Jumlah Wartel/Kiospon/ Warpostel/ Warparpostel terhadap jumlah penduduk (unit/orang)
V27	Persentase Jumlah Penduduk yang meninggal akibat penyakit muntaber atau diare selama setahun terakhir (%)
V28	Persentase Jumlah Penduduk yang meninggal akibat penyakit demam berdarah selama setahun terakhir (%)

### Lampiran 7.1. Daftar Variabel-variabel (Lanjutan)

Kode Variabel	Keterangan Variabel
V29	Persentase Jumlah Penduduk yang meninggal akibat penyakit ISPA selama setahun terakhir (%)
V30	Persentase Jumlah Penduduk yang meninggal akibat penyakit malaria selama setahun terakhir (%)
VO31	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala Desa: 1.Belum/Tidak tamat SD 2.Tamat SD dan sederajat 3.SLTP dan sederajat 4.SMU dan sederajat 5.Akademi/Diploma Tiga 6.Perguruan Tinggi
VN32	Keberadaan Kelembagaan Komunitas Masyarakat (Majelis ta'lim/kelompok pengajian/kelompok kebaktian/LSM/ Hansip/ Gotong royong): 1.Ya 2.Tidak
VN33	Kasus / masalah Lingkungan Buatan yang terjadi setahun terakhir (Pencemaran Tanah/ Air/ Udara): 1.Ada 2.Tidak
VN34	Kasus / masalah Lingkungan Alam yang terjadi 3 Tahun terakhir (Bencana Alam Tanah Longsor/ Banjir/ Banjir Bandang/ Gempa Bumi/ Gempa Bumi disertai Tsunami/ Pembakaran hutan/ladang/sawah): 1.Ada 2.Tidak
VN35	Kasus / masalah Lingkungan Sosial yang terjadi setahun terakhir (perkelahian massal/ Kasus kejahatan Pencurian/ Perampokan/ Penganiayaan/Kekerasan/ Perkosaan/ Peredaran gelap narkoba/ Pembunuhan/ Penjualan Anak/ Bunuh diri): 1.Ada 2.Tidak
VN36	Potensi Ekonomi Desa/Kelurahan yang menonjol dan yang sudah diberdayakan: 1.Pertanian ; 2.Industri Pengolahan ; 3.Perdagangan ; 4.Jasa ; 5.Lainnya
VO37	Persentase Keluarga Pertanian (%): 1. < 65.0 ; 2. 65.0 - 80.0 ; 3. 80.0 - 87.5 ; 4. ≥ 87.5
VN38	Sumber Utama Penghasilan Penduduk: 1.Pertanian ; 2.Industri Pengolahan ; 3.Perdagangan ; 4.Jasa ; 5.Lainnya
VN39	Sumber Penghasilan Utama Pertanian: 1.Tanaman Pangan 2.Perkebunan 3.Peternakan 4.Perikanan Darat 5.Perikanan Laut 6.Kehutanan 7.Lainnya
VN40	Pemanfaatan Hasil Tanaman Pangan atau Perkebunan: 1.dikonsumsi 2.dijual dan dikonsumsi
VN41	Produk Unggulan
V42	Jumlah Buruh Tani (%)
VN43	Alat Transportasi Utama: 1.Kendaraan tidak bermotor; 2.Kendaraan roda dua 3.Kendaraan roda tiga atau lebih 4.Lainnya
V44	Kepadatan Agraris (KK/Hektar)
V45	Rata-rata Pemilikan Lahan Pert Sawah (Ha/KK)
V46	Rata-rata Pemilikan Lahan Pert Non Sawah (Ha/KK)
V47	Pola Penggunaan Lahan Pertanian Sawah (%)
V48	Pola Penggunaan Lahan Pertanian Non Sawah (%)
V49	Pola Penggunaan Lahan Non Pertanian (%)
V50	Luas Lahan Pertanian yg tidak diusahakan (Ha)



### Lampiran 7.1. Daftar Variabel-variabel (Lanjutan)

Kode Variabel	Keterangan Variabel
VN51	Perusahaan Pertanian tanaman pangan/ perkebunan/ peternakan/ perikanan tangkap/ tambak/ budidaya laut/ kehutanan/ Lainnya: 1.Ada 2.Tidak ada
V52	Rasio Kios Saprodi (unit/ha)
VN53	Kawasan/ Sentra Industri/ Lingkungan atau Perkampungan Industri Kecil: 1.Ada 2.Tidak ada
V54	Jumlah Industri Sedang (unit/orang)
V55	Jumlah Industri Kecil dan RT (unit/orang)
V56	Fasilitas Perdagangan (unit/orang)
V57	Lembaga Keuangan Formal Bank (unit/orang)
V58	Lembaga Keuangan Formal Non Bank (unit/orang)
VN59	Lembaga Keuangan Informal : 1.Ada 2.Tidak ada
VN60	Fasilitas kredit Ketahanan Pangan (KKP)/ Kredit Usaha Kecil (KUK)/ Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/ Kredit lainnya: 1.Ada 2.Tidak
V61	Fasilitas Jasa Bengkel atau reparasi kendaraan bermotor/ alat-alat elektronik/ Usaha foto kopi/ Biro/Agen perjalanan wisata/ Tempat pangkas rambut/ Salon kecantikan/tata rias wajah/pengantin/ Bengkel las/ Persewaan alat-alat pesta (unit/orang)
VN62	Desa ini berada di wilayah: 1.Perkotaan 2.Perdesaan
VN63	Tempat buang sampah sebagian besar keluarga: 1.Tempat sampah kemudian diangkut 2.Dalam lubang/dibakar 3.Sungai 4.Lainnya
VN64	Kemudahan Mencapai Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Lain: 1.Sangat Mudah 2.Mudah 3.Sulit 4.Sangat Sulit